



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan Daerah;
- c. sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN  
2025-2045.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sragen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

- perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh).
  8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh).
  9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
  11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
  13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
  14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Daerah.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

#### Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan RTRW.

#### Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



- a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
  - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
  - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.

### BAB III PERUBAHAN RPJPD

#### Pasal 5

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

#### Pasal 6

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum  
  
Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19700822 199803 1007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (6-262/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sragen. Dengan demikian, RPJPD lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar dan arahan secara garis besar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya.

Dalam dua puluh tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Sragen untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional. Kurun waktu RPJP Daerah Kabupaten Sragen adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap RPJPD yaitu: RPJPD tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap ketiga, dan RPJPD tahap keempat. RPJPD Kabupaten Sragen digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 adalah untuk: a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian kebijakan umum daerah, b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkelanjutan dan e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah

pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJPD provinsi dan RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJMD merupakan visi dan misi Bupati terpilih. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.





PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : 6 TAHUN 2024  
TENTANG

# R P J P D

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2045

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN





# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-1
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.5. Sistematika Dokumen RPJPD .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-11
2.3. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-32
2.4. Aspek Pelayanan Umum .....	II-56
2.5. Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-58
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-59
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah .....	II-72
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Permasalahan Pembangunan .....	III-1
3.2. Isu Strategis .....	III-7
<b>BAB IV VISI DAN MISI DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Visi .....	IV-1
4.2. Misi .....	IV-6
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Arah Kebijakan Daerah .....	V-1
5.2. Sasaran Pokok .....	V-6
5.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	V-26
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Wilayah Administratif Menurut Kecamatan/Desa Kabupaten Sragen Tahun 2023 .....	II-1
Tabel 2.2.	Tinggi Wilayah dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2023 .....	II-2
Tabel 2.3.	Luas Wilayah berdasarkan curah hujan Kabupaten Sragen Tahun 2023 .....	II-3
Tabel 2.4.	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Sragen dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023 .....	II-4
Tabel 2.5.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2015-2023 .....	II-6
Tabel 2.6.	Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Sragen .....	II-7
Tabel 2.7.	Daya Dukung Daya Tampung Pangan Kabupaten Sragen .....	II-8
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013-2023 .....	II-9
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013-2023 .....	II-10
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 .....	II-10
Tabel 2.11.	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 (jiwa/km <sup>2</sup> ) .....	II-11
Tabel 2.12.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2018-2023 (%) .....	II-12
Tabel 2.13.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sragen dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2018-2023 (%) .....	II-15
Tabel 2.14.	Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Sragen Tahun 2018-2023 .....	II-28
Tabel 2.15.	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 (Persen) .....	II-35
Tabel 2.16.	Nilai dan Status IDM Kabupaten Sragen Tahun 2018-2023 .....	II-44
Tabel 2.17.	Angka Ketergantungan Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 .....	II-45
Tabel 2.18.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Pernah Menggunakan Internet Tahun 2019 -2023 .....	II-46
Tabel 2.19.	Jumlah RTLH dan Intervensi Penanganan RTLH Tahun 2019-2023 .....	II-47
Tabel 2.20.	Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan Sragen .....	II-48
Tabel 2.21.	Total Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kabupaten Sragen Tahun 2023 .....	II-53
Tabel 2.22.	Total Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kabupaten Sragen Tahun 2024 .....	II-54
Tabel 2.23.	Jumlah Investor di Kabupaten Sragen Tahun 2019 – 2023 .....	II-57
Tabel 2.24.	Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Sragen Tahun 2019 – 2023 .....	II-58
Tabel 2.25.	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 .....	II-59
Tabel 2.26.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Penduduk Kabupaten Sragen .....	II-60

Tabel 2.27.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sragen .....	II-60
Tabel 2.28.	Proyeksi Proporsi Rasio Ketergantungan Kabupaten Sragen.....	II-62
Tabel 2.29.	Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Sragen.....	II-62
Tabel 2.30.	Proyeksi Proporsi Penduduk Lansia Kabupaten Sragen ....	II-64
Tabel 2.31.	Proyeksi Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sragen .....	II-65
Tabel 2.32.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sragen .....	II-65
Tabel 2.33.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Sragen .....	II-66
Tabel 2.34.	Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Sragen .....	II-67
Tabel 2.35.	Proyeksi Perhitungan Sarana Kesehatan Berdasarkan Standar WHO .....	II-68
Tabel 2.36.	Standard Luas Ruang Minimum dan Luas Lahan Minimum Sarana Pendidikan .....	II-70
Tabel 2.37.	Standard Luas Ruang Minimum dan Luas Lahan Minimum Sarana Pendidikan SD, SMP dan SMU .....	II-71
Tabel 2.38.	Proyeksi Kebutuhan sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 (rombel) .....	II-71
Tabel 3.1.	Isu Strategis Internasional.....	III-8
Tabel 3.2.	Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	III-9
Tabel 3.3.	Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Sragen .....	III-12
Tabel 3.4.	Permasalahan dan Isu Strategis .....	III-16
Tabel 3.5.	Keselarasan Rekomendasi Isu Strategis KLHS RPJPD dengan Isu Strategis RPJPD .....	III-24
Tabel 4.1	Visi Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 .....	IV-1
Tabel 4.2	Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Sragen dengan RPJPN Tahun 2025-2045 .....	IV-3
Tabel 4.3	Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Sragen dengan RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 .....	IV-3
Tabel 4.4	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 .....	IV-5
Tabel 4.5	Penyelarasan Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Sragen dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.....	IV-5
Tabel 4.6	Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dengan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 .....	IV-8
Tabel 5.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.....	V-5
Tabel 5.2.	Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.....	V-6
Tabel 5.3.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Lebih Baik Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.....	V-8
Tabel 5.4.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Daya Saing Perekonomian Berbasis Potensi Lokal, Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan Dan Pariwisata Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.....	V-13



Tabel 5.5.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya perlindungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.....	V-16
Tabel 5.6.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Layak Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.....	V-18
Tabel 5.7.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Dinamis dan Akuntabel Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.....	V-20
Tabel 5.8.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Ketahanan Bencana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.....	V-22
Tabel 5.9.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 .....	V-24
Tabel 5.10.	Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sragen dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 .....	V-25

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah.....	I-3
Gambar 2.1.	Peta Kabupaten Sragen .....	II-1
Gambar 2.2.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sragen (Ha).....	II-4
Gambar 2.3.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen Tahun 2018-2023.....	II-9
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 .....	II-12
Gambar 2.5.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 .....	II-13
Gambar 2.6.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 .....	II-14
Gambar 2.7.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023.....	II-14
Gambar 2.8.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (%) .....	II-15
Gambar 2.9.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2023 (%) .....	II-16
Gambar 2.10.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 ...	II-16
Gambar 2.11.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 .....	II-17
Gambar 2.12.	Umur Harapan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (Tahun) .....	II-17
Gambar 2.13.	Umur Harapan Hidup Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Tahun) .....	II-18
Gambar 2.14.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (Tahun) .....	II-18
Gambar 2.15.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Tahun) .....	II-19
Gambar 2.16.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (Tahun) ....	II-19
Gambar 2.17.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Tahun) .....	II-20
Gambar 2.18.	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (Ribu Rupiah) ...	II-20
Gambar 2.19.	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Ribu Rupiah) .....	II-21
Gambar 2.20.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2023 (%) .....	II-22
Gambar 2.21.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 (%) .....	II-22

Gambar 2.22.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023.....	II-23
Gambar 2.23.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengurusutamakan kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023.....	II-24
Gambar 2.24.	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (orang) .....	II-24
Gambar 2.25.	Persentase Kelompok Kesenian Yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam 1 Tahun Terakhir .....	II-25
Gambar 2.26.	IPG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 .....	II-26
Gambar 2.27.	IPG Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 .....	II-26
Gambar 2.28.	IDG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 .....	II-27
Gambar 2.29.	IDG Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 .....	II-27
Gambar 2.30.	IKG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 .....	II-28
Gambar 2.31.	IKG Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 .....	II-29
Gambar 2.32.	Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sragen Tahun 2017-2023 (Kasus) .....	II-29
Gambar 2.33.	Prevalensi Stunting pada Balita di Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 berdasarkan SSGI/SKI.....	II-30
Gambar 2.34.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Treatment Coverage). Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 (%) .....	II-31
Gambar 2.35.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) Kabupaten Sragen Tahun 2018-2023 (%) ....	II-31
Gambar 2.36.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Sragen Tahun 2017-2023 (%) .....	II-32
Gambar 2.37.	PDRB Kabupaten Sragen Menurut Lapangan Usaha ADHB & ADHK Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah) .....	II-33
Gambar 2.38.	PDRB Perkapita Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 ....	II-34
Gambar 2.39.	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023.....	II-36
Gambar 2.40.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%) .....	II-37
Gambar 2.41.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) .....	II-37
Gambar 2.42.	<i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD .....	II-38
Gambar 2.43.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB) Tahun 2013-2023.....	II-39
Gambar 2.44.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%).....	II-40
Gambar 2.45.	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Sragen per PDRB (%) Tahun 2013-2023.....	II-40
Gambar 2.46.	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Sragen per PDRB (%) Tahun 2013-2023.....	II-41
Gambar 2.47.	Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 (%) .....	II-42
Gambar 2.48.	TPAK Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (%) .....	II-43



Gambar 2.49.	TPAK Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (%) .....	II-44
Gambar 2.50.	TPAK Perempuan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 (%).....	II-44
Gambar 2.51.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%).....	II-45
Gambar 2.52.	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%) .....	II-46
Gambar 2.53.	Persentase Jalan Mantap Tahun 2013-2023 .....	II-48
Gambar 2.54.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023.....	II-48
Gambar 2.55.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dan Akses Air Minum Aman di Kabupaten Sragen Tahun 2021-2023.....	II-51
Gambar 2.56.	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2019-2023 (%).....	II-53
Gambar 2.57.	Penurunan Emisi GRK (TonCO <sub>2</sub> eq) .....	II-55
Gambar 2.58.	Piramida Penduduk Kabupaten Sragen Tahun Berdasarkan Proyeksi BPS .....	II-61
Gambar 3.1.	Megatrend Global 2045 .....	III-9
Gambar 5.1.	Tahapan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045.....	V-1



# BAB I

# PENDAHULUAN



Alun-alun Sragen

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD memiliki kedudukan dan fungsi strategis memberikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun. RPJPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap 5 (lima) tahun kepemimpinan Kepala Daerah selama periode 20 tahun mendatang. Dengan adanya dokumen RPJPD, dokumen RPJMD dapat dijaga kesinambungannya dalam 20 tahun mendatang, sehingga visi jangka panjang daerah dapat diwujudkan.

Pada tahun 2025 dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang semua kabupaten/kota di Indonesia sudah harus berakhir. Pemerintah mengamanatkan kepada semua Pemerintah Daerah untuk mulai melaksanakan penyusunan RPJPD periode yang baru yaitu RPJPD Tahun 2025 – 2045 pada tahun 2023.

Penyusunan RPJPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top down-bottom up*, holistik-tematik, integratif, serta pendekatan spasial. Pendekatan teknokratik dilaksanakan melalui penyiapan konsep dokumen Rancangan Awal RPJPD berdasarkan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya, dan kajian-kajian oleh Pemerintah Daerah. Pendekatan partisipatif dan *top down-bottom up* melalui penjangkaran aspirasi masyarakat berupa masukan dan saran berdasarkan kuesioner yang telah disusun secara teknokratik, serta melalui media Konsultasi Publik. Pendekatan politis melalui pembahasan dan kesepakatan Pemerintah Daerah bersama DPRD terkait substansi secara menyeluruh dalam tema-tema besar, mendalam dan meliputi seluruh wilayah daerah (holistik-tematik, integratif, spasial).

Penyusunan RPJPD dilaksanakan melalui tahapan: persiapan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD; konsultasi publik; kesepakatan Ranwal RPJPD dengan DPRD; konsultasi ke Pemerintah Provinsi; penyusunan Rancangan RPJPD; musyawarah perencanaan pembangunan daerah; penyusunan rancangan akhir RPJPD; evaluasi Gubernur dan Penetapan Raperda RPJPD menjadi Perda. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan penyusunan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045, antara lain:

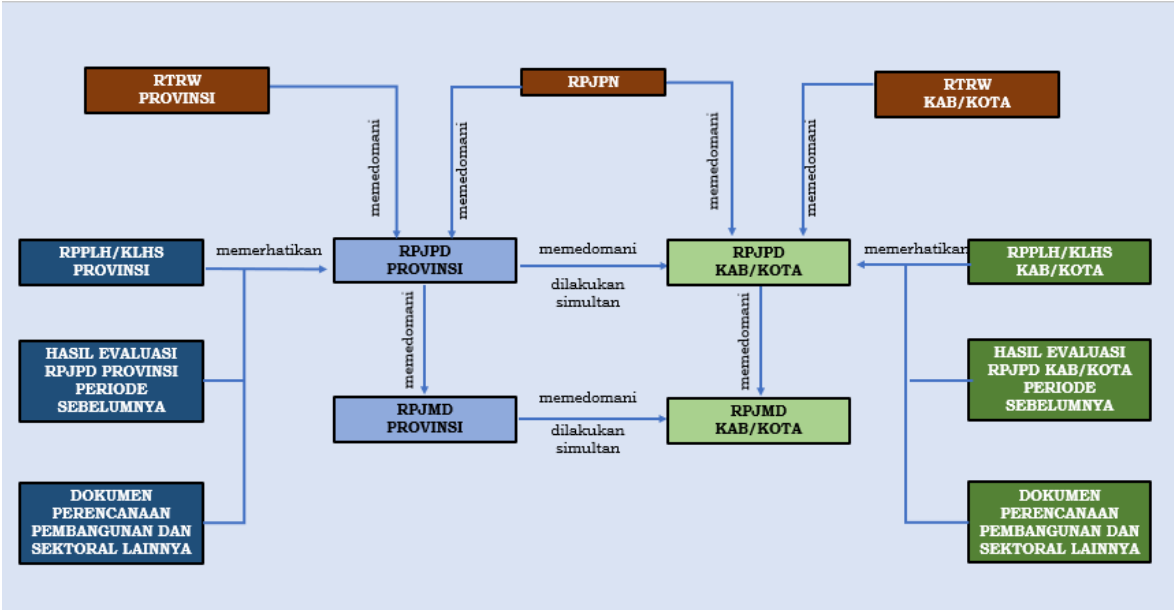
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 wajib memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional dan daerah, antara lain: Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045, Ranwal RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045, RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2031, hasil KLHS dan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025.

Kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sragen diupayakan sejalan dan bersinergi dengan arahan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat sebagai satu kesatuan dan keterpaduan pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

1.3.1. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJPN

Dokumen RPJPD Kabupaten Sragen disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN Tahun 2025 - 2045. Hal ini dimaksudkan supaya pembangunan daerah Kabupaten Sragen selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan pendekatan keterpaduan dan integrasi perencanaan pembangunan nasional dengan daerah.

### 1.3.2. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Sragen merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dokumen RPJPD Kabupaten Sragen berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045. Dengan demikian akan terwujud keterpaduan dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah. Secara sinergis daerah turut serta menyelesaikan isu strategis dalam pembangunan Jawa Tengah.

### 1.3.3. Hubungan Antara RPJPD dengan dokumen RTRW

Pembangunan jangka panjang daerah wajib memperhatikan dokumen rencana tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, terutama tentang struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis dan indikasi program.

### 1.3.4. Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Sektorial Lainnya

Penyusunan RPJPD juga memperhatikan dokumen sektoral yang telah diterbitkan yaitu: Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Sragen; Rencana Pengembangan Industri Kabupaten; *Grand Design* Kependudukan; Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM); serta Rencana Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

### 1.3.5. Hubungan dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJPD memperhatikan dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 agar isu-isu strategis daerah terutama yang berkaitan dengan lingkungan pada dokumen KLHS dapat terintegrasi dalam dokumen RPJPD.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen RPJPD dilengkapi dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan dokumen KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dokumen RPJPD.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah merumuskan cita-cita pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Sragen.



Tujuan penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 adalah:

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun yg dituangkan dalam RPJMD.
3. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

### 1.5. Sistematika Dokumen RPJPD

Sistematika RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat: latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

#### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini memuat: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

#### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan permasalahan regional dan nasional untuk merumuskan isu strategis pembangunan jangka panjang dengan memperhatikan tantangan perubahan internasional, regional yang mempengaruhi perubahan dan dinamika di Kabupaten Sragen.

#### **Bab IV Visi dan Misi Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah dengan berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan tercapai selama pada akhir pembangunan daerah.

#### **Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok**

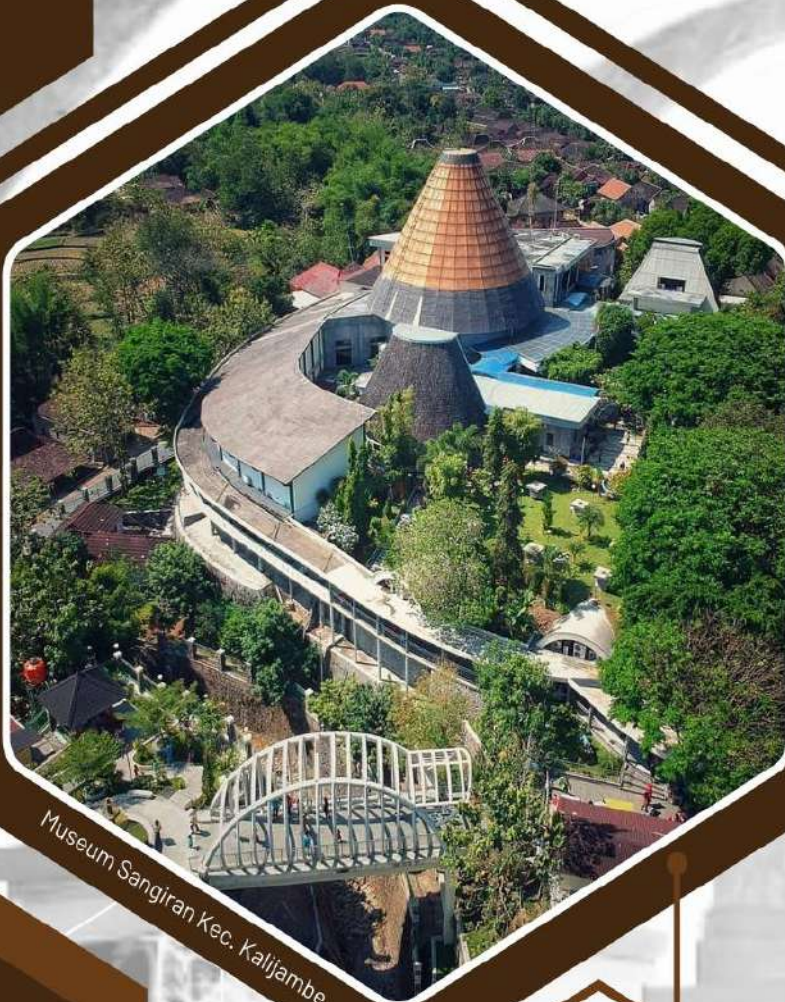
Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang, sasaran pokok dan indikator beserta target setiap periode perencanaan jangka menengah daerah dan indikator wajib pembangunan jangka panjang daerah.

#### **Bab VI Penutup**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 dan transisi dalam pelaksanaannya.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Museum Sangiran Kec. Kalijambe





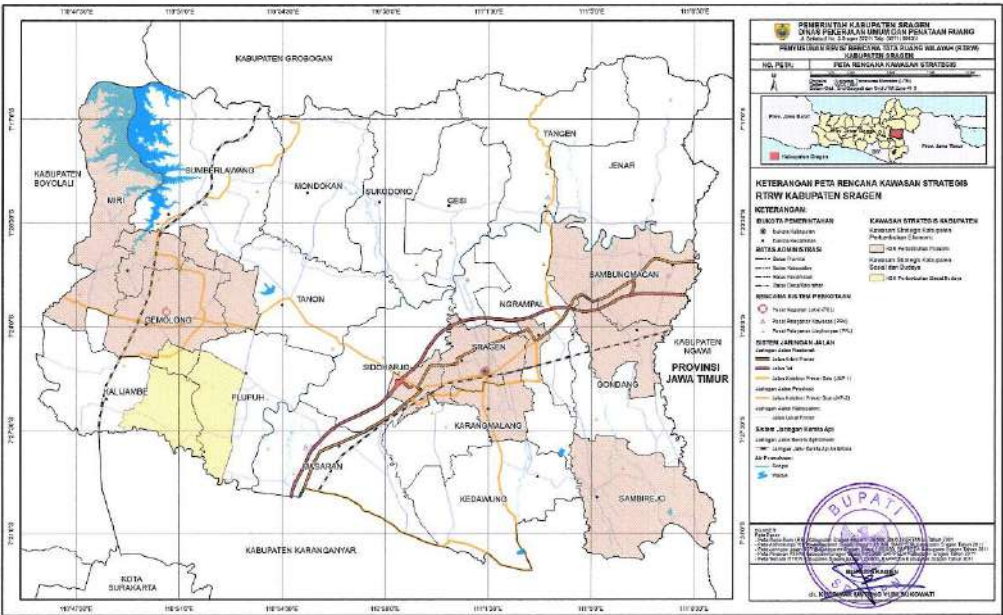
BAB II  
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, dengan batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan; di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar; di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.



Sumber Data: Dokumen RTRW tahun 2020  
Gambar 2.1.  
Peta Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 994,57 km<sup>2</sup>, secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (196 desa, 12 kelurahan, dan 5.480 RT). Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sumberlawang (75,16 km<sup>2</sup>) dan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Sragen (27,27 km<sup>2</sup>). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.  
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan/Desa  
Kabupaten Sragen Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Luas Wilayah	
			Km <sup>2</sup>	% terhadap luas Kabupaten Sragen
1	Kalijambe	14	48,47	4,87
2	Plupuh	16	50,41	5,07
3	Masaran	13	46,84	4,71
4	Kedawung	10	53,06	5,33
5	Sambirejo	9	45,82	4,61
6	Gondang	9	46,83	4,71
7	Sambungmacan	9	43,81	4,40
8	Ngrampal	8	39,84	4,01





No	Kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Luas Wilayah	
			Km <sup>2</sup>	% terhadap luas Kabupaten Sragen
9	Karangmalang	10	46,01	4,63
10	Sragen	8	27,64	2,78
11	Sidoharjo	12	49,03	4,93
12	Tanon	16	52,69	5,30
13	Gemolong	14	39,91	4,01
14	Miri	10	56,86	5,72
15	Sumberlawang	11	79,43	7,99
16	Mondokan	9	50,73	5,10
17	Sukodono	9	47,48	4,77
18	Gesi	7	40,81	4,10
19	Tangen	7	56,92	5,72
20	Jenar	7	71,98	7,24
Jumlah		208	994,57	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Sragen 2024

2. Letak Astronomis dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Sragen terletak pada 110°45’ – 111°10’ Bujur Timur dan 7°15 – 7°30’ Lintang Selatan. Sebagian besar Kabupaten Sragen merupakan kawasan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 109 m di atas permukaan laut (dpl).

3. Topografi

Topografi Kabupaten Sragen dapat dipilah ke dalam tiga kelompok yaitu: 1) daerah dataran rendah, berada pada ketinggian maksimal 93 mdpl. dengan kemiringan lereng antara 0-8%, meliputi 7 kecamatan yaitu Kecamatan: Masaran, Karangmalang, Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, Gondang dan Sambungmacan di bagian tengah; 2) daerah perbukitan, berada pada ketinggian 97-128 mdpl. dengan kemiringan lereng 8-15% meliputi 11 kecamatan yaitu Kecamatan: Kalijambe, Plupuh, Gemolong, Miri, Tanon, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen dan Jenar; 3) daerah kaki Gunung Lawu pada ketinggian 116-190 mdpl dengan rata-rata kelerengan >15%, meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kedawung dan Sambirejo.

Tabel 2.2.  
Tinggi Wilayah dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten  
Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota (Km)
1	Kalijambe	123	31,4
2	Plupuh	141	18,8
3	Masaran	93	11,1
4	Kedawung	116	7,7
5	Sambirejo	190	12,4
6	Gondang	93	13,8
7	Sambungmacan	85	11,1
8	Ngrampal	84	4,4
9	Karangmalang	86	2,7
10	S r a g e n	86	1,7
11	Sidoarjo	86	4,3
12	Tanon	97	14,3
13	Gemolong	128	25,9
14	Miri	115	29,3
15	Sumberlawang	126	23,7

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota (Km)
16	Mondokan	110	20,3
17	Sukodono	86	16,8
18	Gesi	126	13,7
19	Tangan	96	13,7
20	Jenar	118	17,5
Rata-rata		109	

Sumber Data : BPS Kabupaten Sragen 2024

4. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Sragen adalah iklim tropis, yang terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sragen memiliki curah hujan yang cenderung rendah hingga menengah.. Secara rinci curah hujan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

Luas Wilayah berdasarkan curah hujan Kabupaten Sragen Tahun 2023

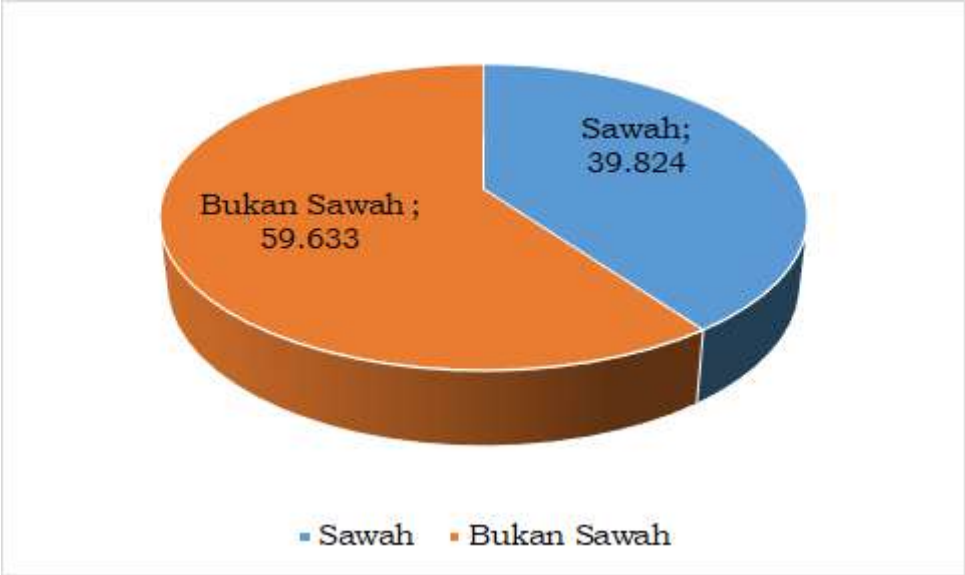
Kecamatan	Stasiun pengamat	Curah Hujan (mm/hari)		Hari Hujan (mm/hari)	
		Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
Kalijambe	Kalimacan	949	52	766	40
Plupuh	Bapang	923	53	803	48
Masaran	Masaran	793	32	732	27
	Kedung Gatot	826	37	569	35
	Sidodadi	925	45	744	39
Kedawung	Gebang	1.464	46	1.117	40
	Kedawung	724	52	618	50
	Batu Jamus	-	-	-	-
Sambirejo	Purworejo	687	39	583	33
	Sambirejo	753	51	846	56
	Gebyar	721	43	670	43
Gondang	Kedung Banteng	804	47	712	41
SambungMacan	Kebonromo	-	-	-	-
Ngrampal	Kenatan	1.442	52	1.479	48
	Ngarum	-	-	-	-
Karangmalang	Gembong	897	44	481	43
Sragen	Mojo	726	52	1.479	48
Sidoharjo	Singopadu	-	-	-	-
Tanon	Ketro	988	47	994	44
Gemolong	Dadapan	1.072	38	1.018	41
Miri	Kedung kancil	1.011	38	1.018	41
Sumberlawang	-	-	-	-	-
Mondokan	-	-	-	-	-
Sukodono	-	-	-	-	-
Gesi	-	-	-	-	-
Tangen	Tangen	756	56	741	54
Jenar	-	-	-	-	-
Rata-rata		914,50	46,17	800,00	42,89

Sumber Data : BPS Kabupaten Sragen 2024



5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Sragen Sebagian besar untuk sawah dan perkebunan. Tahun 2023 luas sawah 39.824 Ha (40,04%) terdiri dari sawah irigasi seluas 25.178 Ha, sawah tadah hujan seluas 14.539 Ha dan lainnya 107 Ha. Luas wilayah bukan sawah 59.633 Ha (59,96%) berupa perkebunan 13.165,74 Ha, perkebunan rakyat 13.530,68 Ha, hutan rakyat 5.010,00 Ha, dan hutan negara 5.423,51 Ha. Luas sawah pada tahun 2023 turun 100 Ha dibanding tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi baik pada sawah irigasi maupun sawah tadah hujan.



Sumber Data : BPS Kabupaten Sragen 2024  
Gambar 2.2.  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sragen (Ha)

Di Kabupaten Sragen terdapat kawasan lindung yaitu Kawasan Hutan Gunung Tunggangan yang pertama kali disebut sebagai suaka margasatwa berdasarkan Surat Persetujuan KKPH Surakarta No. 4603/UM/V/6/SK tanggal 2 Agustus 1961 dan diperkuat dengan SK Penunjukan Menteri Kehutanan No. SK. 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004. Secara administrasi wilayah, kawasan seluas 103,9 Ha tersebut berbatasan dengan wilayah 3 desa di Kabupaten Sragen, yaitu Desa Sambu, Desa Jambayan dan Desa Jetis yang berada di dalam wilayah Kecamatan Sambirejo serta 1 (satu) desa di wilayah Kabupaten Karanganyar, yaitu Desa Menjing yang masuk dalam wilayah Kecamatan Jenawi. Topografi kawasan ini bergelombang dan berbatu dengan ketinggian 400-600 m diatas permukaan laut, dengan kelembaban rata-rata 60% dan curah hujan rata-rata 2.756 mm/tahun.

Luas panen padi di Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebesar 108.359,80 Ha, dengan produksi sebesar 641.060,25 ton dan produktivitas sebesar 59,16 kuintal/hektar. Luas panen dan produksi padi Kabupaten Sragen Tahun 2023 merupakan yang terbesar dibandingkan Kabupaten/Kota sekitar. Namun Produktivitasnya merupakan yang terbesar keempat.

Tabel 2.4.  
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Sragen dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)
1	Boyolali	49.960,83	278.957,96	55,84
2	Klaten	64.734,76	355.717,10	54,95

No	Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)
3	Sukoharjo	48.938,04	320.221,12	65,43
4	Wonogiri	66.781,58	376.817,05	56,43
5	Karanganyar	42.063,40	251.816,48	59,87
6	Sragen	108.359,80	641.060,25	59,16
7	Kota Surakarta	26,04	160,90	61,79
	Jawa Tengah	1.640.297,54	9.061.714,85	55,24

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

6. Potensi Bencana Alam

Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun nonmateri. Kawasan rawan bencana berdasarkan RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 yaitu sebagai berikut :

- a. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Masaran, Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Sragen, Kecamatan Plupuh, Kecamatan Tanon, Kecamatan Gesi, Kecamatan Tangen, Kecamatan Jenar, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sambungmacan dan Kecamatan Ngrampal.
- b. Kawasan rawan gerakan tanah meliputi kawasan nendatan disertai retakan dengan luas sekitar 7 (tujuh) hektar berada di Desa Gading Kecamatan Tanon dan kawasan rawan longsor dengan luas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar berada di Kecamatan Sambirejo.
- c. Kawasan rawan kekeringan meliputi Kecamatan Tangen, Kecamatan Gesi, Kecamatan Jenar, Kecamatan Mondokan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Miri, Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Sambirejo.
- d. Kawasan rawan angin topan meliputi Kecamatan Sambungmacan, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jenar.

Bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Sragen berdasarkan data BPS antara lain banjir dan tanah longsor. Banjir pernah terjadi di Kecamatan Kalijambe, Plupuh, Masaran, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Ngrampal, Karangmalang, Sragen, Sidoharjo, Tanon, Miri dan Sumberlawang. Sementara tanah longsor pernah terjadi di Kecamatan Kalijambe, Plupuh, Masaran, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sragen dan Tanon.

7. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan dokumen RTRW Kabupaten Sragen memiliki potensi bencana. Potensi bencana yang ada adalah banjir, kekeringan, puting beliung dan gempa. Penanganan bencana yang baik dapat dilihat dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI). IRB biasanya terdiri dari beberapa komponen atau sub indeks yang mencakup berbagai aspek risiko bencana, seperti kerentanan masyarakat, kapasitas adaptasi. Indeks risiko bencana Kabupaten Sragen dari tahun 2015 sebesar 142 dan tetap 142 sampai 2020, mulai tahun 2021 IRB turun menjadi 133,75 pada tahun 2021, kembali menurun menjadi 126,18 tahun 2022 dan kembali turun menjadi 114,91 pada tahun 2023.





Tabel 2.5.  
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2015-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	133,75	126,18	114,91

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2024

8. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas suatu daerah dalam menghadapi bahaya atau ancaman bencana serta kerentanannya terhadap bencana tersebut. IKD mencakup tiga komponen utama:

- a. **Indeks Kapasitas:** Mengukur kemampuan daerah dalam memitigasi risiko bencana melalui infrastruktur, perencanaan, dan kesiapsiagaan.
- b. **Indeks Kerentanan:** Mengukur tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap dampak bencana, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- c. **Indeks Ancaman:** Mengukur tingkat ancaman bencana yang mungkin terjadi di daerah tersebut, seperti frekuensi dan intensitas bencana alam.

IKD adalah bagian dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang merupakan alat untuk menilai dan memetakan risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia. Data dan hasil dari IKD digunakan oleh pemerintah daerah dan nasional untuk mengembangkan strategi mitigasi bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana. Capaian IKD Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebesar 0,52.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH di Kabupaten Sragen menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 55,64 di tahun 2020 naik menjadi 60,46 pada tahun 2021 meningkat menjadi 63,17 di tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 64,90 pada tahun 2023 menandakan perubahan positif yang cukup besar dalam kualitas lingkungan. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan yang cukup signifikan melalui upaya konkret dalam memperbaiki aspek-aspek lingkungan, dan kebijakan yang mengarah pada perlindungan lingkungan yang lebih baik, penerapan teknologi hijau, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan.

Pengukuran IKLH akan menggunakan metode baru sesuai dengan surat Sekditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Jika menggunakan metode baru maka capaian IKLH Kabupaten Sragen tahun 2023 sebesar 64,90 dikonversi menjadi sebesar 72,29.

10. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Daya Tampung Air

Perhitungan daya dukung dan daya tampung air menggunakan pendekatan campuran digunakan untuk menghitung daya dukung dan

daya tampung air, dengan parameter pertama menggunakan pendekatan Stock dengan Jasa Lingkungan yang bersifat kualitatif dan pendekatan *supply and demand* berbasis kebutuhan dan ketersediaan secara kuantitatif. Berdasarkan Analisa yang telah dilakukan, diketahui bahwa 13,74% wilayah Kabupaten Sragen masih dalam status belum terlampaui, sedangkan 86,26 % dalam status daya dukung daya tampung air terlampaui. Berikut adalah rincian luas wilayah Kecamatan berdasarkan status daya dukung daya tampung air :

Tabel 2.6.

Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Sragen

Kecamatan	Klasifikasi Daya Dukung daya Tampung Air		Jumlah
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Gemolong	440,74	3.612,05	4.052,78
Gesi	246,11	3.823,05	4.069,16
Gondang	488,41	4.226,91	4.715,33
Jenar	885,76	6.321,21	7.206,98
Kalijambe	289,21	4.476,73	4.765,94
Karangmalang	226,87	4.454,14	4.681,01
Kedawung	470,34	4.730,94	5.201,29
Masaran	575,27	4.101,64	4.676,91
Miri	1.434,60	4.186,01	5.620,61
Mondokan	37,20	5.033,48	5.070,68
Ngrampal	238,96	3.737,02	3.975,98
Plupuh	100,98	4.960,88	5.061,87
Sambirejo	1.805,00	2.742,94	4.547,94
Sambung Macan	927,39	3.437,94	4.365,33
Sidoharjo	767,50	4.020,21	4.787,70
Sragen	801,85	2.089,37	2.891,23
Sukodono	280,52	4.454,56	4.735,08
Sumberlawang	1.402,50	6.571,55	7.974,05
Tangen	1.645,06	4.052,14	5.697,20
Tanon	589,76	4.691,23	5.280,99
<b>Total Luas (ha)</b>	<b>13.654,04</b>	<b>85.724,00</b>	<b>99.378,04</b>
<b>Persentase (%)</b>	<b>13,74</b>	<b>86,26</b>	

Sumber: D3TLH Kabupaten Sragen, 2023

Kecamatan dengan status daya dukung daya tampung air belum terlampaui terbesar adalah Kecamatan Sambirejo yaitu sebesar 39,69% atau sebesar 1.805 ha wilayahnya masih memiliki daya dukung daya tampung air yang memadai untuk mendukung kehidupan di atasnya. Selain itu juga ada kecamatan Tangen dengan persentase wilayahnya sebesar 28,87% atau seluas 1645,06 wilayahnya masih memiliki daya dukung daya tampung air yang memadai untuk mendukung kehidupan di atasnya. Sedangkan untuk Kecamatan yang memiliki prosentase wilayah dengan status daya dukung daya tampung air yang telah terlampaui terbesar adalah Kecamatan Mondokan, dimana 99,27% wilayahnya dalam status daya dukung daya tampung air terlampaui. Selain itu ada kecamatan Plupuh dengan 98% wilayahnya dalam status daya dukung daya tampung air terlampaui.

**b. Daya Dukung Daya Tampung Pangan**

Berdasarkan perhitungan daya dukung daya tampung pangan di Kabupaten Sragen, diketahui bahwa 54,80% atau sebesar 54.456,72 ha wilayah Kabupaten Sragen dalam kondisi daya dukung daya tampung pangan surplus. Sedangkan 34,11% atau sebesar 33.899,80 ha wilayah Kabupaten Sragen dalam kondisi daya dukung daya tampung pangan defisit, dan 11,09% atau 11.021,52 ha wilayah Kabupaten Sragen dalam



kondisi daya dukung daya tampung pangan seimbang. Berikut merupakan tabel rincian luas wilayah daya dukung daya tampung pangan di Kabupaten Sragen tahun 2023:

Tabel 2.7.  
Daya Dukung Daya Tampung Pangan Kabupaten Sragen

Kecamatan	Klasifikasi Daya Dukung daya Tampung Pangan			Jumlah
	Defisit	Seimbang	Surplus	
Gemolong	1.648,44		2.404,34	4.052,78
Gesi	116,17	327,69	3.625,29	4.069,16
Gondang	2.340,34	83,39	2.291,60	4.715,33
Jenar	1.384,09	4.204,34	1.618,55	7.206,98
Kalijambe	2.034,79	29,98	2.701,16	4.765,94
Karangmalang	2.520,16		2.160,85	4.681,01
Kedawung	2.134,46	681,75	2.385,08	5.201,29
Masaran	2.577,91	6,11	2.092,89	4.676,91
Miri	1.401,47	1.389,31	2.829,83	5.620,61
Mondokan	264,98	5,53	4.800,17	5.070,68
Ngrampal	1.766,81	72,05	2.137,12	3.975,98
Plupuh	2.267,54	44,00	2.750,32	5.061,87
Sambirejo	1.272,85	823,18	2.451,90	4.547,94
Sambung Macan	2.391,22	145,00	1.829,10	4.365,33
Sidoharjo	2.386,65	5,01	2.396,04	4.787,70
Sragen	1.848,23	10,51	1.032,48	2.891,23
Sukodono	1.039,54	264,60	3.430,94	4.735,08
Sumberlawang	1.116,01	1.745,30	5.112,75	7.974,05
Tangen	1.540,75	1.094,94	3.061,50	5.697,20
Tanon	1.847,40	88,80	3.344,79	5.280,99
<b>Total</b>	<b>33.899,80</b>	<b>11.021,52</b>	<b>54.456,72</b>	<b>99.378,04</b>
<b>Persentase (%)</b>	<b>34,11</b>	<b>11,09</b>	<b>54,79</b>	

Sumber: D3TLH Kabupaten Sragen, 2023

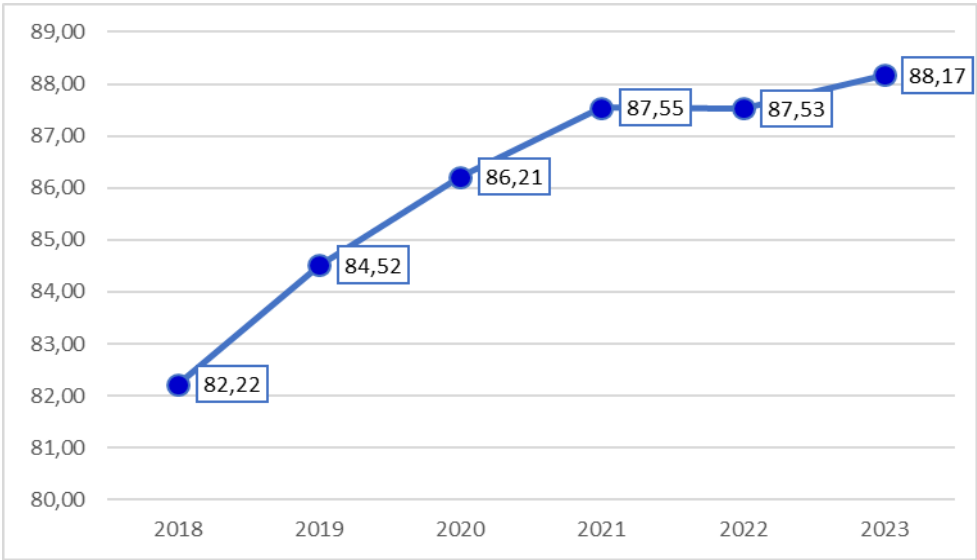
Kecamatan Sragen 63,93% wilayahnya memiliki kondisi daya dukung daya tampung pangan defisit atau memiliki hasil perhitungan kesediaan lahan yang kurang dari lahan yang dibutuhkan untuk hidup layak. Sebaliknya, Kecamatan dengan kondisi wilayah yang memiliki kondisi daya dukung lahan surplus cukup besar adalah Kecamatan Gesi dengan 89,09%, Kecamatan Mondokan dengan 94,67%, Kecamatan Sukodono dengan 72,46%, dan Kecamatan Sumberlawang dengan 64,12%. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki kondisi daya dukung daya tampung pangan seimbang terbesar adalah kecamatan jenar dengan 58% atau seluas 4.204,34 ha wilayahnya memiliki kecukupan kondisi daya dukung pangan.

11. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu

mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Perkembangan **Indeks Ketahanan Pangan** Kabupaten Sragen selama tahun 2018-2023 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar 82,22 menjadi sebesar 88,17 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan jika kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sragen semakin membaik.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Nasional, Tahun 2023

Gambar 2.3.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen Tahun 2018-2023

2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen mengalami peningkatan setiap tahunnya berikut perkembangan penduduk Kabupaten Sragen.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Sragen tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Sragen sebanyak 997.485 jiwa yang terdiri dari 496.948 jiwa laki-laki dan 500.537 jiwa perempuan. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun diikuti dengan *sex ratio* yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 99,29. Angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 99,29 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Sragen.

Tabel 2.8.

Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013-2023

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sexratio
2013	444.003	452.198	896.201	98,19
2014	429.077	446.523	875.600	96,09
2015	430.717	448.310	879.027	96,08
2016	432.178	449.912	882.090	96,06
2017	433.585	451.537	885.122	96,02
2018	434.976	452.913	887.889	96,04
2019	436.180	454.338	890.518	96,00
2020	486.829	486.829	973.658	100,00
2021	490.067	493.574	983.641	99,29
2022	494.252	497.991	992.243	99,25
2023	496.948	500.537	997.485	99,29

Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen Tahun 2024





2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
- Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Sragen didominasi oleh kelompok usia produktif. Usia produktif merupakan usia kerja yang bisa menghasilkan barang dan jasa. Pada rentang usia 15-64 tahun tersebut banyak orang yang menyelesaikan pendidikan formalnya, mencari, membangun karier, membangun sebuah keluarga, aktif terlibat dalam pembangunan komunitas dan sebagainya (McKenzie dkk, 2006). Kelompok usia produktif di Kabupaten Sragen Tahun 2013 sebesar 66,00% meningkat menjadi 68,53% pada tahun 2023.

Tabel 2.9.  
Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Berdasarkan Kelompok Umur  
Tahun 2013-2023

Kelompok Umur (Th)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	72.860	68.460	67.136	65.965	65.309	63.854	63.854	59.555	66.833	66.667	68.531
5-9	79.001	67.939	67.973	67.576	66.474	66.269	66.269	73.827	69.119	68.925	68.054
10-14	88.869	67.466	67.657	67.054	65.714	66.321	66.321	77.863	74.738	74.278	72.192
15-19	96.312	67.397	66.353	65.966	66.223	64.426	64.426	72.860	72.951	72.507	75.372
20-24	72.791	60.712	57.833	58.305	62.214	59.179	59.179	71.499	70.196	69.270	72.542
25-29	66.883	57.045	59.532	59.563	57.099	60.641	60.641	67.263	68.506	68.203	70.097
30-34	67.818	61.311	61.522	60.544	58.254	58.446	58.446	65.366	69.986	69.923	68.499
35-39	67.787	63.451	61.952	61.266	61.796	59.832	59.832	80.210	76.733	77.109	72.866
40-44	61.883	62.888	62.987	62.842	62.251	62.536	62.536	75.582	74.579	74.908	76.656
45-49	50.184	62.696	62.461	62.503	62.807	62.179	62.179	67.300	68.454	69.395	71.228
50-54	39.736	60.784	62.337	63.026	63.117	64.124	64.124	65.856	64.922	65.827	65.462
55-59	34.361	51.840	53.056	54.784	56.766	57.520	57.520	57.614	56.921	58.399	59.600
60-64	33.755	39.389	41.948	43.904	45.319	48.004	48.004	50.867	50.942	52.574	51.251
65-69	27.781	29.582	30.082	31.151	32.995	33.994	33.994	35.781	40.051	41.805	42.826
70-74	20.011	23.401	22.843	23.317	24.805	24.275	24.275	23.443	27.256	29.184	30.001
75 +	16.169	31.239	33.355	34.324	33.979	36.289	36.289	32.065	31.454	33.269	32.308
Jumlah	896.201	875.600	879.027	882.090	885.122	887.889	890.518	976.951	983.641	992.243	997.485

Sumber Data : BPS Kabupaten Sragen 2024

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
- Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Sragen, dengan jumlah penduduk sebanyak 70.276 jiwa pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena Kecamatan Sragen merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan Kabupaten Sragen.

Tabel 2.10.  
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sragen  
Tahun 2013-2023

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kalijambe	47.958	48.421	48.693	48.946	49.197	49.389	49.661	52.619	52.877	49.389	53.353
Plupuh	46.689	42.902	42.984	43.048	43.108	43.156	43.196	50.897	51.508	43.156	52.708
Masaran	66.963	72.029	72.633	73.213	73.795	74.377	74.910	77.591	77.989	74.377	78.734
Kedawung	61.136	58.677	59.001	59.301	59.598	59.902	60.151	65.812	66.335	59.902	67.338
Sambirejo	37.912	35.595	35.662	35.715	35.767	35.803	35.838	40.716	41.060	35.803	41.721
Gondang	44.318	41.950	42.030	42.092	42.152	42.202	42.238	47.085	47.395	42.202	47.982
Sabungmacan	44.723	44.434	44.518	44.584	44.646	44.689	44.738	48.466	48.651	44.689	48.982
Ngrampal	36.715	37.308	37.380	37.434	37.487	37.531	37.563	42.484	42.824	37.531	43.476
Karangmalang	60.068	65.333	66.014	66.672	67.333	68.016	68.612	73.120	73.828	68.016	75.202
Sragen	67.200	68.233	68.555	68.847	69.138	69.406	69.665	69.558	69.444	69.406	70.276
Sidoharjo	52.228	51.240	51.337	51.414	51.487	51.534	51.590	57.768	58.174	51.534	58.945
Tanon	55.512	51.239	51.335	51.412	51.486	51.530	51.590	58.590	59.082	51.530	60.030
Gemolong	49.875	46.303	46.488	46.655	46.818	46.960	47.112	51.981	52.368	46.960	53.107
Miri	33.610	32.377	32.439	32.486	32.532	32.566	32.598	36.597	36.863	32.566	37.371
Sumberlawang	46.544	44.047	44.131	44.197	44.259	44.295	44.349	50.032	50.420	44.295	51.163
Mondokan	34.832	33.749	33.815	33.863	33.913	33.940	33.981	38.981	39.347	33.940	40.056
Sukodono	32.762	29.458	29.514	29.559	29.599	29.631	29.660	33.370	33.620	29.631	34.098
Gesi	22.062	19.789	19.828	19.856	19.885	19.914	19.934	22.760	22.964	19.914	23.359
Tangen	27.658	25.897	25.948	25.985	26.022	26.057	26.075	29.117	29.314	26.057	29.687

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jenar	27.436	26.619	26.722	26.811	26.900	26.991	27.057	29.407	29.578	26.991	29.897
Kabupaten Sragen	896.201	875.600	879.027	882.090	885.122	887.889	890.518	976.951	983.641	992.243	997.485

Sumber Data : BPS Kabupaten Sragen 2024

Kecamatan Sragen merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.543 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk Kabupaten Sragen yang sebesar 1.003 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sragen terkait pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada masyarakat. Selain itu yang perlu diperhatikan yaitu pembentukan pusat perekonomian baru sehingga sebaran penduduk tidak terpusat di Kecamatan Sragen.

Tabel 2.11.

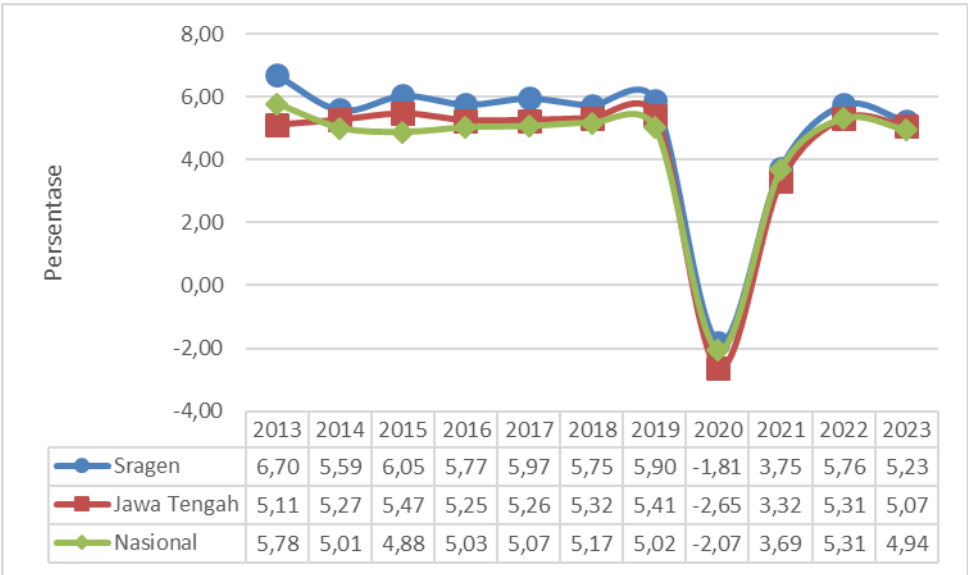
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sragen  
Tahun 2013-2023 (jiwa/km<sup>2</sup>)

Kecamatan	Luas Km2	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kalijambe	48,47	989	999	1.005	1.010	1.015	1.019	1.025	1.086	1.091	1.019	1.101
Plupuh	50,41	926	851	853	854	855	856	857	1.010	1.022	856	1.046
Masaran	46,84	1.430	1.538	1.551	1.563	1.575	1.588	1.599	1.657	1.665	1.588	1.681
Kedawung	53,06	1.152	1.106	1.112	1.118	1.123	1.129	1.134	1.240	1.250	1.129	1.269
Sambirejo	45,82	827	777	778	779	781	781	782	889	896	781	911
Gondang	46,83	946	896	898	899	900	901	902	1.005	1.012	901	1.025
Sambungmacan	43,81	1.021	1.014	1.016	1.018	1.019	1.020	1.021	1.106	1.110	1.020	1.118
Ngrampal	39,84	922	936	938	940	941	942	943	1.066	1.075	942	1.091
Karangmalang	46,01	1.306	1.420	1.435	1.449	1.463	1.478	1.491	1.589	1.605	1.478	1.634
Sragen	27,64	2.431	2.469	2.480	2.491	2.501	2.511	2.520	2.517	2.512	2.511	2.543
Sidoharjo	49,03	1.065	1.045	1.047	1.049	1.050	1.051	1.052	1.178	1.186	1.051	1.202
Tanon	52,69	1.054	972	974	976	977	978	979	1.112	1.121	978	1.139
Gemolong	39,91	1.250	1.160	1.165	1.169	1.173	1.177	1.180	1.302	1.312	1.177	1.331
Miri	56,86	591	569	571	571	572	573	573	644	648	573	657
Sumberlawang	79,43	586	555	556	556	557	558	558	630	635	558	644
Mondokan	50,73	687	665	667	668	668	669	670	768	776	669	790
Sukodono	47,48	690	620	622	623	623	624	625	703	708	624	718
Gesi	40,81	541	485	486	487	487	488	488	558	563	488	572
Tangen	56,92	486	455	456	457	457	458	458	512	515	458	522
Jenar	71,98	381	370	371	372	374	375	376	409	411	375	415
Kabupaten Sragen	994,57	901	880	884	887	890	893	895	982	989	998	1.003

Sumber Data : BPS Kabupaten Sragen 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat  
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Dalam periode 2013-2023 **pertumbuhan ekonomi** Kabupaten Sragen selalu diatas 5%, kecuali tahun 2020 dan 2021. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid 19 sehingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkonstraksi negatif. Pada tahun 2021 terjadi pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic Covid. Setelah masa pemulihan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2022 dan 2023 mulai membaik. Secara umum dalam periode 2013-2023 pertumbuhan ekonomi Kabpaten Sragen lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber Data: BPS Jawa Tengah 2023  
Gambar 2.4.  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2023 dibandingkan dengan kabupaten/kota di Subosukawonosraten berada di urutan kelima.

Tabel 2.12.  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen dan Wilayah Sekitar Tahun 2018-2023 9%)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boyolali	5,72	5,96	-1,24	4,63	6,33	5,63
Klaten	5,47	5,50	-1,18	3,82	5,90	5,70
Sukoharjo	5,79	5,92	-1,70	3,82	5,61	5,06
Wonogiri	5,41	5,14	-1,41	3,35	5,63	4,98
Karanganyar	5,98	5,93	-1,87	3,57	5,87	5,53
Surakarta	5,75	5,78	-1,74	4,01	6,25	5,57
SRAGEN	5,75	5,90	-1,81	3,75	5,76	5,23

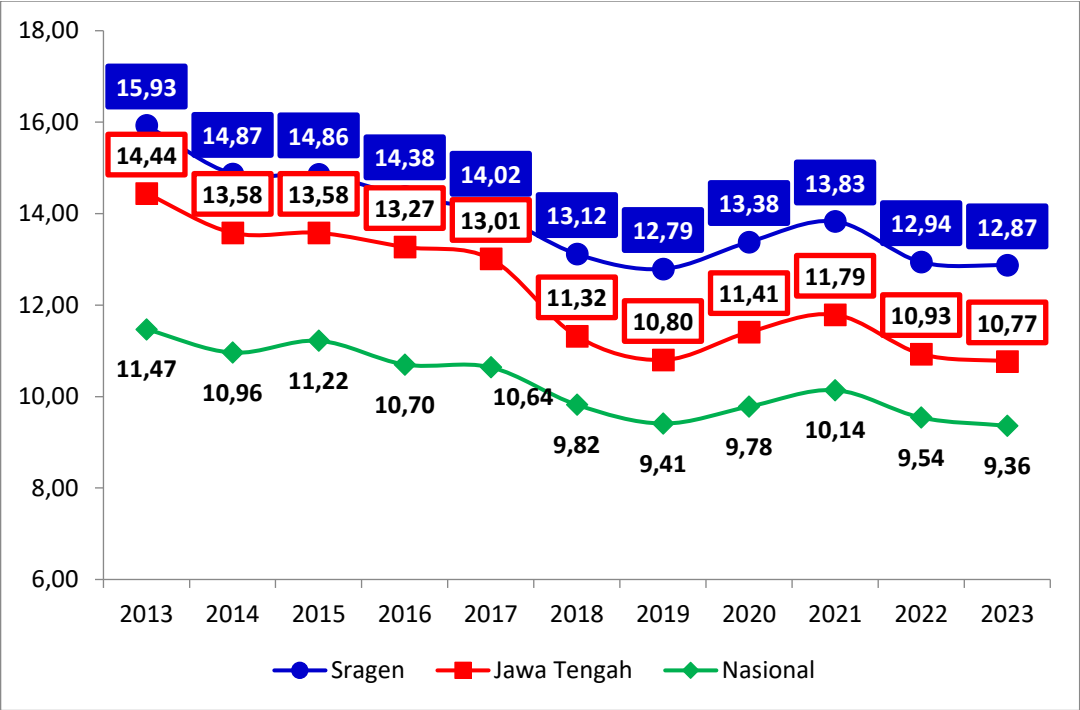
Sumber Data: BPS Jawa Tengah, 2023

Fakir miskin merupakan salah satu dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan data Dinas Sosial jumlah PPKS di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 sebanyak 117.210 orang, tahun 2020 menjadi sebesar 150.094 orang, tahun 2021 meningkat menjadi 171.821 orang, tahun 2022 menurun menjadi sebesar 106.925 orang dan tahun 2023 kembali menurun menjadi sebanyak 90.944 orang.

**Kemiskinan.** Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui strategi pengurangan beban kebutuhan, peningkatan pendapatan, pengurangan kantong-kantong kemiskinan dan pengelolaan data kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2013-2023 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan,

baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2013 sebesar 15,93% menurun menjadi sebesar 12,79% pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 13,38% dan 13,83%, pada tahun 2022 menurun menjadi 12,94%, pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 12,87%.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen sejak tahun 2013-2023 selalu lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen merupakan salah satu daerah prioritas penanganan kemiskinan nasional dan provinsi sebagaimana terlihat pada gambar.



Sumber : BPS kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.5.

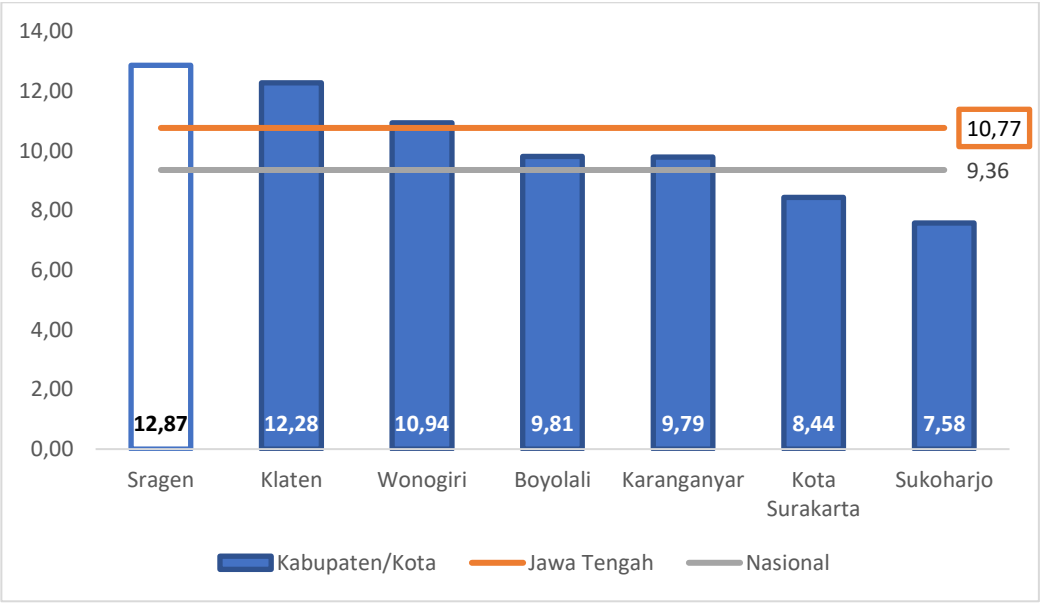
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

Disamping kemiskinan secara makro, pemerintah pusat melalui Inpres nomor 7 Tahun 2022 mengeluarkan kebijakan baru yaitu Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin secara makro. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Target Nasional maupun daerah kemiskinan ekstrem 0% pada Tahun 2024. Kondisi Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sragen Tahun 2021 sebesar 2.92% dan turun menjadi 2.36% pada Tahun 2022, dan turun lagi menjadi 1,55% di Tahun 2023.

Posisi angka kemiskinan Kabupaten Sragen sebesar 12,87% pada tahun 2023 termasuk tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, angka kemiskinan Kabupaten Sragen masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Klaten, Wonogiri, Kabupaten Boyolali,



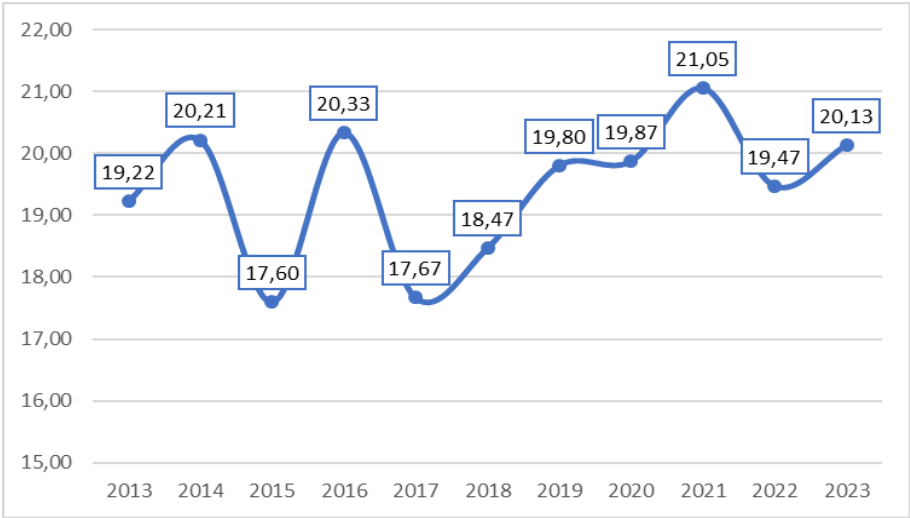
Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.6.  
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

**Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia** adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.



Sumber : BPS kabupaten Sragen Tahun 2024

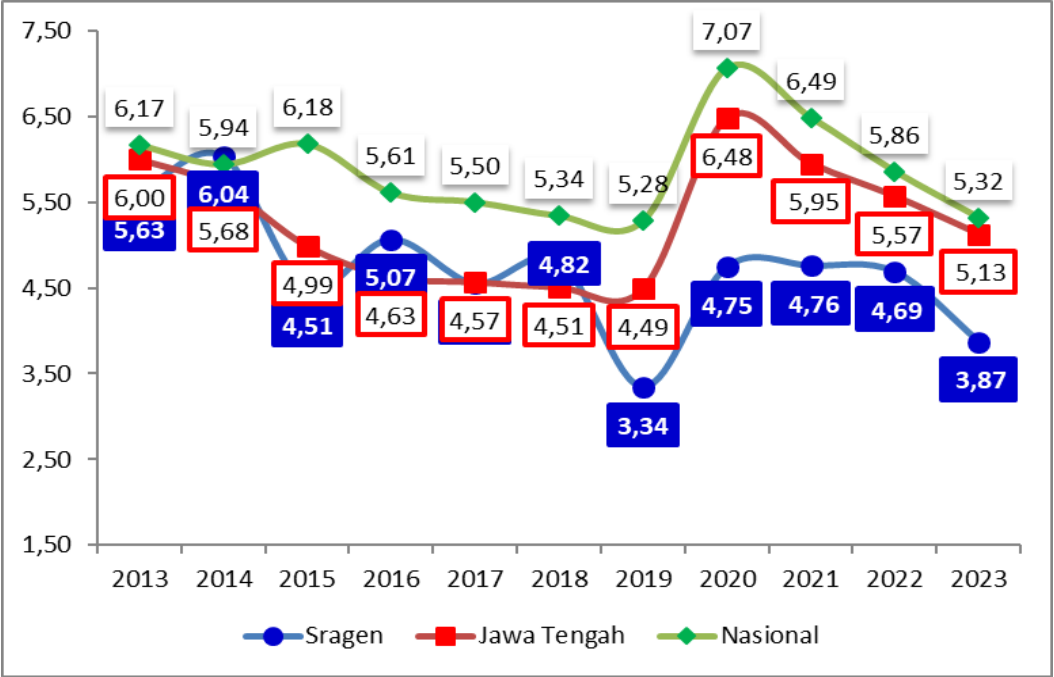
Gambar 2.7.  
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode



2013-2023 TPT cenderung mengalami penurunan dan sejak tahun 2017 selalu berada dibawah 5%. Peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 akibat dari pandemi covid-19 yaitu menjadi sebesar 4,75% dan 4,76% dari tahun 2019 yang sebesar 3,32%.

TPT Kabupaten Sragen jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa tengah dan Nasional, capaian TPT Kabupaten Sragen lebih rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.8.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (%)

Sejak tahun 2018, jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen cenderung terkendali dibawah 5%. Berikut nilai TPT Kabupaten Sragen pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dibandingkan wilayah sekitar.

Tabel 2.13.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sragen dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2018-2023 (%)

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boyolali	2,18	3,09	5,28	5,09	4,92	4,05
Klaten	3,14	3,54	5,46	5,48	4,31	4,20
Sukoharjo	2,72	3,39	6,93	3,32	2,47	3,40
Wonogiri	2,28	2,55	4,27	2,43	1,95	1,92
Karanganyar	2,28	3,12	5,96	5,89	5,70	4,35
Surakarta	4,35	4,16	7,92	7,85	5,83	4,56
SRAGEN	4,83	3,32	4,75	4,76	4,69	3,87

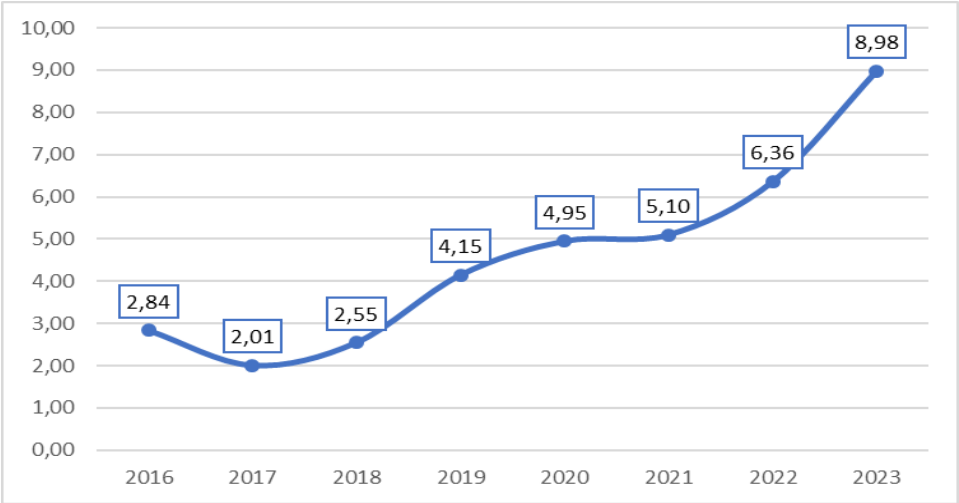
Sumber : BPS kabupaten Sragen Tahun 2024

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sragen terus mengalami peningkatan namun capaian tersebut



masih rendah, pada tahun 2023 baru sebesar 8,98%. Sampai dengan tahun 2023 jumlah kepesertaan jamsostek terdiri dari jumlah pekerja aktif sektor formal (penerima upah ) sebanyak 41.762 orang dan jumlah pekerja aktif sektor informal (bukan penerima upah) sebanyak 9.446 orang.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.9.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Sragen Tahun 2016-2023 (%)

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan empat indikator, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Sragen tahun 2013-2023 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Capaian IPM Kabupaten Sragen tahun 2013 sebesar 69,95 meningkat menjadi 75,10 pada tahun 2023. Capaian IPM Kabupaten Sragen menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun 2013-2023 dan capaian tersebut selalu berada diatas rata- rata capaian Jawa Tengah dan Nasional.

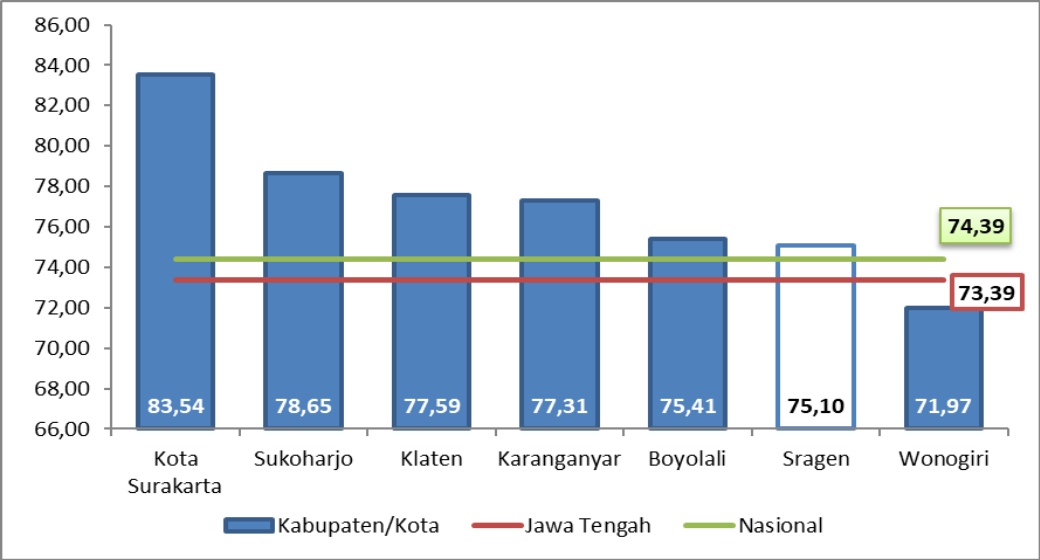


Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.10.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

IPM Kabupaten Sragen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga, capaiannya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Wonogiri dan berada di urutan keenam. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

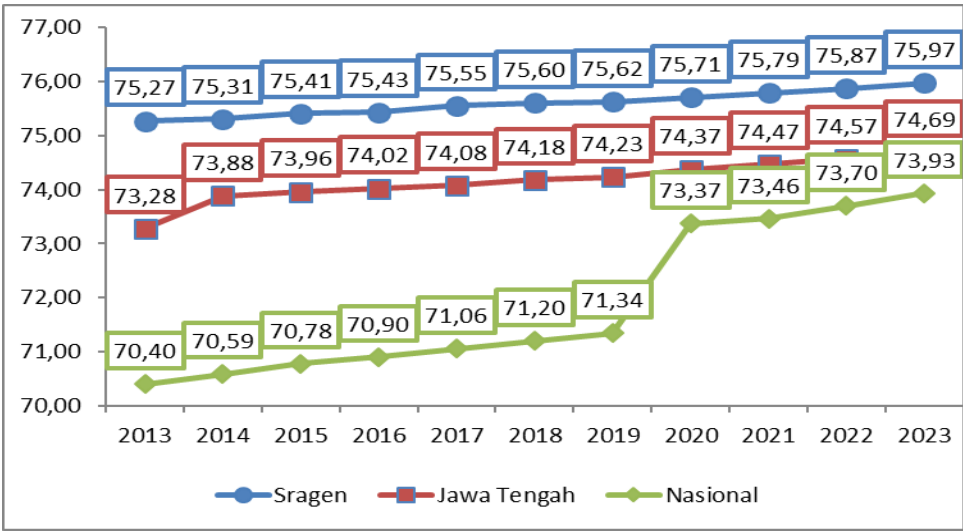
Gambar 2.11.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Sementara itu, berdasarkan komposit pembentuk IPM Kabupaten Sragen meliputi : (1) Umur Harapan Hidup (tahun); (2) harapan lama sekolah (tahun); (3) rata-rata lama sekolah (tahun) dan (4) pengeluaran per kapita (rupiah) dapat diuraikan berikut ini.

a) **Umur Harapan Hidup**

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perkembangan UHH Kabupaten Sragen periode tahun 2013-2023 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 capaian UHH mencapai 75,27 tahun meningkat menjadi 75,97 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode 2013-2023 capaian Kabupaten Sragen lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



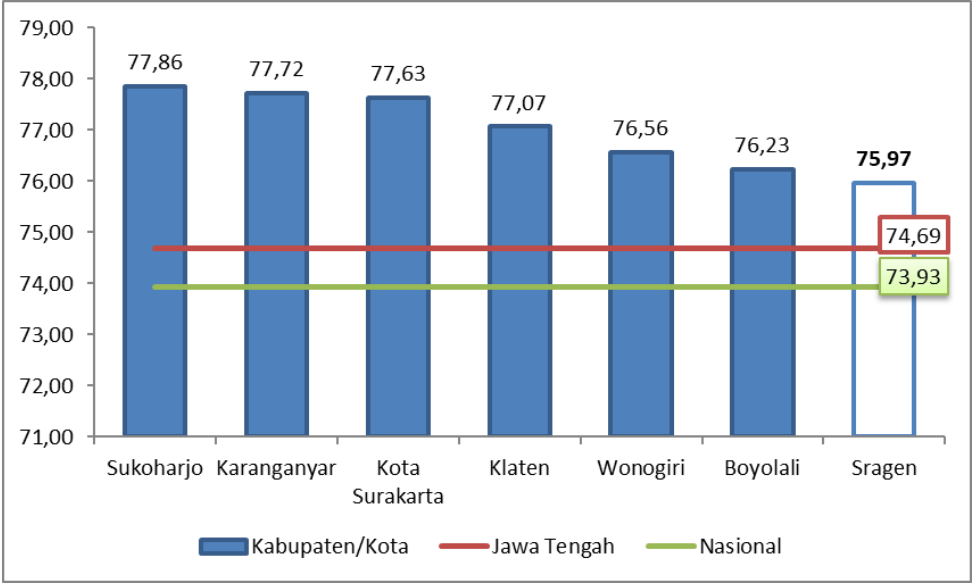
Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.12.

Umur Harapan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (Tahun)



Capaian UHH Kabupaten Sragen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga, capaiannya merupakan yang terendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut



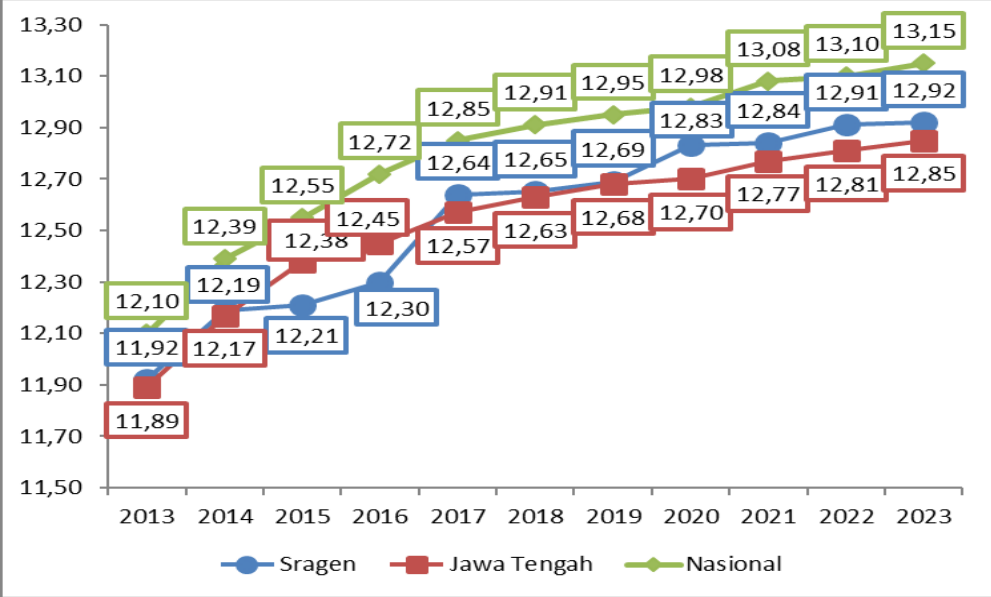
Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.13.

Umur Harapan Hidup Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Tahun)

**b) Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan HLS Kabupaten Sragen selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan, tahun 2013 sebesar 11,92 tahun menjadi 12,92 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka capaian HLS Kabupaten Sragen berada diatas Provinsi Jawa Tengah tetapi berada dibawah capaian Nasional.

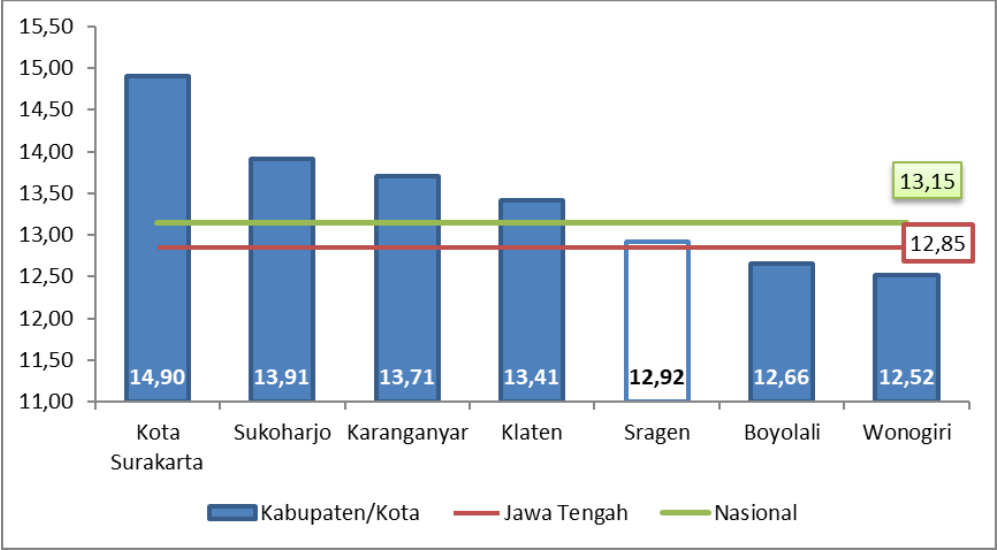


Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.14.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (Tahun)

Capaian HLS Kabupaten Sragen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada pada urutan kelima, diatas Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Wonogiri tetapi berada dibawah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Klaten



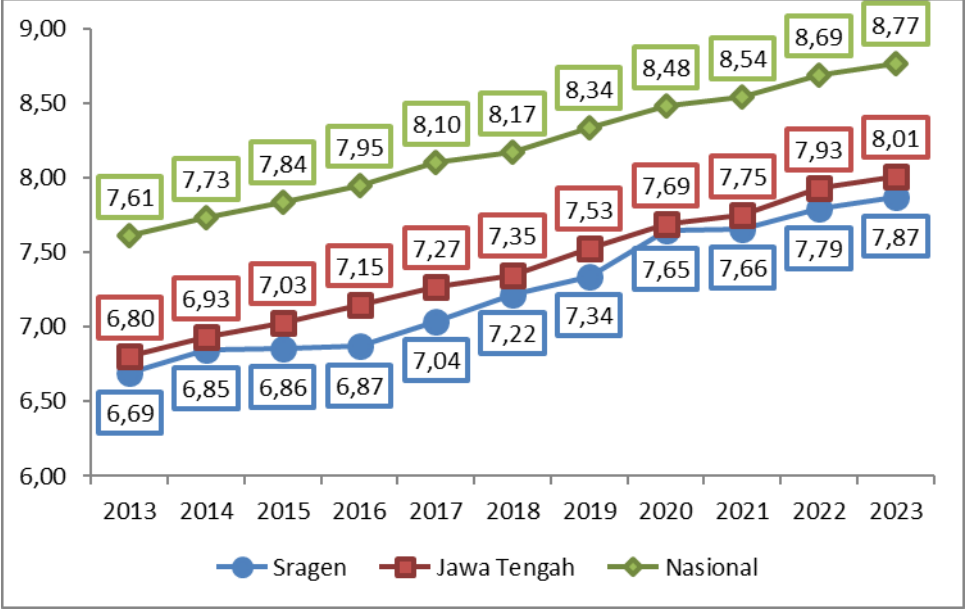
Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.15.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Tahun)

c) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS Kabupaten Sragen dalam periode 2013-2023 selalu mengalami peningkatan. Capaian tahun 2013 sebesar 6,69 tahun meningkat menjadi 7,87 tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka capaian RLS Kabupaten Sragen masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

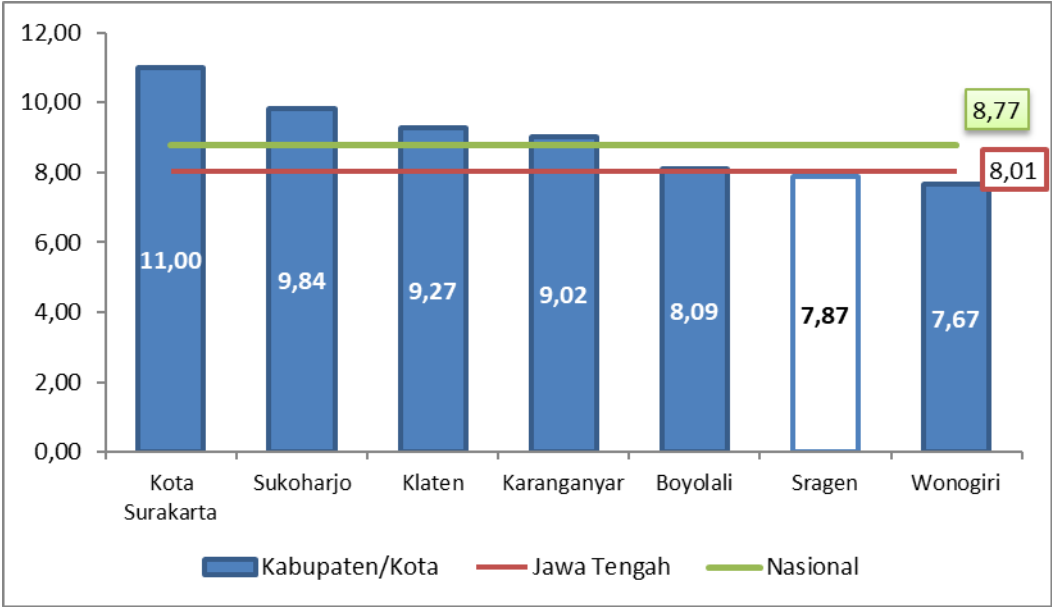
Gambar 2.16.

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (Tahun)





Capaian RLS Kabupaten Sragen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada pada urutan keenam, diatas Kabupaten Boyolali Wonogiri tetapi berada dibawah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.



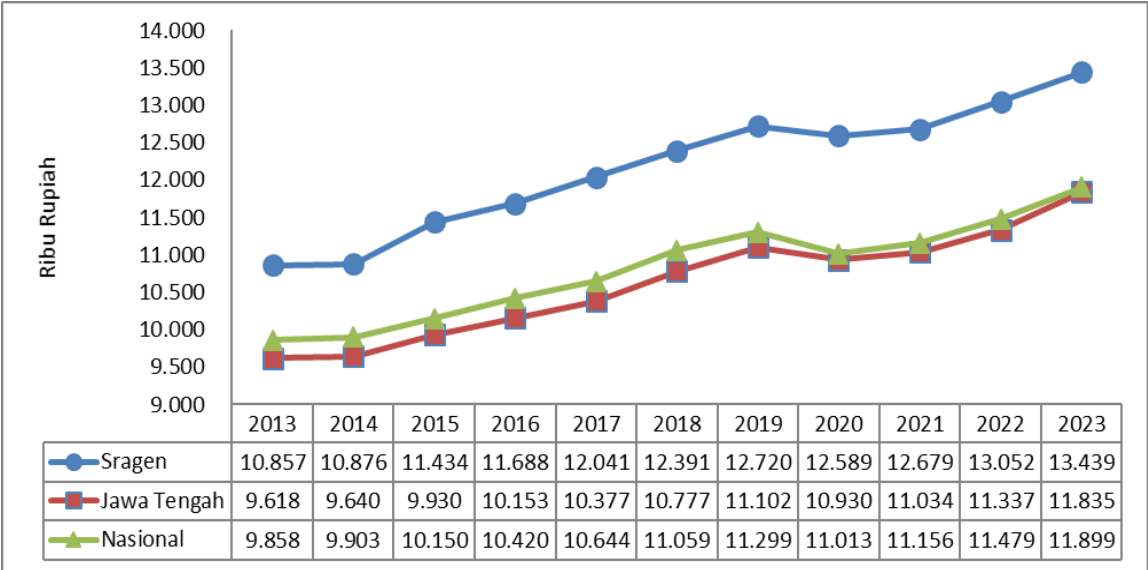
Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.17.

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Tahun)

d) **Pengeluaran Perkapita**

Pengeluaran perkapita Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Namun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan yang disebabkan oleh Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan masyarakat dibatasi. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pengeluaran per kapita Kabupaten Sragen berada diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu 2013 hingga 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

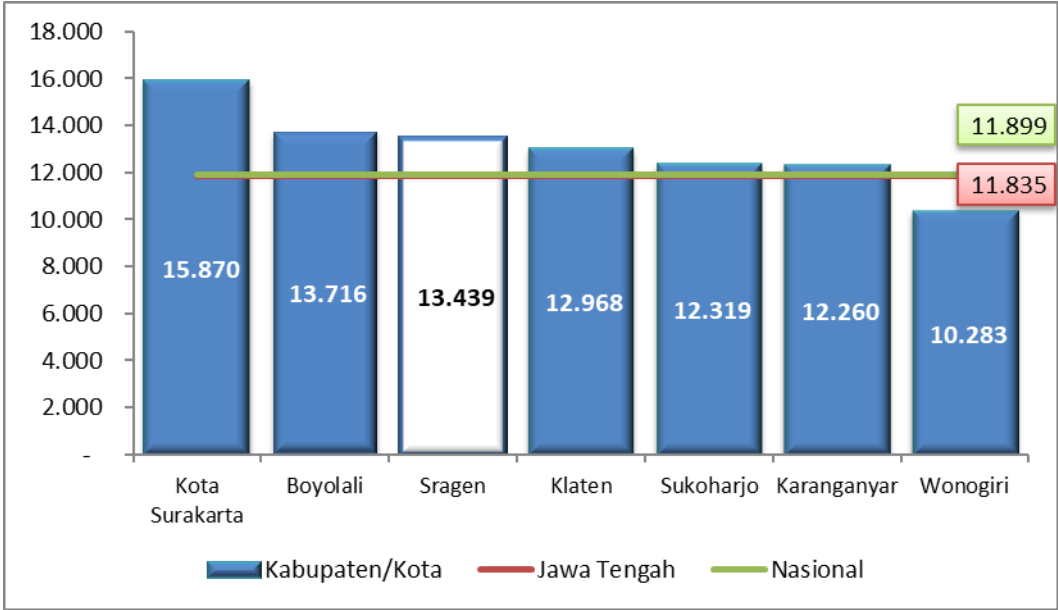


Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.18.

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (Ribuan Rupiah)

Capaian Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sragen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada pada urutan ketiga, diatas Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri tetapi berada dibawah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

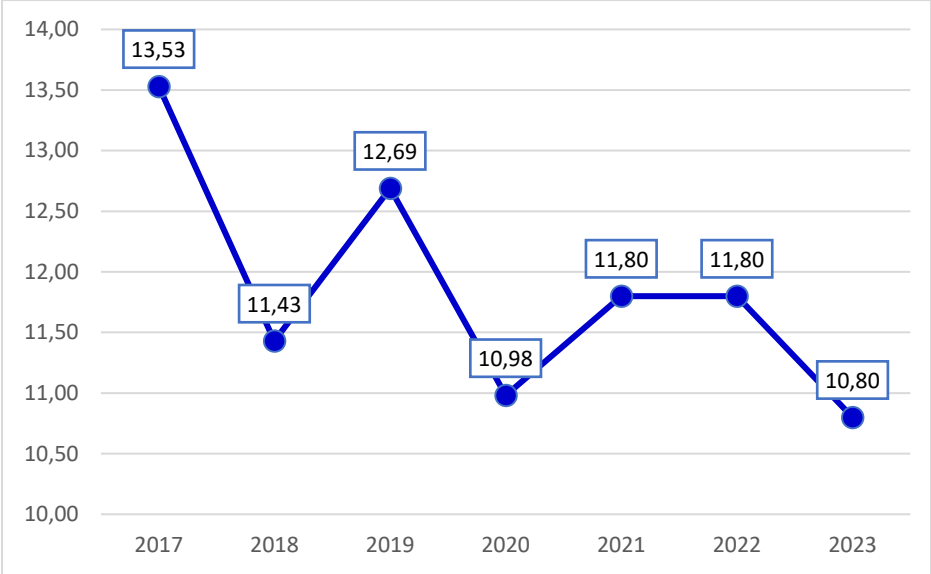
Gambar 2.19.

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Ribu Rupiah)

**Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).** Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

PoU Kabupaten Sragen pada tahun 2023 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, tahun 2022 sebesar 11,80% menjadi 10,80% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan jika penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya semakin berkurang. Sosialisasi pemenuhan pangan penduduk secara ideal harus terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen, sehingga pemenuhan nutrisi penduduk dapat terpenuhi.



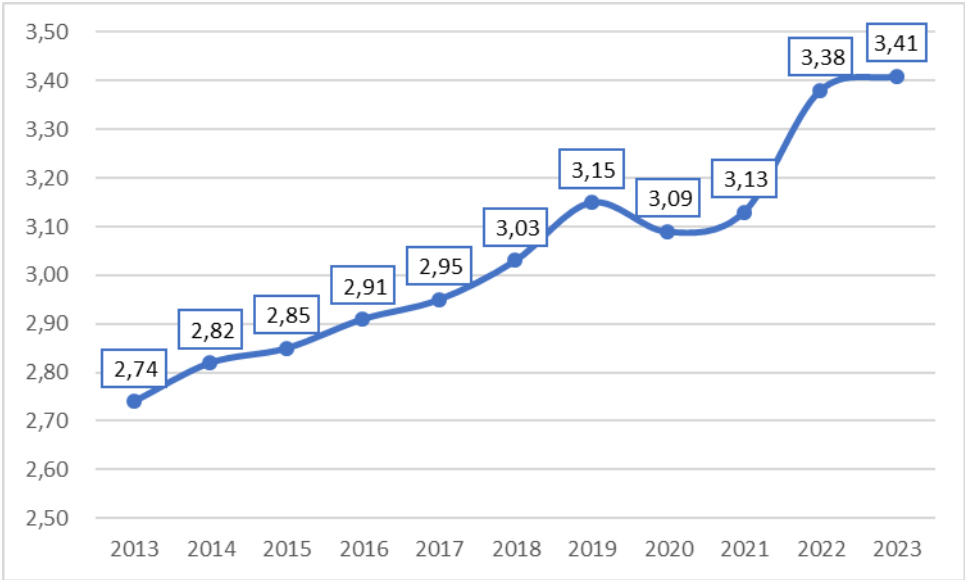
Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2023

Gambar 2.20.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2023 (%)

**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.**

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi : Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 2013-2023 menunjukan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, tahun 2013 sebesar 2,74% menjadi 3,41% pada tahun 2023.



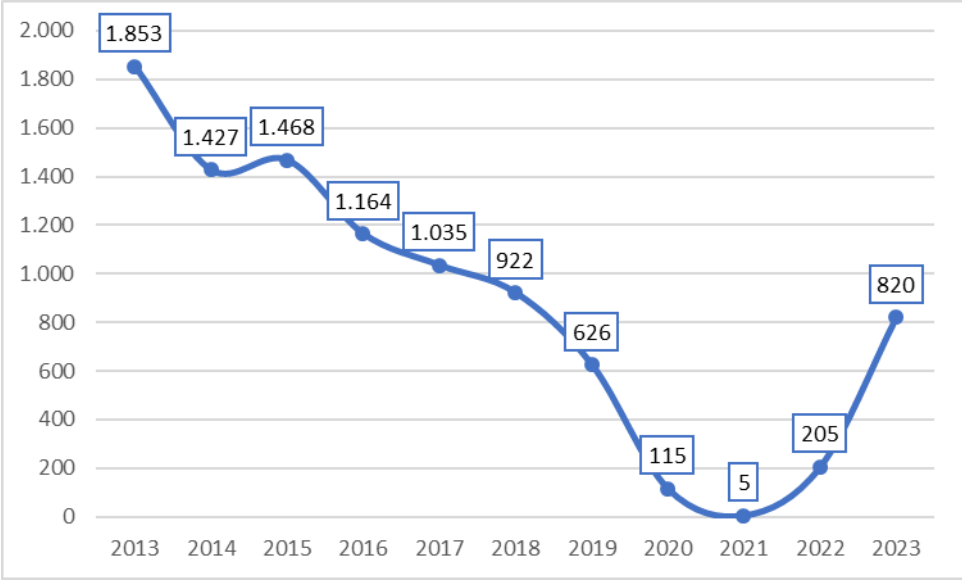
Sumber : BPS Kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.21.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 (%)

**Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara.** Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap disetiap hotel di daerah tertentu. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel di Kabupaten Sragen maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan di Kabupaten

Sragen selama tahun 2013-2023 cenderung mengalami penurunan, terutama pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022 dan 2023 kunjungan wisatawan mulai kembali meningkat. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Sragen yaitu meningkatkan fasilitas di objek wisata, melakukan promosi secara terstruktur dan berkelanjutan.



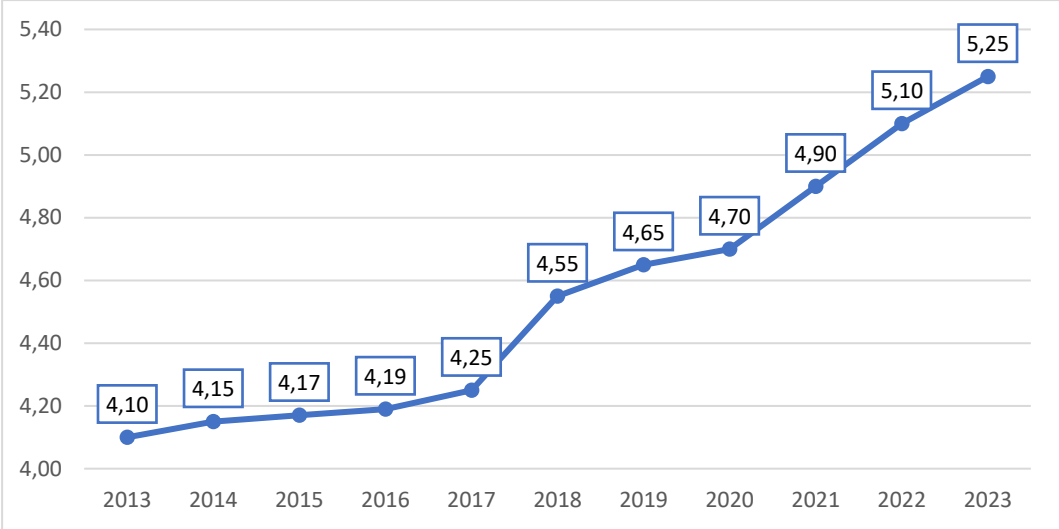
Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen Tahun 2024  
Gambar 2.22.

Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara  
di Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

**Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan**, merupakan cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan. Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kab/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler. Indikator ini tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: (1) Guru yg mengajar mulok bahasa daerah. (2) Guru yg mengajar seni budaya dan (3) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekskul).

Sampai dengan tahun 2023 capaian persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan sebesar 5,25%.

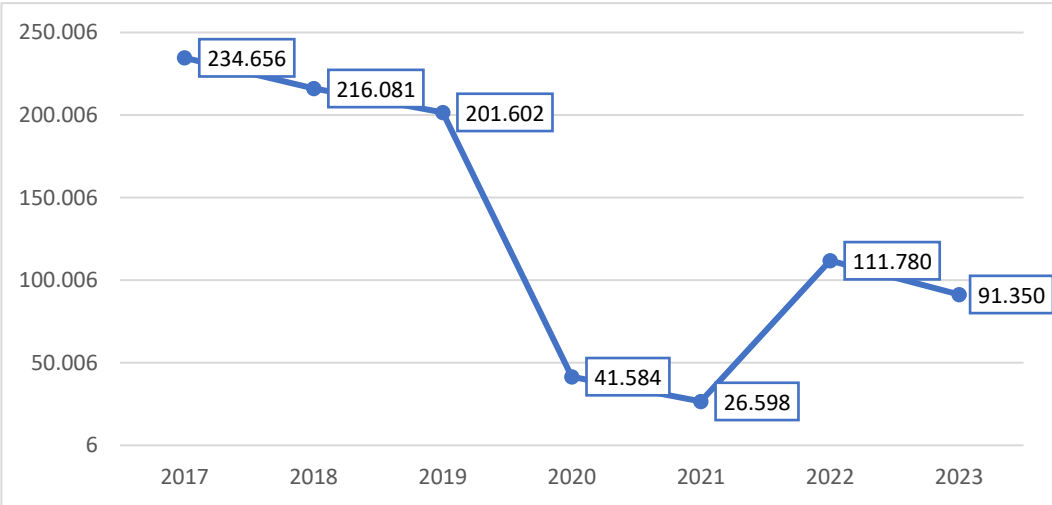


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2024  
Gambar 2.23.

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023

**Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan merupakan** cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan. Sementara definisi/makna dilestarikan mengacu pada: UU No. 5 Th. 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU 11 Th 2010 tentang Cagar Budaya (CB), di Kabupaten Sragen Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi terdiri dari Manuskrip, Tradisi Lisan, Tradisi dan Ritus. Capaiannya sejak 2013 sampai dengan 2021 sebesar 100%, pada tahun 2022 menjadi 101,03% dan pada tahun 2023 sebesar 101,53%.

**Jumlah pengunjung tempat bersejarah merupakan** Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya. Jumlah pengunjung tempat bersejarah terus mengalami penurunan tahun 2017 sebanyak 234.656 orang menjadi 91.350 orang pada tahun 2023. Hal ini harus menjadi perhatian karena Kabupaten Sragen banyak memiliki tempat bersejarah.

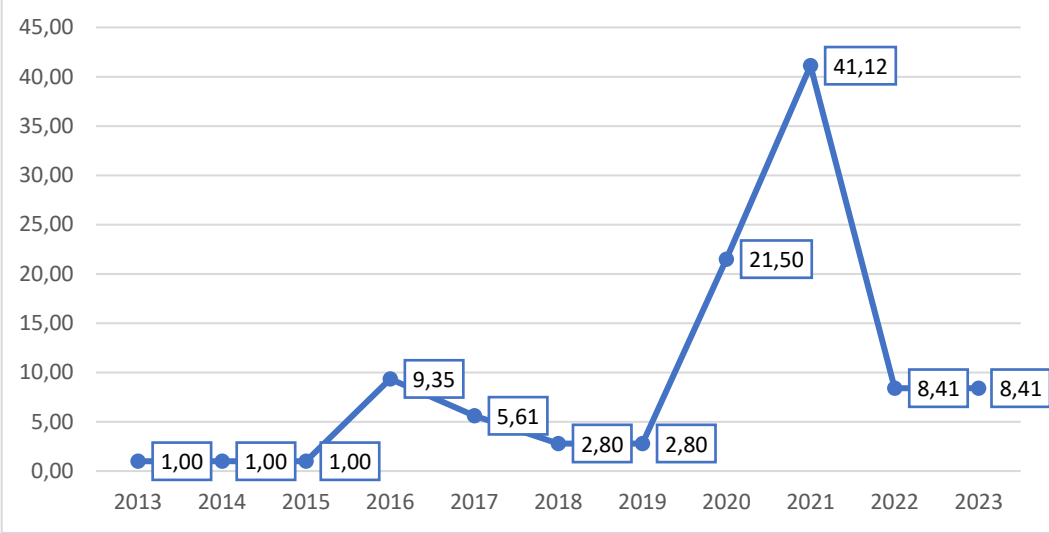


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2024  
Gambar 2.24.

Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (orang)



**Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir merupakan** Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor.



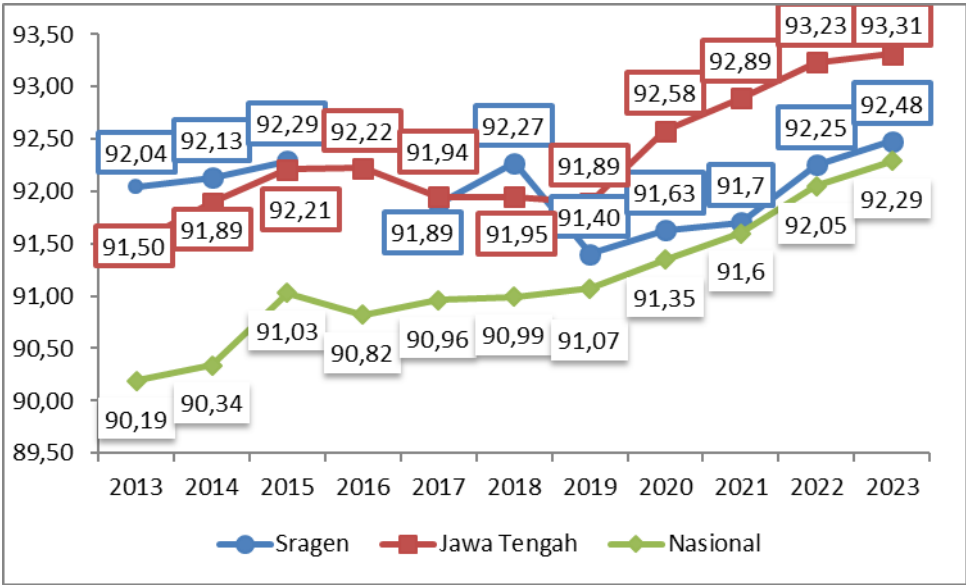
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2024  
Gambar 2.25.

Persentase Kelompok Kesenian Yang Aktif Terlibat/Mengadakan  
Pertunjukan Kesenian Dalam 1 Tahun Terakhir

**Indeks Pembangunan Keluarga, Ibangga** merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Nilai IBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: 1) IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; 2) IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; 3) IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Capaian Ibangga Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebesar 64,63 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 59,44 dan pada tahun 2021 sebesar 56,79.

**Indeks Pembangunan Gender (IPG)** merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100.

Perkembangan IPG Kabupaten Sragen tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. IPG Kabupaten Sragen pada tahun 2013 sebesar 92,04 dan pada tahun 2023 sebesar 92,48. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

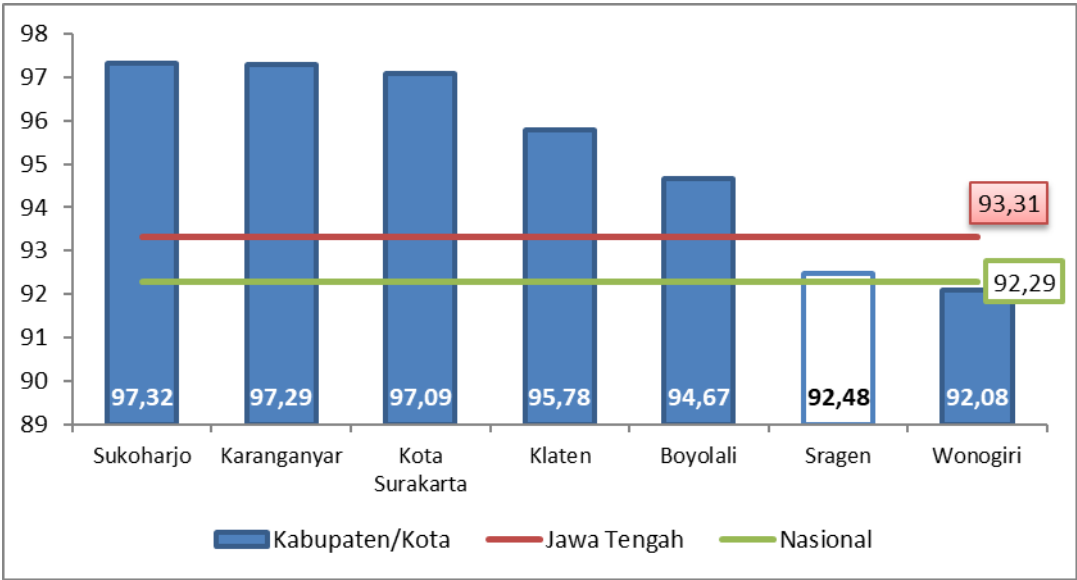


Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.26.

IPG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

Capaian IPG Kabupaten Sragen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada pada urutan keenam, diatas Kabupaten Wonogiri tetapi berada dibawah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.



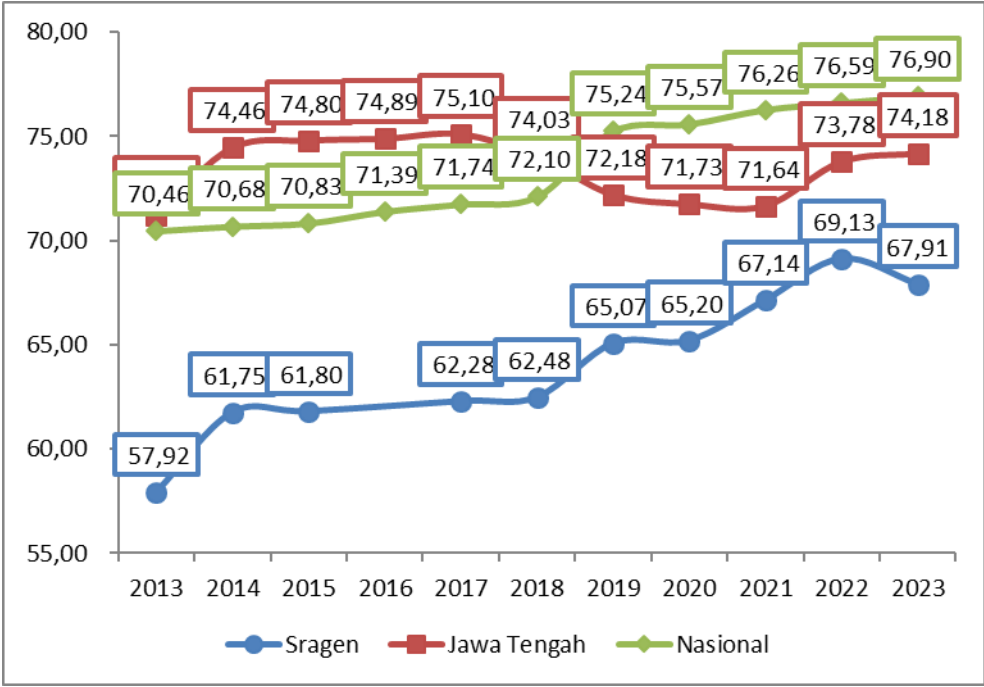
Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.27.

IPG Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** merupakan angka pembentuk yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. IDG Kabupaten Sragen dari tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, Tahun 2013 IDG Kabupaten Sragen sebesar 57,92 dan tahun 2023 mencapai 67,91. Hal tersebut relevan dengan kondisi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan IDG Kabupaten Sragen yang terjadi tiap tahun dirasa masih

kurang signifikan karena nilai IDG Kabupaten Sragen masih dibawah IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perkembangan IDG tahun 2013-2023 dapat dilihat pada gambar.

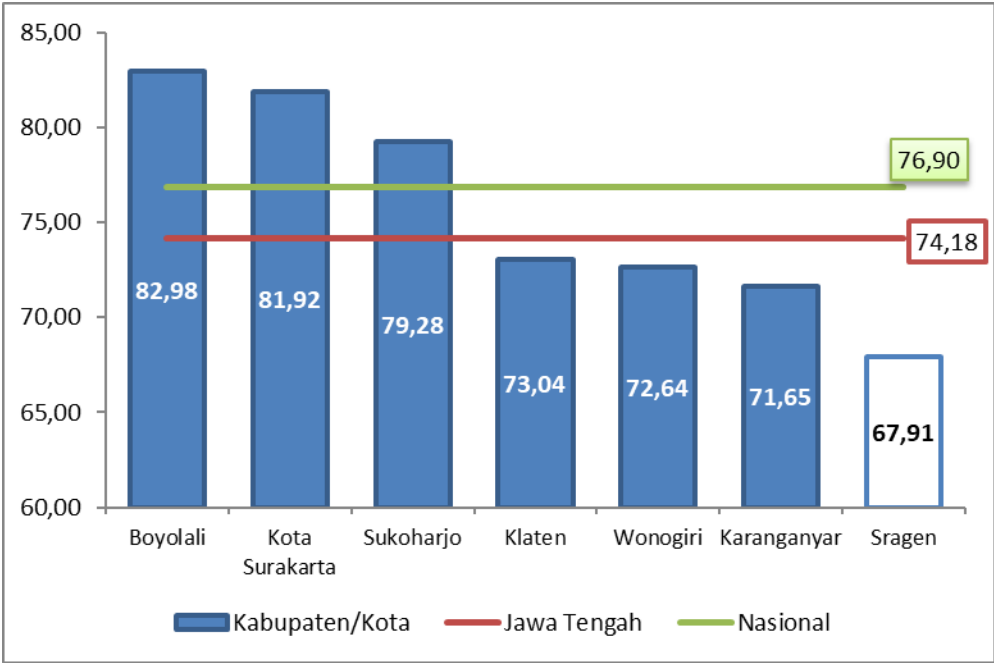


Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.28.

IDG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

Capaian IDG Kabupaten Sragen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada pada urutan terakhir. Capaian ini dipengaruhi oleh keterlibatan perempuan di parlemen yang masih rendah.



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2023

Gambar 2.29.

IDG Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Dalam peningkatan kualitas perempuan di Kabupaten Sragen dilihat dari indikator pembentuk IDG dari tahun 2018 hingga tahun 2023, keterlibatan perempuan di parlemen cenderung meningkat, yaitu dari



8,89% ditahun 2018 meningkat menjadi 13,33% di tahun 2023. Demikian halnya dengan indikator komposit Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi nilainya cenderung menurun. Pada tahun 2018 persentasenya sebesar 50,20% dan naik mencapai 49,37% pada tahun 2023.

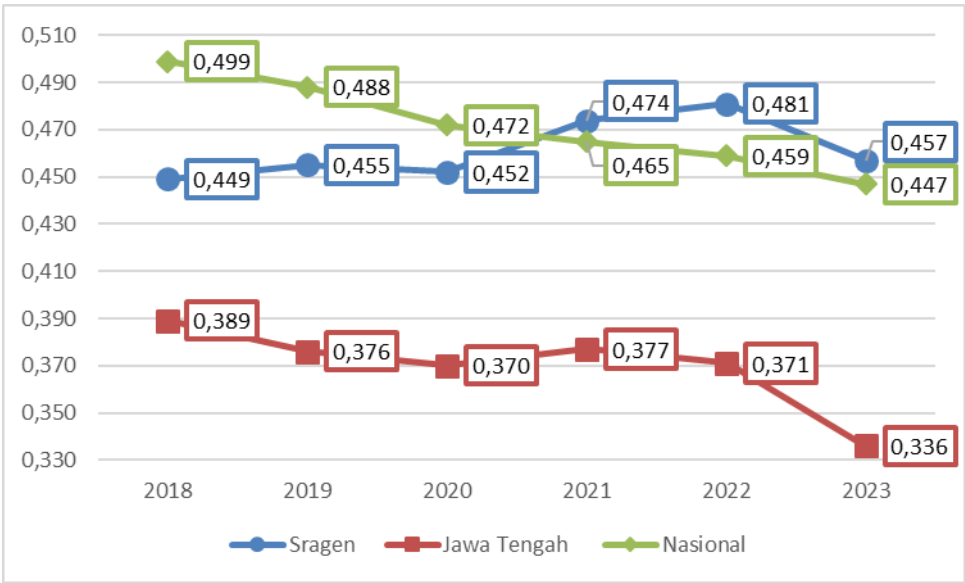
Sebaliknya indikator komposit Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja cenderung meningkat. Pada tahun 2018 persentasenya sebesar 37,11% dan turun pada 37,32 % pada tahun 2023. Data indikator komposit IDG Kabupaten Sragen Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.14.  
Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Sragen  
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Keterlibatan perempuan di Parlemen	%	8,89	11,11	11,36	13,33	15,56	13,33
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	50,20	49,03	48,95	53,94	57,27	49,37
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	37,11	37,18	37,14	37,15	36,37	37,32

Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen , 2024

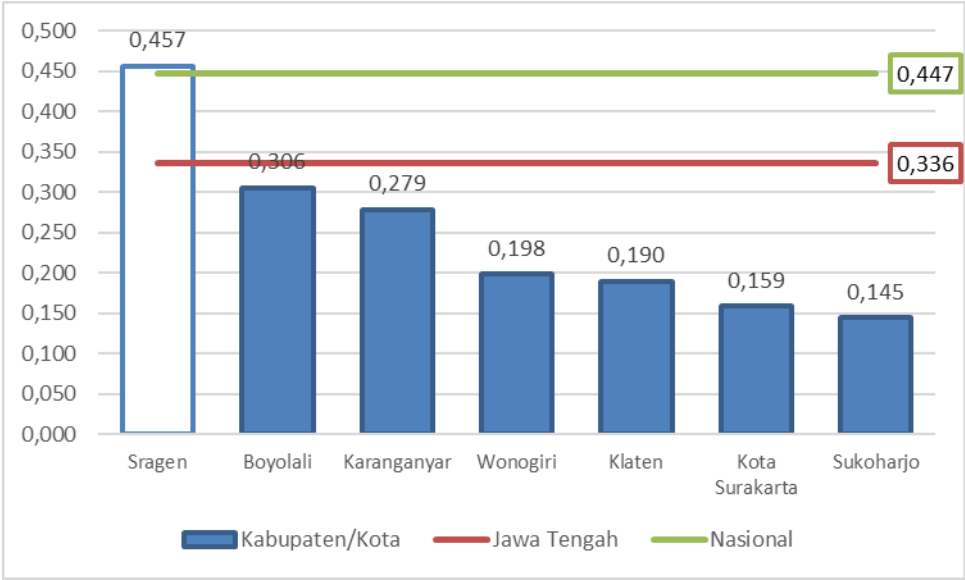
**Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG Kabupaten Sragen selama 2018-2023 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan makin tingginya ketimpangan gender. Tahun 2023 IKG Kabupaten Sragen berada diatas IKG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.30.  
IKG Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Capaian IKG Kabupaten Sragen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar merupakan yang paling tinggi, hal ini menunjukkan jika pembangunan di Kabupaten Sragen masih ada ketimpangan gender yang tinggi. Capaian ini dipengaruhi oleh keterlibatan perempuan di parlemen yang masih rendah

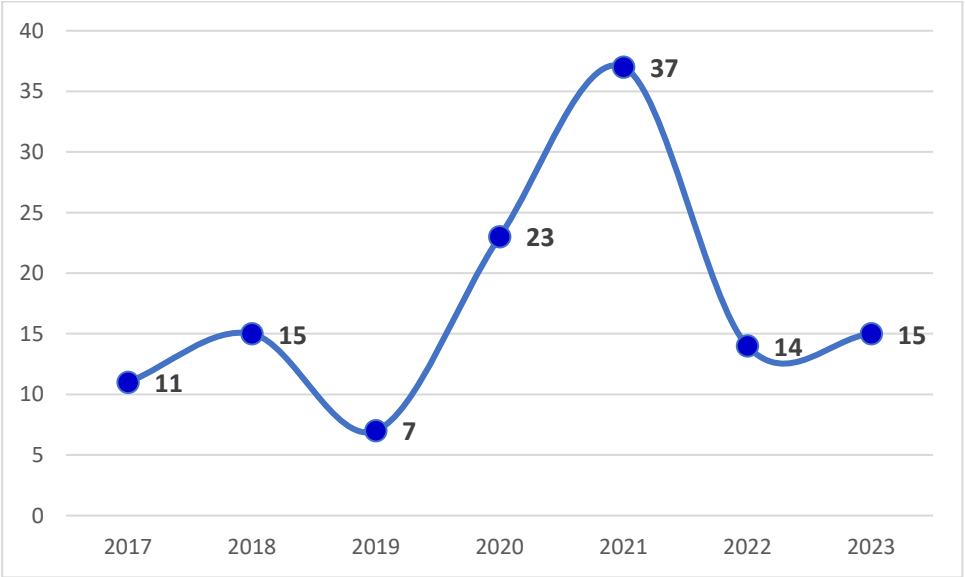


Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.31.  
IKG Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

**Jumlah Kasus Kematian Ibu** merupakan banyak kematian perempuan terjadi pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.

Jumlah kematian ibu tahun 2023 meningkat jika dibandingkan tahun 2022 Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya mengurangi kasus kematian ibu yaitu, 1) Peningkatan pelayanan kesehatan; 2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan; 3) peningkatan pendidikan kesehatan; 4) perbaikan gizi dan; 5) Peningkatan kesadaran masyarakat. Berikut jumlah kematian ibu tahun 2017-2023.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 2024

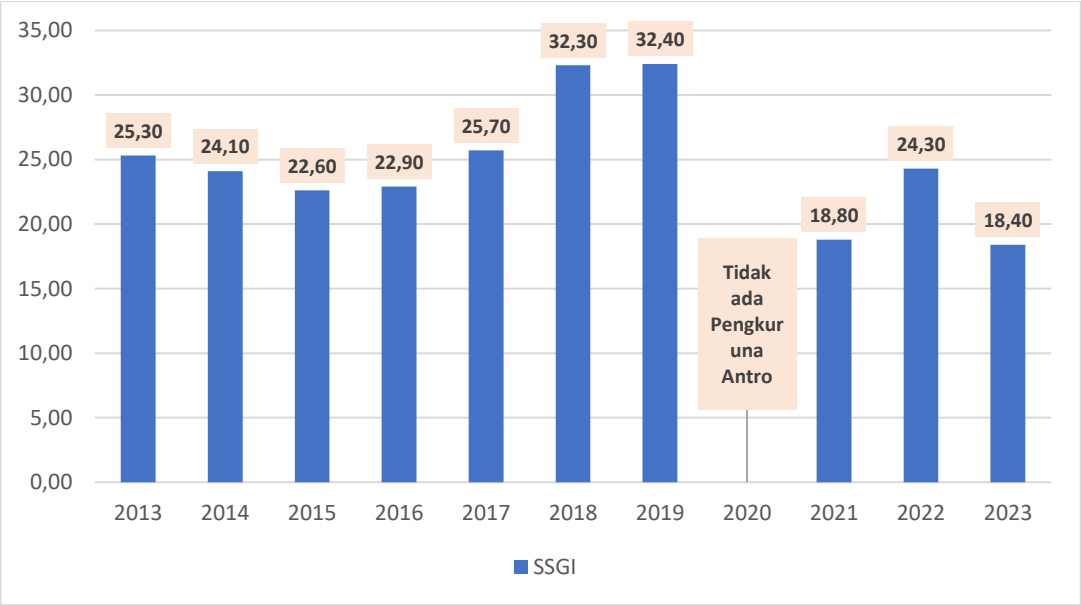
Gambar 2.32.  
Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Sragen Tahun 2017-2023 (Kasus)





**Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita.**

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. **Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita** di Kabupaten Sragen tahun 2013-2023 mengalami fluktuatif, angka prevalensi tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 32,40% dan menurun di tahun 2023 (18,40%). Sedangkan ditahun 2020 tidak dilakukan *survey* karena pandemi Covid. Adanya komitmen pemerintah dan semakin sadarnya orangtua terhadap pemberian makanan bergizi dapat menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Sragen.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 2024

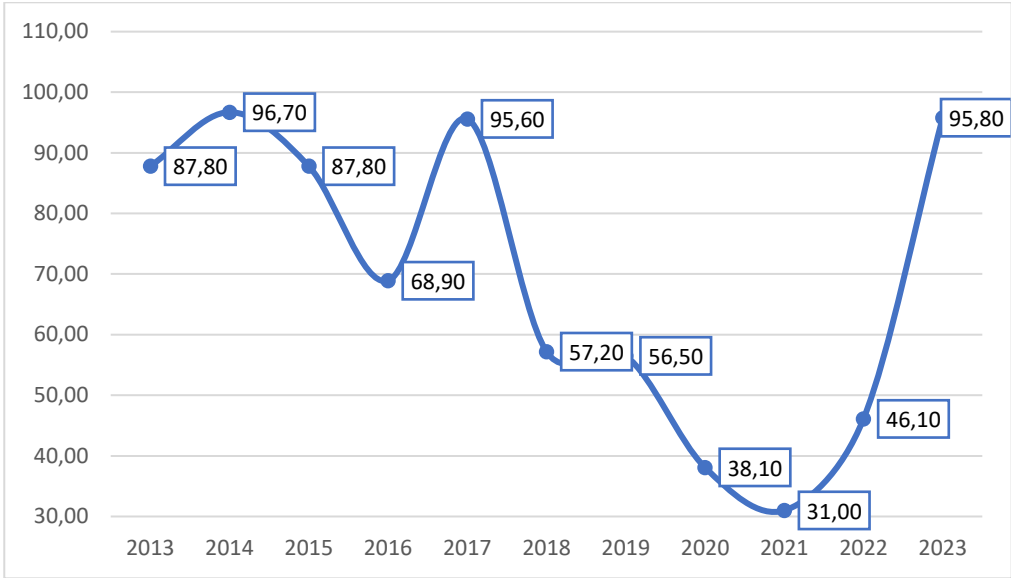
Gambar 2.33.

Prevalensi Stunting pada Balita di Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 (%) berdasarkan SSGI/SKI

**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Treatment Coverage).** Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting : Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis; Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Treatment Coverage) Kabupaten Sragen dalam periode 2013-2023 mengalami fluktuasi, tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 95,80% dan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 31,00%. Pengobatan tuberkulosis memerlukan konsistensi dalam meminum obat, sehingga

perlu dibantu oleh pengawas minum obat agar penderita meminum obat tepat waktu.

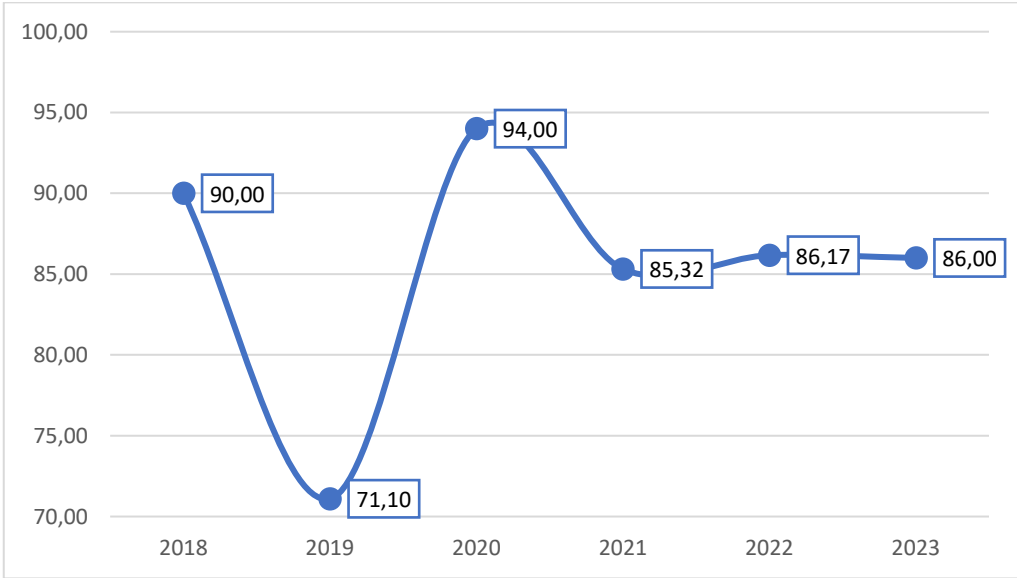


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 2024

Gambar 2.34.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*Treatment Coverage*). Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 (%)

**Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Success Rate*).** Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Sampai dengan tahun 2023 angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis sebesar 86,00%.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 2024

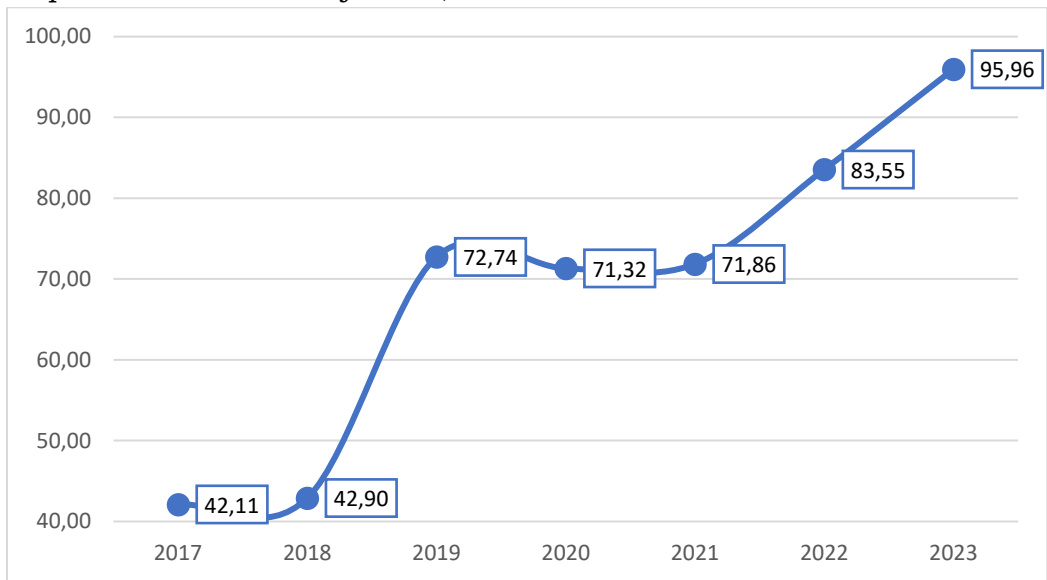
Gambar 2.35.

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) Kabupaten Sragen Tahun 2018-2023 (%)

**Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.** Pelayanan kesehatan adalah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah memiliki program *universal health coverage* atau UHC. Cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Sragen terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 sebanyak 42,11%



penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan, terus meningkat sampai tahun 2023 menjadi 95,96%.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 2023

Gambar 2.36.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Sragen Tahun 2017-2023 (%)

## 2.3. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

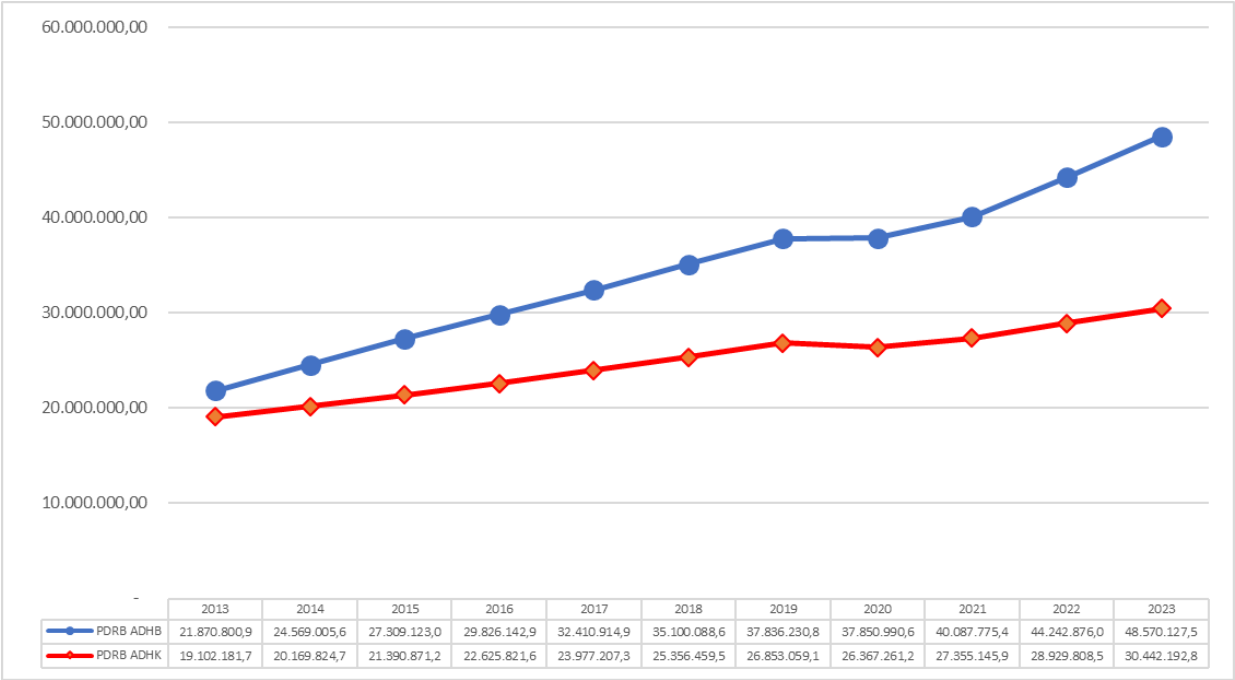
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sragen tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, cenderung mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu sepuluh tahun, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan dampak pandemi Covid-19.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sragen dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 akibat dari pandemi covid-19. Pada tahun 2013 PDRB ADHB sebesar 21.870.800,98 juta rupiah menjadi 48.570.127,58 juta rupiah pada tahun 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sragen dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 akibat dari pandemi covid-19. Pada tahun 2013 PDRB ADHK sebesar

19.102.181,74 juta rupiah menjadi 30.442.192,81 juta rupiah di tahun 2023.

Selengkapnya terkait PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Sragen, 2024  
Gambar 2.37.

PDRB Kabupaten Sragen Menurut Lapangan Usaha ADHB & ADHK Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)

**PDRB perkapita** secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. PDRB Perkapita didapatkan dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

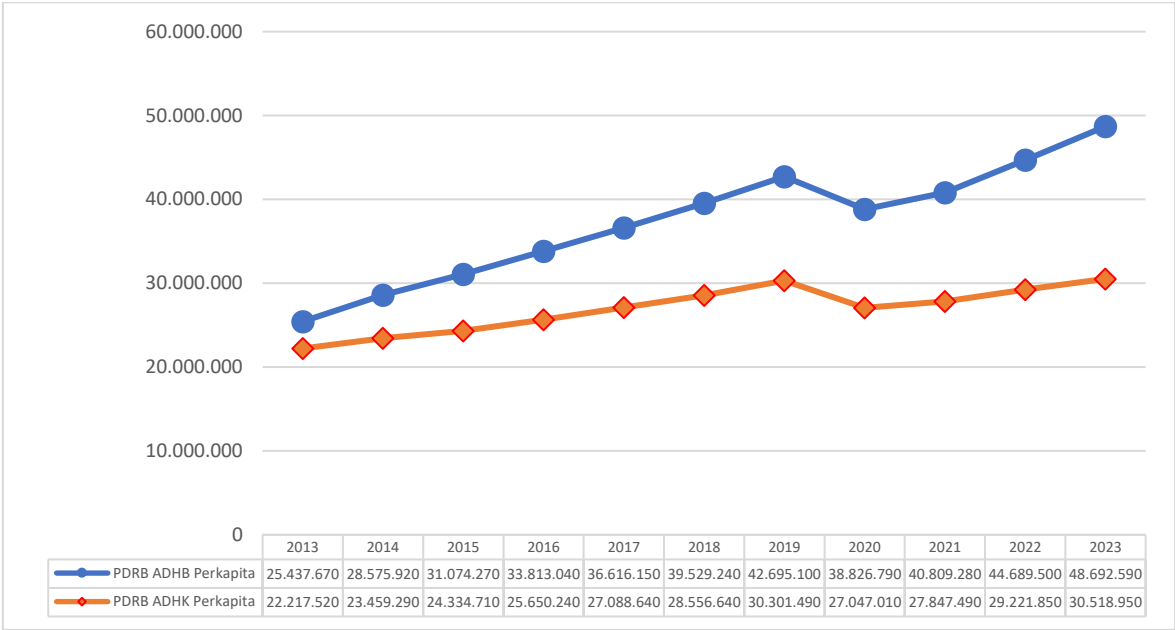
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sragen pada tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 akibat dari adanya pandemi covid-19. Tahun 2013 sebesar Rp.25.437.670 meningkat menjadi sebesar Rp.42.695.100 pada tahun 2019, kemudian terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi Rp.38.826.790. Angka tersebut meningkat kembali menjadi Rp.48.692.590 di tahun 2023.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Sama halnya dengan PDRB Perkapita ADHB, PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Sragen pada tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 akibat dari adanya pandemi covid-19. Tahun 2013 sebesar Rp.22.217.520 meningkat menjadi sebesar Rp.30.301.490 pada tahun 2019, kemudian terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi Rp.27.047.010. Angka tersebut meningkat kembali menjadi Rp.30.518.950 di tahun 2023.

Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut.



Selengkapnya terkait PDRB Perkapita Kabupaten Sragen 2013-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.38.

PDRB Perkapita Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023

**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.** Tiga besar lapangan usaha yang memiliki distribusi terbesar dalam PDRB ADHB di Kabupaten Sragen yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan pertanian, kehutanan dan perikanan. Ketiga lapangan usaha ini memiliki peran besar dalam perekonomian Kabupaten Sragen. Berikut distribusi PDRB ADHB selengkapnya.

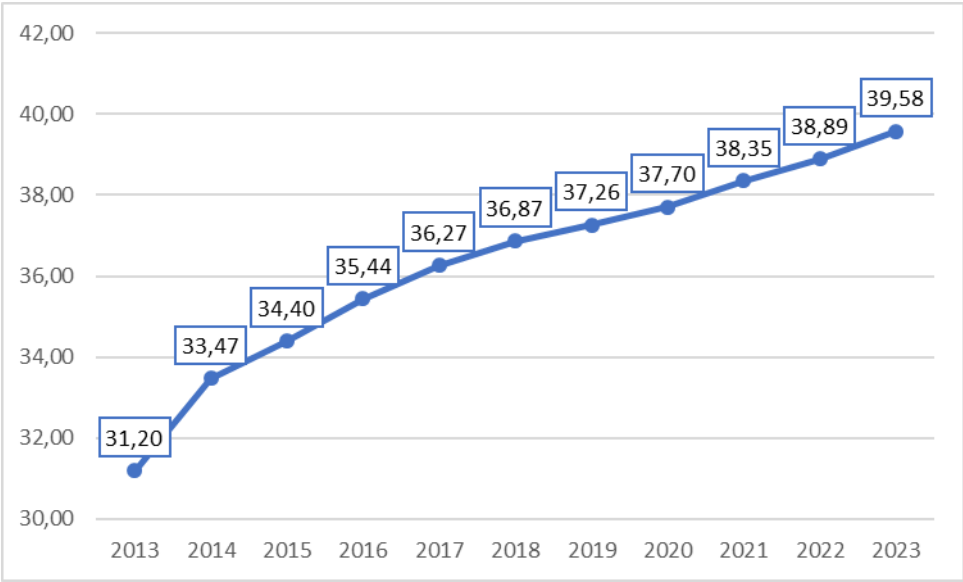


Tabel 2.15.  
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sragen  
Tahun 2013-2023 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,20	17,68	17,37	16,73	15,80	15,35	14,79	15,10	14,61	14,06	13,59
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	2,42	2,71	2,90	2,95	2,97	2,84	2,72	2,80	2,77	2,49	2,41
<b>C</b>	Industri Pengolahan	31,20	33,47	34,40	35,44	36,27	36,87	37,26	37,70	38,35	38,89	39,58
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
<b>F</b>	Konstruksi	6,74	6,81	6,76	6,65	6,67	6,66	6,68	6,37	6,67	6,56	6,60
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,14	19,62	19,07	18,72	18,51	18,24	18,32	18,03	18,07	17,85	17,76
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	2,41	2,54	2,50	2,38	2,34	2,30	2,33	1,78	1,77	2,75	2,88
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,74	2,82	2,85	2,91	2,95	3,03	3,15	3,09	3,13	3,38	3,41
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	1,11	1,12	1,09	1,12	1,21	1,26	1,31	1,52	1,52	1,40	1,44
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,73	2,73	2,74	2,75	2,84	2,89	2,83	2,87	2,85	2,83	2,69
<b>L</b>	Real Estate	0,87	0,88	0,88	0,87	0,88	0,89	0,88	0,88	0,87	0,82	0,80
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	0,38	0,38	0,39	0,41	0,42	0,44	0,47	0,45	0,45	0,44	0,45
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,44	2,36	2,30	2,26	2,19	2,13	2,06	2,07	1,92	1,83	1,77
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	4,09	4,29	4,23	4,30	4,43	4,54	4,64	4,71	4,50	4,18	4,08
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,75	0,75	0,74	0,75	0,75	0,76	0,86	0,82	0,78	0,77
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	1,58	1,63	1,58	1,58	1,58	1,59	1,62	1,57	1,51	1,60	1,60
	PDRB ADHB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Tahun 2024

**Rasio PDRB Industri Pengolahan** industri pengolahan dalam Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sragen memperlihatkan perkembangan penting dalam sektor industri di wilayah tersebut. Capaian menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB di Kabupaten Sragen. Pertumbuhan ini mencerminkan pentingnya sektor industri dalam mendorong ekonomi lokal. Upaya untuk terus mendorong pertumbuhan sektor ini mungkin menjadi bagian integral dari rencana pembangunan ekonomi wilayah ini untuk masa depan, termasuk penciptaan lapangan kerja dan diversifikasi ekonomi yang lebih baik. Data menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam kontribusi industri pengolahan terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sragen dari tahun 2013 hingga 2022. Peningkatan ini secara bertahap dari 31.19% pada tahun 2013 menjadi 39,58% pada tahun 2023 menggambarkan pertumbuhan yang kuat dalam peran sektor industri pengolahan terhadap ekonomi lokal.

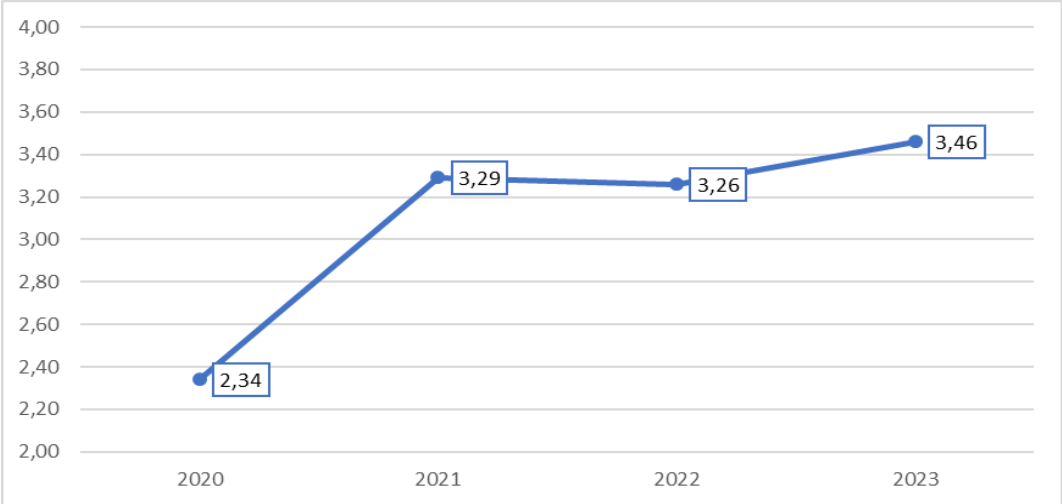


Sumber : BPS kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.39.

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023(%)

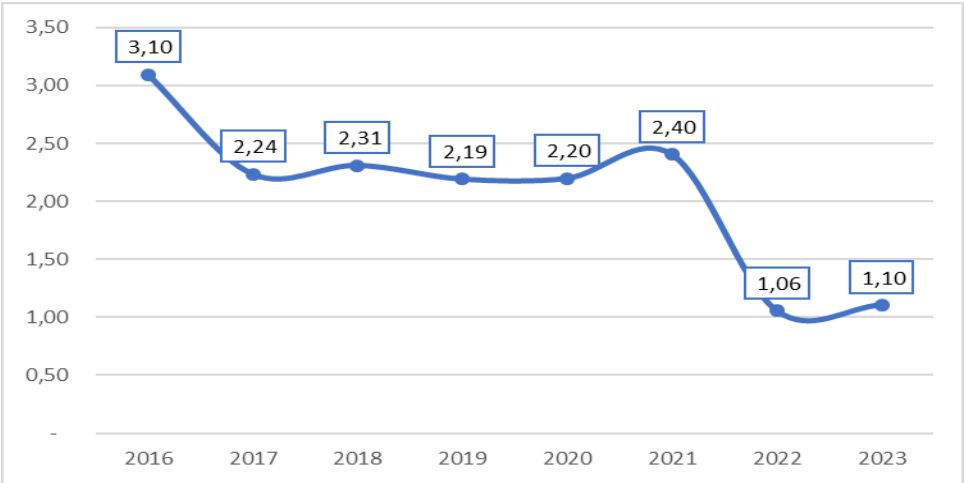
**Rasio Kewirausahaan Daerah.** Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas Risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Capaian pada tahun 2023 rasio kewirausahaan Kabupaten Sragen sebesar 3,46%



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.40.  
Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

**Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB.** Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Berdasarkan data rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB semakin menurun sejak tahun 2016-2023, hal yang sama juga bisa dilihat dari volume usaha koperasi memiliki nilai semakin menurun sejak tahun 2016-2023, pada tahun 2016 sebesar Rp.923.329.806.000,00 menjadi sebesar Rp. 536.663.870.753,00. Dalam rangka meningkatkan volume usaha koperasi sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 maka perlu ditindaklanjuti uapaya penggunaan produk dalam Negeri dan produk usaha mikro, usaha Kecil ,menengah oleh masyarakat dan pemerintah.

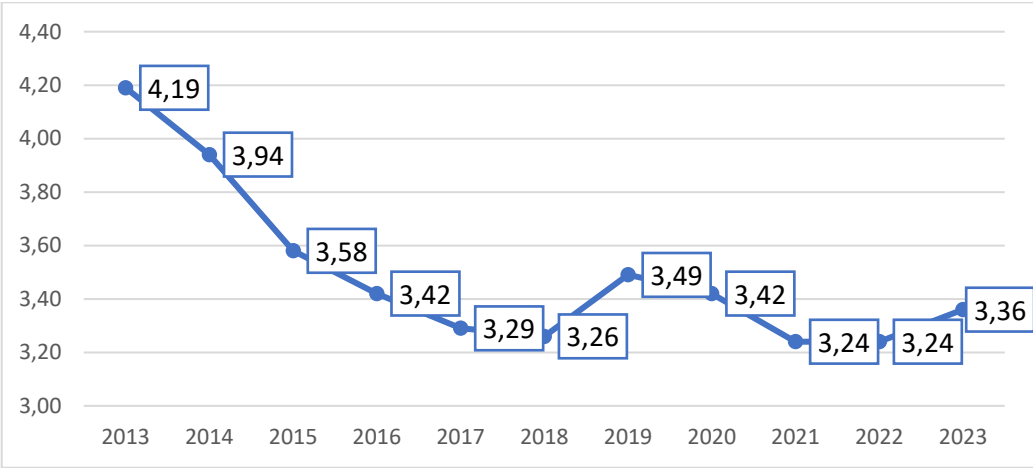


Sumber : BPS dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.41.  
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

**Return on Asset (ROA) BUMD.** Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Capaian ROA BUMD di Kabupaten Sragen mengalami penurunan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, tahun 2013 sebesar 4,19% menjadi 3,36% pada tahun 2023.



Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.42.  
Return on Asset (ROA) BUMD

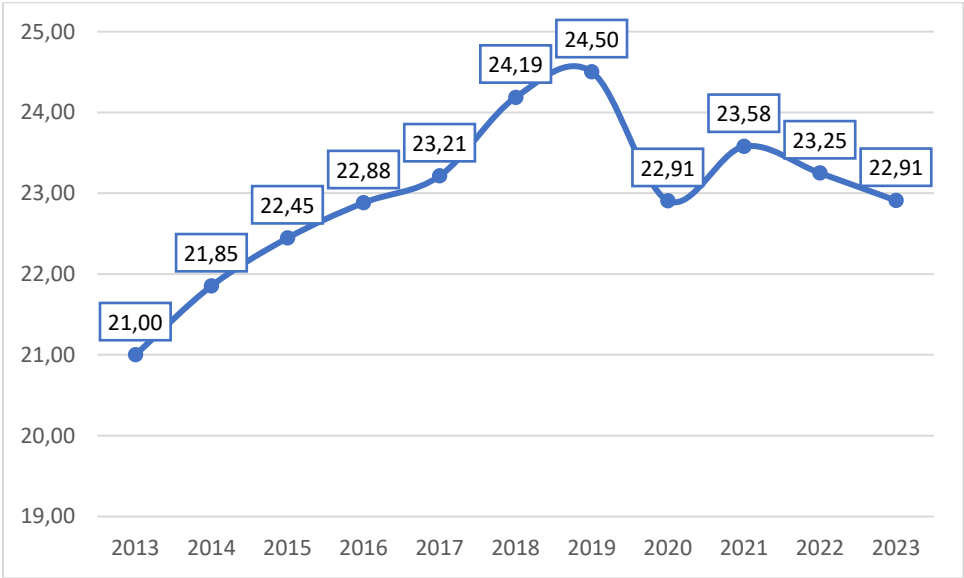
**Disparitas harga** adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah yang dilihat dari 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok)

1. Beras Medium
2. Gula Pasir
3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana
4. Daging Sapi Paha Belakang
5. Daging Ayam Ras
6. Telur Ayam Ras
7. Tepung Terigu
8. Kedelai Impor
9. Cabe Merah Keriting
10. Cabe Rawit Merah
11. Bawang Merah
12. Bawang Putih Impor Kating
13. Ikan Kembung

Disparitas harga antara Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar -11,22%, meningkat menjadi -8,85% pada tahun 2020, tahun 2021 sebesar -6,79, pada tahun 2022 menjadi sebesar -8,06% dan pada tahun 2023 menjadi sebesar -6,09%

**Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan

bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB. Total PMTB berdasarkan PDB sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Perkembangan PMTB di Kabupaten Sragen mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, tahun 2013 sebesar 21,00% menjadi 22,91% pada tahun 2023.



Sumber : BPS Kabupaten Sragen Tahun 2024

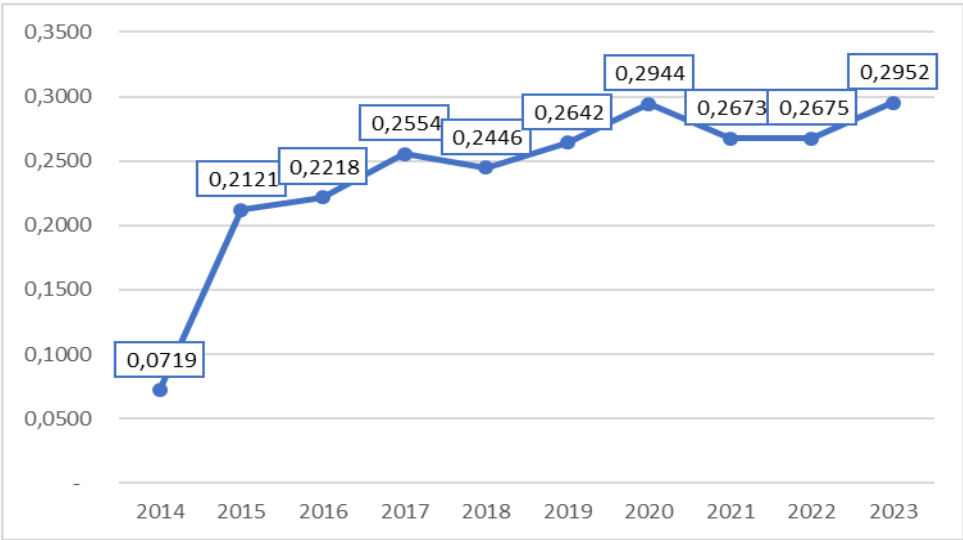
Gambar 2.43.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB) Tahun 2013-2023.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.

**Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)** adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Sragen tahun 2014-2023 cenderung mengalami peningkatan, tahun 2014 sebesar 0,0719% menjadi 0,2952% pada tahun 2023.



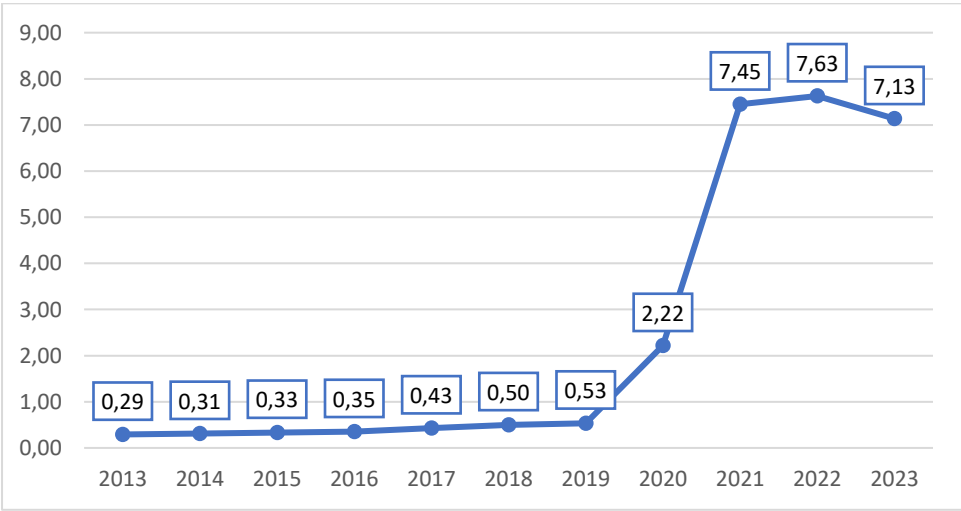


Sumber : BPS dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.44.  
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

**Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)** adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota.

Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) pada tahun 2013 sebesar 0,29%, meningkat menjadi 7,13 pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan bahwa supply pendanaan modal yang dipakai untuk menggerakkan perekonomian meningkat, yang kemudian harus diiringi dengan peningkatan demand penyaluran kredit. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan juga semakin meningkat, yang berarti stabilitas ekonomi makro tetap terjaga.



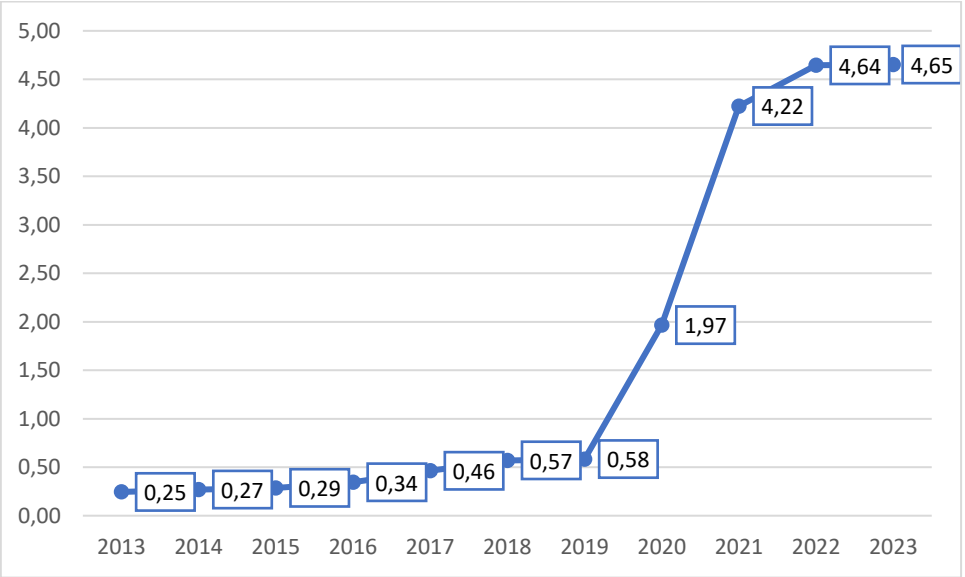
Sumber : BPR Djoko Tingkir, BPR Syariah, BPR BKK Karangmalang, BPR Jateng, Bank Jateng Tahun 2024

Gambar 2.45.  
Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Sragen per PDRB (%) Tahun 2013-2023

**Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)**

menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota.

Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut. Sampai dengan tahun 2023 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) sebesar 4,65%, capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,25%.



Sumber : BPR Djoko Tingkir, BPR Syariah, BPR BKK Karangmalang, BPR Jateng, Bank Jateng Tahun 2024

Gambar 2.46.  
Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Sragen per PDRB (%) Tahun 2013-2023

**Indeks Desa Membangun** dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan

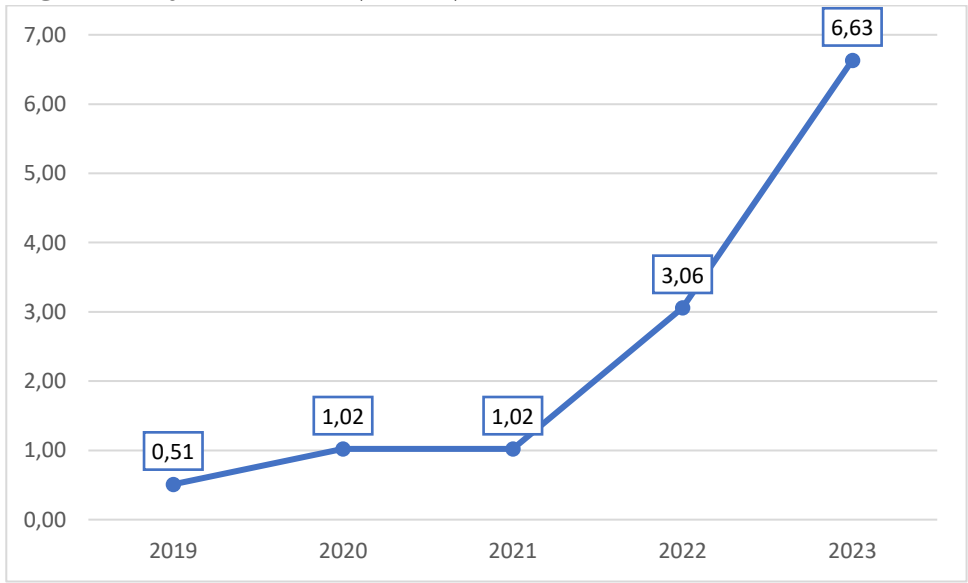
Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Berikut perkembangan indeks desa membangun Kabupaten Sragen.

Tabel 2.16.  
Nilai dan Status IDM Kabupaten Sragen Tahun 2018-2023

Tahun	Nilai IDM	Status
2018	0,6701	Berkembang
2019	0,6828	Berkembang
2020	0,6986	Berkembang
2021	0,7035	Berkembang
2022	0,7208	Maju
2023	0,7455	Maju

Sumber : <https://idm.kemendesa.go.id/>

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Jumlah desa mandiri di Kabupaten Sragen Tahun 2019 sebanyak 1 desa (0,51%), jumlah tersebut semakin meningkat menjadi 13 desa (6,63%).



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.47.  
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sragen  
Tahun 2019-2023 (%)

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

**Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi membaca; Numerasi.** Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan

pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

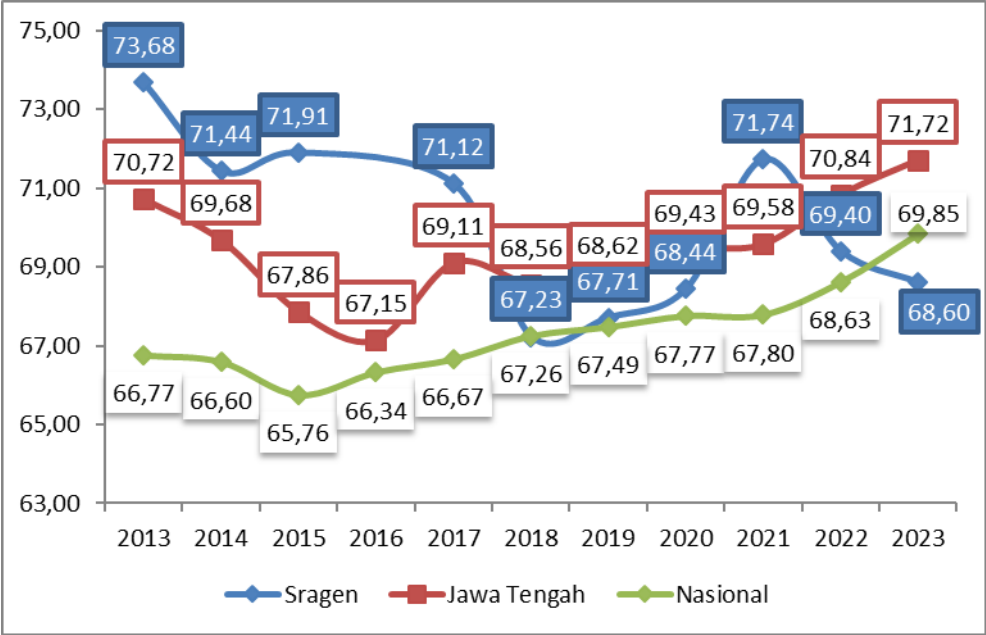
- 1. Perlu intervensi khusus
- 2. Dasar
- 3. Cakap
- 4. Mahir

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75%peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Capaian Literasi membaca SD/ Sederajat Kabupaten Sragen tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari 52,77% menjadi sebesar 63,22% pada tahun 2023. Capaian literasi membaca SMP/ sederajat tahun 2021-2023 juga mengalami peningkatan dari 65% pada tahun 2021 menjadi sebesar 74,33% pada tahun 2023. Sementara untuk capaian numerasi SD/ sederajat telah mengalami peningkatan dari 36,63% pada tahun 2021 menjadi sebesar 49,35% pada tahun 2023 dan numerasi SMP/ sederajat dari sebesar 65% pada tahun 2021 menjadi sebesar 65,33% pada tahun 2023.

**Tingkat partisipasi angkatan kerja** memberikan gambaran tentang seberapa besar sebagian dari populasi usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi yang tinggi bisa menunjukkan tingkat keterlibatan yang baik dalam perekonomian, sementara tingkat yang rendah bisa menandakan berbagai hal, seperti pengangguran, ketergantungan pada pekerjaan informal, atau faktor-faktor lain yang menghambat partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja penting untuk analisis ekonomi dan perencanaan kebijakan karena dapat memberikan gambaran tentang tenaga kerja yang tersedia dalam suatu negara atau wilayah.

TPAK Kabupaten Sragen cenderung mengalami penurunan selama 2013-2023. pada tahun 2023 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

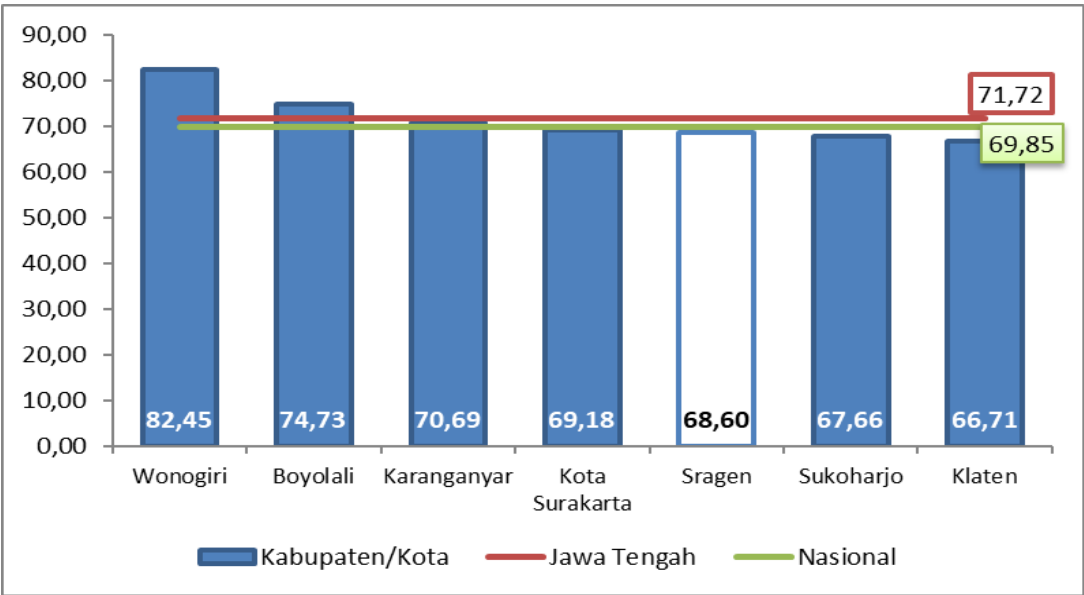


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.48.

TPAK Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (%)

Capaian TPAK Kabupaten Sragen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada di posisi keempat, berada di atas Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo tetapi berada dibawah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar

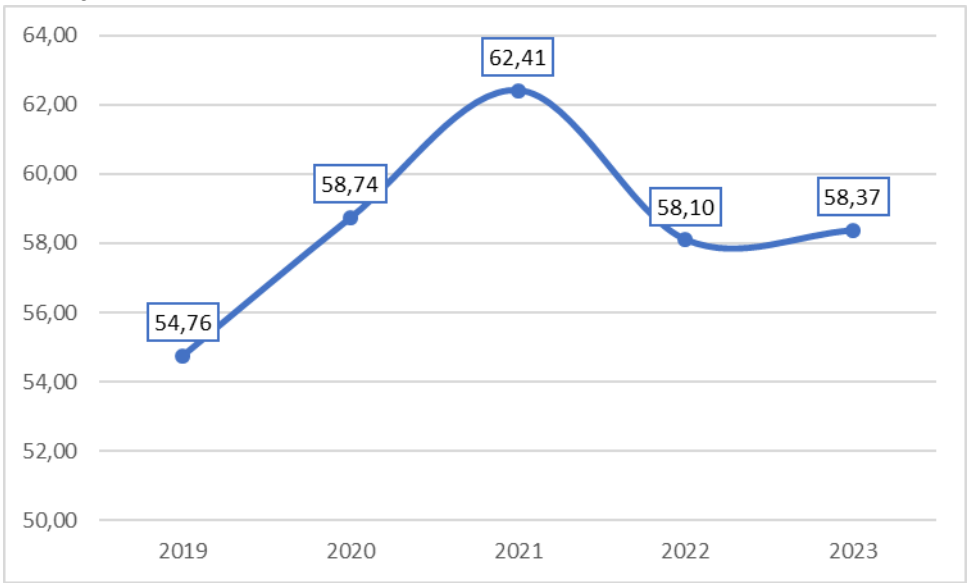


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.49.

TPAK Kabupaten Sragen, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (%)

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK Perempuan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023, pada tahun 2019 sebesar 54,26% menjadi 58,37% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja semakin bertambah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.50.

TPAK Perempuan Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023 (%)



**Angka ketergantungan** menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Rasio Ketergantungan pada tahun 2013 sebesar 51,51, menurun menjadi 45,92 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa 100 penduduk usia produktif menanggung 45 penduduk usia non produktif.

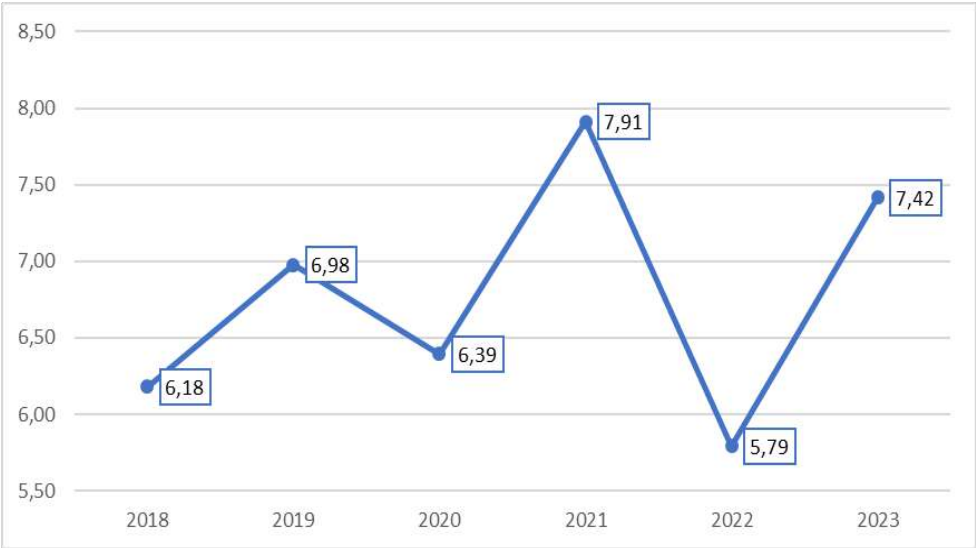
Tabel 2.17.  
Angka Ketergantungan Kabupaten Sragen  
Tahun 2013-2023

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-14	240.730	203.865	202.766	200.595	197.497	196.444	196.444	211.245	210.690	209.870	208.777
15-64	591.510	587.513	589.981	592.703	595.846	596.887	596.887	674.417	674.190	678.115	683.573
65+	63.961	84.222	86.280	88.792	91.779	94.558	94.558	91.289	98.761	104.258	105.135
Rasio Ketergantungan	51,51	49,04	48,99	48,82	48,55	48,75	48,75	44,86	45,90	46,32	45,92

Sumber Data : BPS Kabupaten Sragen 2023

**Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi.** Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Sampai dengan tahun 2023 Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Sragen sebesar 7,42%.



Sumber : BPS Kabupaten Sragen Tahun 2024

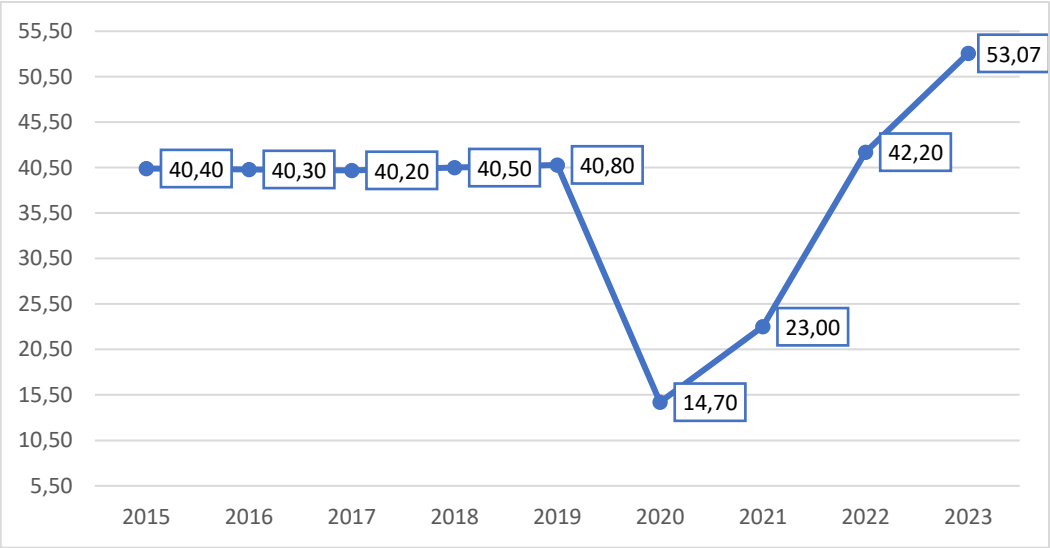
Gambar 2.51.

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

**Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun,** merupakan cakupan penduduk usia 5-6 th yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Berdasarkan

data Dinas Pendidikan angka partisipasi sekolah 5-6 tahun tahun 2021-2023 mencapai 100%.

**Tingkat pemanfaatan perpustakaan.** Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Jumlah penduduk merupakan rilis BPS pada tahun yang sama. Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah: perpustakaan kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus. Sampai dengan tahun 2023 tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Sragen sebesar 53,07%



Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen Tahun 2024  
Gambar 2.52.

Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet,** Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas pernah menggunakan internet (termasuk facebook, twitter, youtube, instagram, whatsapp) dalam 3 bulan terakhir, tahun 2023 sebesar 65,41%. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas pernah menggunakan internet (termasuk facebook, twitter, youtube, instagram, whatsapp) dalam 3 bulan terakhir sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.18.

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Pernah Menggunakan Internet Tahun 2019 -2023

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki	47,86	12,34	60,98	70,63	71,08
Perempuan	40,32	11,45	52,90	59,39	59,99
Laki + Perempuan	44,00	11,88	56,85	64,98	65,41

Sumber : Statistik Kesejahteraan Jawa Tengah, BPS

**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.** Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

- a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

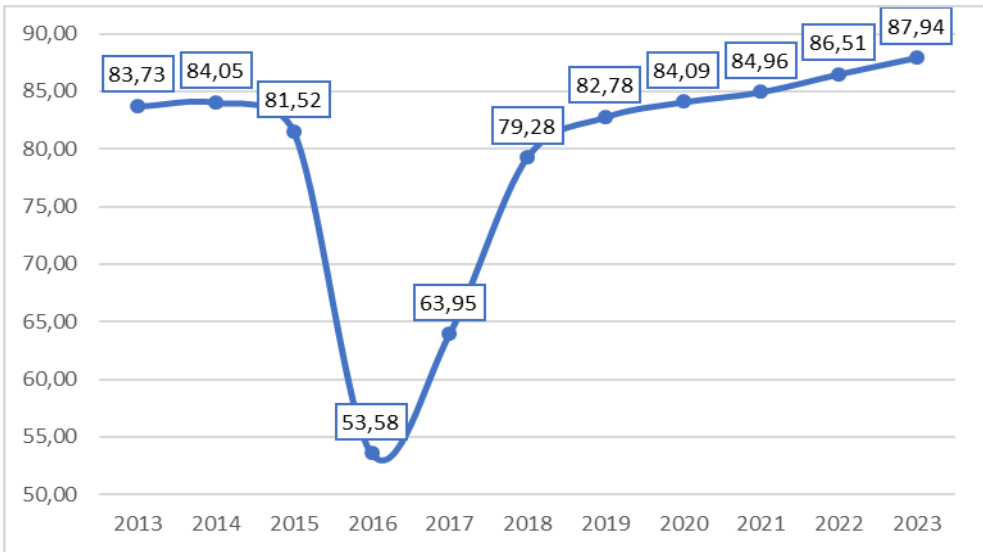
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejak tahun 2019-2023 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2019, jumlah RTLH mencapai 35.738 unit dan turun menjadi 28.166 unit pada tahun awal tahun 2024. Penurunan tersebut utamanya dipengaruhi upaya intervensi penanganan RTLH. Sejak tahun 2019-2023, jumlah RTLH yang diintervensi mencapai 7.572 unit.

Tabel 2.19.  
Jumlah RTLH dan Intervensi Penanganan RTLH Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah RTLH (Unit)	Jumlah Intervensi Penanganan (Unit)
1	2019	35.738	1.308
2	2020	34.430	1.184
3	2021	33.246	680
4	2022	32.566	2.354
5	2023	30.212	2.046
6	Awal 2024	28.166	
Total			7.572

Sumber: Disperkimtaru, Kabupaten Sragen, 2024

**Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap.** Jalan merupakan infrastruktur yang vital dalam pembangunan ekonomi, sampai dengan tahun 2023 jalan mantap di Kabupaten Sragen sebesar 87,94%. Capaian ini perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat. Berikut capaian jalan mantap di Kabupaten Sragen.

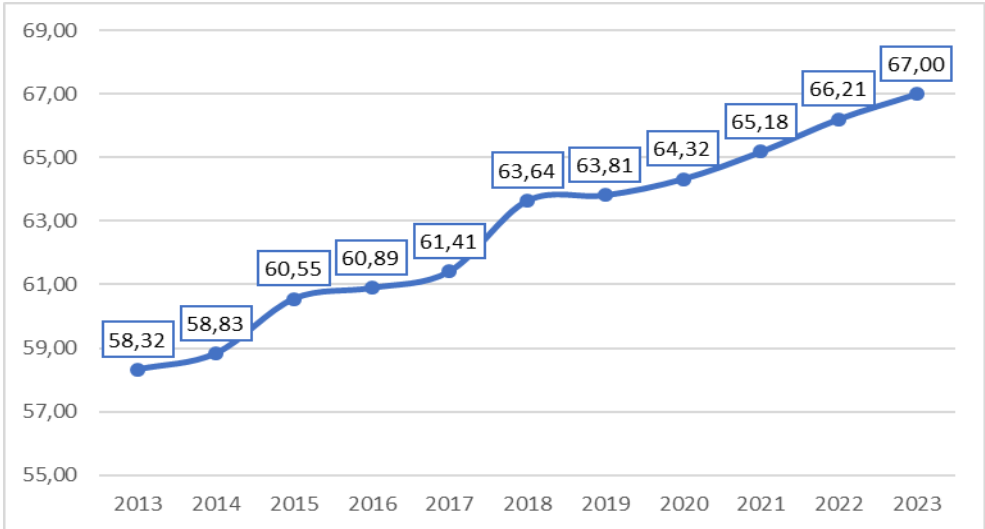


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.53.

Persentase Jalan Mantap Tahun 2013-2023

**Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota** adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten / kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2023 capaiannya sebesar 67%.



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.54.

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten Sragen Tahun 2013-2023

**Drainase.** Drainase di Kabupaten Sragen dibagi menjadi saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier. Rincian drainase di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20.

Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan Sragen

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran *)	Dimensi	
				B**)	H***)
A	SALURAN PRIMER				
1	Jl. Raya Sukowati (Pungkruk - Pilangsari)	Meter	Segi empat	2,25	1,75
2	Sungai Swideran I (Trowong – Bangak)	Meter	Segi empat	5	2,7

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran *)	Dimensi	
				B**)	H***)
3	Sungai Swideran II (Teguh Jajar- 408 timur)	Meter	Segi empat	4	2,5
B	SALURAN SEKUNDER				
1	Jl. Ahmad Yani (Pasar Bunder – Pasar Nglangon)	Meter	Segi empat	2,5	2
2	Jl. Sutomo (Lampu merah Beloran – Ring Road Utara)	Meter	Segi empat	2,5	2
3	Jl. Imam Bonjol ( Toko Komplit – Masjid Raya)	Meter	Segi empat	1,8	1,7
4	Jl. Ade Irma Suryani (Lampu merah alun – alun – Peking)	Meter	Segi empat	1,5	1,5
5	Jl Yos Sudarso (Toko Pojok – Peking)	Meter	Segi empat	1,5	1,4
6	Jl. Katamso (Depan DKK – Makam Mending)	Meter	Segi empat	1,5	1,2
7	.Jl. Urip Sumoharjo (LP Lama – Tegalsari)	Meter	Segi empat	1	1,3
8	Jl. Sutoyo (Lampu merah terminal lama – Perikanan)	Meter	Segi empat	1	1,4
9	Jl HOS Cokroaminoto (Lampumerah terminal lama-lampu merah teguhan)	Meter	Segi empat	2	1,5
10	Jl. Veteran (Perempatan alun-alun – Ponidin)	Meter	Segi empat	2	1,5
11	Jl. Setia Budi (Pertigaan SD 4 – Perempatan Transito)	Meter	Segi empat	2	1,5
12	Jl. Ronggowarsito (RM Salsa – Jl Sukowati	Meter	Segi empat	0,8	1,2
13	Jl. Sultan Agung (Utara Rel Kereta Api Teguhan-Sragen Dok)	Meter	Segi empat	1,25	1,3
14	Jl Suharto Sudirman (Ring Road SMP 6 _ Nglorog)	Meter	Segi empat	1,7	1,5
15	.Jl. Piere Tendean (Pom Bensin SMA 1 – Ring Road Utara)	Meter	Segi empat	1	1,2
16	Jl. DI Panjaitan (Soto Gimo – Ringinanom)	Meter	Segi empat	1	1,1
17	Jl Letjen Suprpto (BRI – MTSn)	Meter	Segi empat	0,9	1,2
18	.JL. KS Tubun (Poltas – SMP 5)	Meter	Segi empat	0,9	1,2
19	Wahid Hasyim (Kuwungsari – Tegalsari)	Meter	Segi empat	0,7	0,8
20	Jl. Gatot Subroto (dari Jl. Ade Irma Suryani – 408 Barat)	Meter	Segi empat	1,25	1,5
21	Jl. Slamet Riyadi (Belakang Dispenda – Perumahan Tegalsari)	Meter	Segi empat	1,25	1,5
22	Jl. RA Kartini (Lampu merah teguhan – Mojo)	Meter	Segi empat	1,3	1,4
23	Jl. Agus Salim (Transito – Beloran)	Meter	Segi empat	1,25	1,5
24	Jl. Hasanuddin (Transito – Sukorejo)	Meter	Segi empat	1,3	1,7
25	Jl. Perintis Kemerdekaan (Pom Bensin SMA 1 – Pertigaan Banjar asri)	Meter	Segi empat	1,25	1,3
26	Jl. Sugiyono (LP Timur – asrama 408)	Meter	Segi empat	1,25	1,5
27	Jl. Tentara Pelajar	Meter	Segi empat		
28	Jl. Sindoro	Meter	Segi empat		
29	Jl. Ahmad Dahlan	Meter	Segi empat		
30	Jl. WR. Supratman	Meter	Segi empat		
C	SALURAN TERSIER				
1	Jl. Mawar (RM Lumayan – Asrama 408 Barat )	Meter	Segi empat	0,6	0,9
2	Jl. Anggrek (Tegalsari – SMA 2)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
3	Jl. Flamboyan (Tegalsari – SMP 6)	Meter	Segi empat	0,4	0,7



No	Jenis Prasarana dan Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran *)	Dimensi	
				B**)	H***)
4	Jl. Melati (SMK 2 – Bangunsari)	Meter	Segi empat	0,6	0,9
5	Jl. Kenanga (Dr. Sutomo – Soto Girin)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
6	Jl. Citandui ( Cantel – Ringinanom)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
7	Jl. Cempaka (Ringinanom)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
8	Jl. Kamboja (Ringinanom)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
9	Jl. Dahlia (Tegalsari)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
10	Jl. Juanda (Widoro)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
11	Jl. Kampar (Widoro)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
12	Jl. Sumbawa (Widoro)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
13	Jl. Mentawai (Widoro)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
14	Jl. Nusa Barong (Widoro)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
15	Jl. Nusa Penida (Widoro)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
16	Jl. Nusa Penida II (Widoro)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
17	Jl. Sumba (Widoro)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
18	Jl. Sulawesi (Widoro)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
19	Jl. Lombok (Widoro)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
20	Jl. Bangka (Widoro)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
21	Jl. Madura (Widoro)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
22	Jl. Bali (Widoro)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
23	Jl. Flores (Widoro)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
24	Jl. Timor (Widoro)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
25	Jl. Maluku (Nglorog)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
26	Jl. Mekar Sari (Nglorog)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
27	Jl. Kalimantan (Krapyak)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
28	Jl. Nias (Kauman)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
29	Jl. Jawa (Kauman)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
30	Jl. Pemuda (Kauman)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
31	Jl. Belitung (Kauman)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
32	Jl. Sumatra (Kauman)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
33	Jl. Siak (Karangdowo)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
34	Jl. Kapuas (Karangdowo)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
35	Jl. Ternate (Karangdowo)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
36	Jl. Tarakan (Karangdowo)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
37	Jl. Natuna (Sragen dok)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
38	Jl. Wahidin (Sragen dok)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
39	Jl. Samosir (Sragen dok)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
40	Jl. Tidar (Sragen dok)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
41	Jl. Semeru (Sragen dok)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
42	Jl. Kasuari (Nglorog)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
43	Jl. Kawi (Gudang Kapuk)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
44	Jl. Karimunjawa (Gudang Kapuk)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
45	Jl. Rajawali (Banjarasri)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
46	Jl. Kakatua (Banjarasri)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
47	Jl. Cendrawasih (Banjarasri)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
48	Jl. Merak (Banjarasri)	Meter	Segi empat	0,5	0,80
49	Jl. Jalak (Banjarasri)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
50	Jl. Parkit (Banjarasri)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
51	Jl. Lawu (Sragen Manggis)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
52	Jl. Sumbing (Sragen Manggis)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
53	Jl. Serayu (Sumengko)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
54	Jl. Eyang Srenggi (Sragen Lor)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
55	Jl. Kantil (Komplek Mojomulyo)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
56	Jl. Pusponyindro (Komplek Mojomulyo)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
57	Jl. Sakura (Komplek Mojomulyo)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
58	Jl. Seruni (Komplek Mojomulyo)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
59	Jl. Wijaya Kusuma (Komplek Mojomulyo)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
60	Jl. Nusa Indah (Komplek Mojomulyo)	Meter	Segi empat	0,5	0,8
61	Jl. Hayam Wuruk (Komplek Mojomulyo)	Meter	Segi empat	0,5	0,8

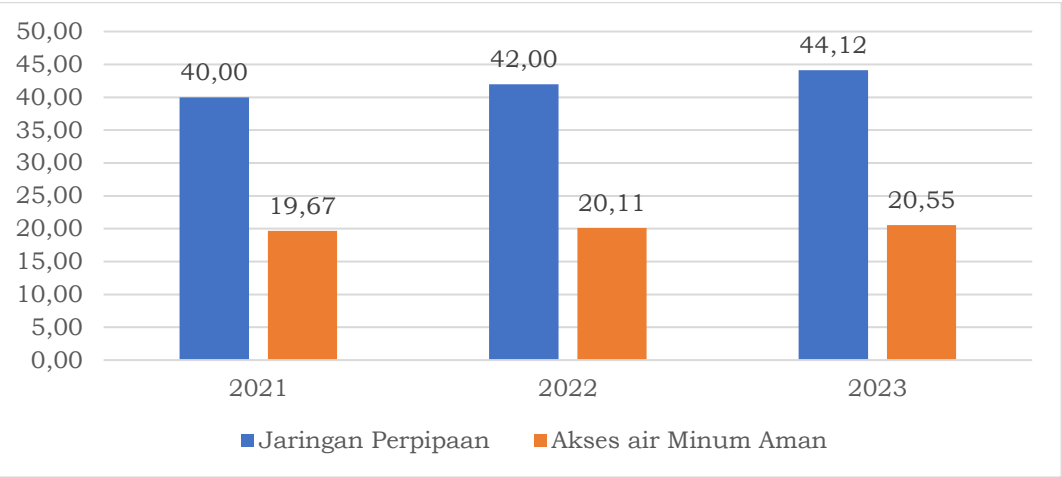
No	Jenis Prasarana dan Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran *)	Dimensi	
				B**) (	H***) (
62	Jl. Ceplok Piring (Komplek Mojomulyo)	Meter	Segi empat	0,4	0,6
63	Jl. Kyai Mojo (Komplek Mojomulyo)	Meter	Segi empat	0,5	0,7
64	Jl. Matahari (Komplek Mojomulyo)	Meter	Segi empat	0,4	0,6

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Sragen, 2021

Secara teknis terdapat permasalahan drainase Kabupaten Sragen yaitu masih adanya saluran drainase yang belum permanen dan masih adanya saluran darainase yang rusak.

**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.** Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Rumah tangga di Kabupaten Sragen dengan akses sanitasi aman pada tahun 2021 sebesar 1,80%, meningkat menjadi 1,91% pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 2,20% pada tahun 2023.

**Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan.** Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Sesuai dengan target air minum nasional 2020-2024 yang pada tahun 2024 menargetkan 15% air minum aman. Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2021 akses air minum aman sebesar 19,67%, meningkat menjadi 20,11% pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 20,55% pada tahun 2023. Akses air minum aman ini tersedia karena adanya penyediaan jaringan perpipaan yang dilakukan oleh PDAM. Sementara itu capaian jaringan perpipaan pada tahun 2021 sebesar 40%, 2022 mencapai 42% dan pada tahun 2023 mencapai 44,12%.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM Kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.55.

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dan Akses Air Minum Aman di Kabupaten Sragen Tahun 2021-2023

### **Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota.**

Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A.

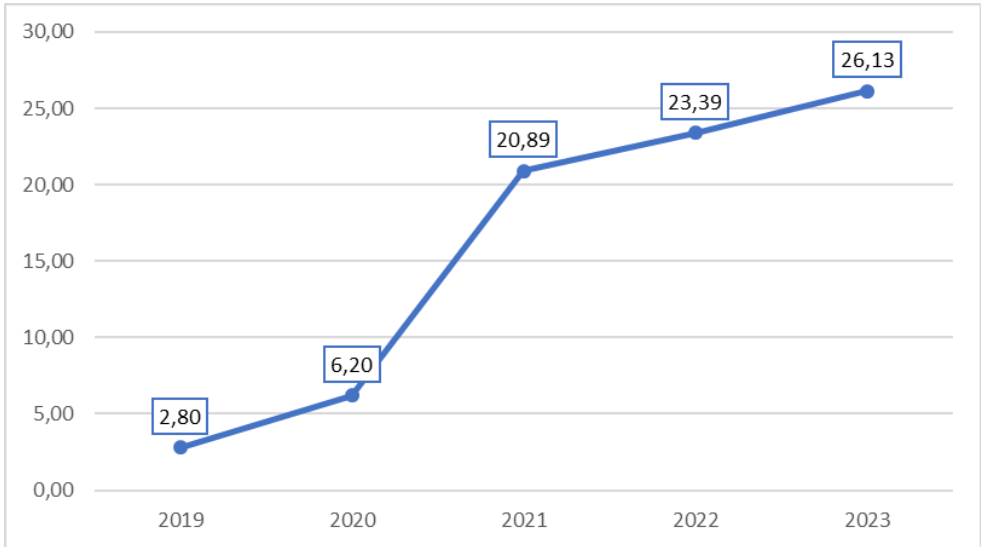
Di Kabupaten Sragen terdapat 104 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan luas area sawah yang dapat dialiri seluas 8.199 Ha. Capaian indeks kinerja sistem irigasi pada tahun 2021 sebesar 58,15 meningkat menjadi 58,54 pada tahun 2022 namun pada tahun 2023 menurun menjadi 58,36.

### **Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.**

Persampahan telah menjadi permasalahan penting di wilayah Kabupaten Sragen, khususnya pada kawasan permukiman perkotaan. Volume sampah yang semakin meningkat, tempat pemrosesan sampah yang semakin sempit dan sulitnya mencari tempat pemrosesan sampah baru merupakan permasalahan utama yang mendesak untuk segera dijadikan alternatif solusinya. Indikator kinerja terkait pengelolaan sampah meliputi: persentase pengurangan sampah, persentase pengangkutan sampah, persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoperasian TPA.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kabupaten Sragen pada tahun 2023 memiliki jumlah timbulan sampah mencapai 595,35 ton/hari atau setara dengan 217.301,22 ton/tahun yang banyak berasal dari sampah rumah tangga. Kondisi penanganan timbulan sampah tersebut sebagai berikut penanganan sampah sebesar 105.945,22 ton/tahun (48, 76%), pengurangan sampah sebesar 46.630,96 ton/tahun (21, 41%) dan sampah tidak terkelola 64.825,04 ton/tahun (29, 83%). Hal yang menjadi perhatian yaitu jumlah sampah tidak terkelola, kedepan harus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dengan menambah TPST dan TPS3R.

Angka timbulan sampah yang terolah adalah penjumlahan dari sampah daur ulang dan sampah terolah. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 2,80% pada tahun 2019 menjadi 26,13% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan upaya dalam mengelola sampah oleh pemerintah dan masyarakat lebih efektif dengan membangun beberapa tempat pengolahan sampah seperti TPS 3R dan TPST serta penambahan armada sampah untuk kelurahan, selain itu kesadaran masyarakat semakin baik dengan banyaknya bank sampah yang didirikan oleh masyarakat.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Tahun 2024

Gambar 2.56.

Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2019-2023 (%)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam pedoman dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bahwa proporsi penyediaan luasan ruang terbuka hijau yaitu sebanyak 30% dari luas seluruh wilayah yang terdiri dari 20% luasan RTH publik dan 10% luasan RTH privat. Berikut kondisi luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21.  
Total Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kabupaten Sragen Tahun 2023

No	Jenis RTH Publik	Jumlah RTH (Titik)	Luas RTH (m2)
1	Taman Kota	61	131.274,67
2	Hutan Kota	15	60.071.258,76
3	Sabuk Hijau	0	-
4	Jalur Hijau Di Jalan	12	42.700.781,95
5	Sempadan Sungai	2	10.629.137,27
6	Sempadan Pantai	0	-
7	Tempat Pemakaman Umum	183	522.430,76
8	Sempadan Rel Kereta Api	3	382.761,99
9	Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi	3	108.472,94
10	Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air	50	2.926.121,48
11	Kebun Bibit	0	-
12	Lain-lain	0	-
	Total RTH Kab/Kota 2023	329	117.472.239,82
	Luas RTH Publik Kab/Kota 2023 (km2)		117,47
	% RTH Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Sragen		11,81

Sumber : SIPSN Semester 2 Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas kondisi RTH publik di Kabupaten Sragen pada Tahun 2022 terdiri dari 12 jenis RTH dengan luasan total sebesar 117,47 Ha dengan tingkat capaian sebesar 11,81 % dari luas wilayah di Kabupaten Sragen.

Tabel 2.22.  
Total Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kabupaten Sragen Tahun 2024

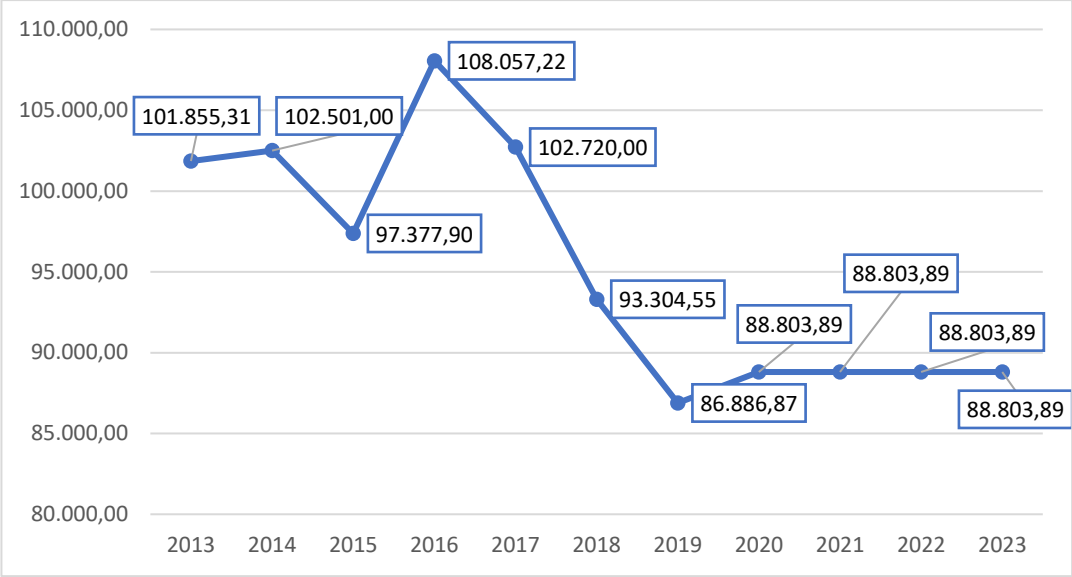
No	Jenis RTH Publik	Jumlah RTH (Titik)	Luas RTH (m2)
1	Taman Kota	61	131.274,67
2	Hutan Kota	16	60.073.258,76
3	Sabuk Hijau	1	5.154.100,00
4	Jalur Hijau Di Jalan	13	43.613.622,80
5	Sempadan Sungai	2	10.629.137,27
6	Sempadan Pantai	0	-
7	Tempat Pemakaman Umum	185	971.091,76
8	Sempadan Rel Kereta Api	3	382.761,99
9	Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi	3	108.472,94
10	Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air	50	2.943.983,48
11	Kebun Bibit	4	31.700,00
12	Lain-lain	289	34.001.853,27
	Total RTH Kab/Kota 2023	627	158.041.256,94
	Luas RTH Publik Kab/Kota 2023 (km2)		158,04
	% RTH Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Sragen		15,89

Sumber : SIPSN Semester 2 Tahun 2023

Tahun 2023 luas RTH publik di Kabupaten Sragen 158,04 Ha dengan tingkat capaian sebesar 15,89 % dari luas wilayah di Kabupaten Sragen, sehingga berdasarkan standar pedoman penyediaan luasan ruang terbuka hijau khususnya untuk publik masih belum terpenuhi sebesar 4,11 %. Pemenuhan luasan RTH ini dapat dilakukan secara bertahap dengan cara pengalokasian lahan publik atau persyaratan tempat usaha dengan menyediakan ruang terbuka hijau dan resapan air. Sedangkan untuk pemenuhan RTH privat minimal 10 % dapat dilakukan dengan pengaturan di intensitas bangunan pada pengajuan perijinan PBG.

**Kontribusi Penurunan Emisi GRK.** Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah. Penurunan emisi GRK di Kabupaten Sragen pada tahun 2013-2023 mengalami penurunan, tahun 2013 sebesar 101.855,31 TonCO2eq menurun menjadi 88.803,89 TonCO2eq pada tahun 2023





Sumber : Aplikasi Aksara Bappenas Tahun 2024

Gambar 2.57.  
Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

**Penanaman Modal** Berdasarkan data jumlah investor, penambahan jumlah investor terbanyak adalah pada tahun 2023, sedangkan penambahan jumlah investor baru paling sedikit terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2023 penambahan investor meningkat sangat pesat, dan investor skala usaha mikro yang mengalami peningkatan paling tinggi jika dibandingkan dengan skala kecil, menengah dan besar. Trend tahunan pertumbuhan jumlah investor mengalami pertumbuhan positif dan fluktuatif dengan pertumbuhan terbesar yakni 151% dan terkecil yakni 125%.

Tabel 2.23.  
Jumlah Investor di Kabupaten Sragen Tahun 2019 – 2023

No	Skala Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Mikro	199	10.980	4.543	8.350	14.685	38.757
2	Kecil	214	2.265	1.217	393	180	4.269
3	Menengah	408	664	287	20	35	1.414
4	Besar	42	22	25	14	20	123
Pertumbuhan			-47,62	13,64	-44,00	42,86	515,00

Ket : \*) Data Sementara  
Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Sragen, 2023

Selanjutnya, berdasarkan tabel Nilai Investasi di Kabupaten Sragen, tahun 2019 sebesar Rp. 1.873.363 juta didominasi usaha skala besar yakni Rp. 911.215 juta dan paling kecil dari usaha skala mikro yakni Rp. 5.192 juta. Pada 2020 penambahan nilai investasi mengalami pelambatan. Sampai dengan akhir 2020 penambahan nilai investasi baru mencapai Rp. 1.980.110 juta, dan naik setiap tahunnya sampai dengan tahun 2023. Pertumbuhan nilai investasi mengalami trend menurun dari 2019 ke tahun 2023.

Tabel 2.24.  
Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Sragen Tahun 2019 – 2023

No	Skala Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mikro	5.192	159.404	79.734	515.331	638.907
2	Kecil	52.566	225.608	206.272	715.775	326.009
3	Menengah	904.390	391.352	498.476	125.473	233.346
4	Besar	911.215	1.203.746	1.328.147	771.237	1.009.946
<b>Jumlah Baru</b>		<b>1.873.363</b>	<b>1.980.110</b>	<b>2.112.629</b>	<b>2.127.816</b>	<b>2.208.208</b>
<b>Pertumbuhan</b>			<b>5,70</b>	<b>6,69</b>	<b>6,69</b>	<b>3,78</b>

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Sragen, 2023

**Kapabilitas Inovasi.** Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Capaian kapabilitas inovasi di Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebesar 1,19 meningkat menjadi 1,99 pada tahun 2023.

**Jumlah Kejadian Konflik SARA** merupakan banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Konflik tersebut dilatar belakangi adanya sekelompok masyarakat yang hidup didaerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Upaya terhadap konflik SARA ada berbagai macam, diantaranya ada tindak pidana yang masuk kedalam tahap penghentian, dan program penguatan pendidikan karakter yang masuk kedalam tahap pencegahan. jumlah kejadian konflik SARA tidak ditemukan pada Tahun 2013-2023.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

**Indeks Reformasi Birokrasi.** Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.

IRB merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Dengan mengukur dan memantau tingkat reformasi birokrasi, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi masalah dan peluang untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Capaian IRB Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebesar 72,00.

Tabel 2.25.  
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,19	60,28	60,36	62,57	72,00

Sumber : Bag. Organisasi Kabupaten Sragen Tahun 2023

**Indeks Reformasi Hukum.** Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Capaian pada tahun 2023 untuk indeks reformasi hukum sebesar 45,99. Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Penilaian IRH dilakukan satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu pemerintah telah berhasil dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Indeks SPBE Kabupaten Sragen sebesar 2,75 dan pada tahun 2020 menjadi 3,35 kemudian sedikit menurun menjadi 3,03 pada tahun 2021, dan naik sedikit menjadi 3,1 pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 4,26 pada tahun 2023. Trend peningkatan ini menunjukkan adanya upaya dalam pengembangan sistem penyiaran berjaringan elektronik.

**Indeks Pelayanan Publik.** Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Capaian tahun 2021 sebesar 3,3, meningkat menjadi 3,78 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 4,06.

**Indeks Integritas Nasional.** Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya

pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Capaian integritas nasional tahun 2022 sebesar 80,6. Hasil indeks survei penilaian integritas tahun 2023 sebesar 80,79.

**Indeks Inovasi Daerah** adalah alat pengukur yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang terjadi di suatu daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan dan mengimplementasikan inovasi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Indeks inovasi daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebesar 70,82, mengalami peningkatan menjadi 84,57 pada tahun 2023.

## 2.5. Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik. Rata-rata hasil capaian indikator sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sragen sebesar 93,09%. Status capaian sasaran pokok RPJPD tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Selain itu keberhasilan pembangunan ditunjukkan oleh capaian indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 20 tahun mengalami peningkatan per tahun sebesar 0,82%, pada tahun 2005 IPM sebesar 66,6 meningkat pada tahun 2022 menjadi 74,65. Angka kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2005 sebesar 24,28% menjadi 12,94% tahun 2022. Angka pengangguran juga mengalami penurunan dari tahun 2007–2022, tahun 2007 sebesar 6,21% menjadi 4,69% pada tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 -2022 fluktuatif cenderung meningkat. Pandemi 2019 – 2022 menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkonstraksi melambat bahkan tahun 2021 mengalami kontraksi negatif. Namun tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,76%. Indikator ketimpangan pendapatan dari tahun 2005 sampai 2022 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan jarak antara pendapatan rendah dengan pendapatan tinggi semakin melebar, tahun 2005 ketimpangan pendapatan sebesar 0,260 menjadi 0,366 pada tahun 2022. PDRB perkapita Kabupaten Sragen dari tahun 2005 sampai 2022 mengalami peningkatan dari 4,07 juta rupiah pada tahun 2005 meningkat menjadi 44,63 juta rupiah pada tahun 2022.

RPJMD 2006-2011 masih bersifat kualitatif sehingga rata-rata capaian kinerja tidak bisa dihitung, namun jika dinilai secara kualitatif maka capaian RPJMD 2006-2011 sudah baik. Hal ini karena capaian dari indikator yang semakin meningkat. Periode RPJMD tahun 2011-2016, capaian kinerja dihitung sampai dengan tahun 2016. Kinerja RPJMD tahun 2011-2016 dihitung dengan capaian dari 55 indikator yang seluruhnya indikator capaiannya sangat tinggi. Rata-rata capaian kinerja RPJMD Periode tahun 2011-2016 sebesar 100,00% dengan kategori sangat tinggi. Periode RPJMD tahun 2016-2021, capaian kinerja dihitung sampai dengan tahun 2021. Kinerja RPJMD tahun 2016-2021 dihitung dengan capaian dari 54 indikator, dimana sebanyak 32 indikator capaiannya sangat tinggi, 9 indikator capaiannya tinggi, 3 indikator capaiannya sedang, 1 indikator capaiannya rendah dan 9 indikator capaiannya sangat rendah. Rata-rata capaian kinerja RPJMD Periode tahun 2016-2021 sebesar 82,27% dengan kategori tinggi. Periode RPJMD tahun 2021-2026, capaian kinerja dihitung sampai dengan tahun 2022. Kinerja RPJMD tahun 2021-2026 dihitung dengan capaian dari 22 indikator, dimana sebanyak 13 indikator

capaiannya sangat tinggi, 8 indikator capaiannya tinggi, 1 indikator capaiannya Sangat Rendah yaitu Tingkat Pengangguran. Rata-rata capaian kinerja RPJMD Periode tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2022 sebesar 92,03% dengan kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi berikut rekomendasi untuk RPJPD periode berikutnya. Peningkatan daya saing manusia dititikberatkan pada peningkatan indeks pembangunan manusia khususnya komponen pendidikan dengan meningkatkan anak usia sekolah untuk bersekolah, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada usia produktif dan lansia. Hal ini harus dilakukan karena berdasarkan proyeksi tahun 2045 jumlah lansia akan semakin meningkat. Penurunan kemiskinan dititikberatkan pada penduduk yang miskin ekstrim dengan memberikan jaminan perlindungan sosial sehingga mengurangi beban biaya hidup penduduk miskin. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan memberikan kompetensi menjadi prioritas ke depan. Peningkatan daya saing ekonomi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas usaha mikro dan industri kecil serta menengah, pemerataan pembangunan antara wilayah utara bengawan Solo dengan wilayah selatan. Pengembangan Kawasan industri di wilayah Sragen yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan sumberdaya lokal dengan mempermudah pelayanan perijinan. Kabupaten Sragen harus mempertahankan produktivitas pertanian dalam arti luas, mengingat sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar ke 3 dalam PDRB. Pembangunan infrastruktur ke depan harus mampu membuka akses dan mendukung pembangunan ekonomi.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dititik beratkan pada peningkatan pengelolaan sampah, penanganan pencemaran udara dan air. Perubahan iklim menjadi isu yang cukup mendapat perhatian saat ini dan kedepan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi tujuan pembangunan 20 tahun yang akan datang. Gerakan dan pemberdayaan kampung proklamasi menjadi salah satu solusi dalam menghadapi perubahan iklim. Pembangunan Kawasan perkotaan yang sehat juga merupakan terobosan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Peningkatan reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan publik yang semakin prima. Pemanfaatan teknologi dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan semakin ditingkatkan. Menjadikan Sragen Kabupaten Cerdas masih menjadi isu yang menarik sampai tahun 2045. Kualitas data menjadi bagian yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembangunan.

## **2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

Perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Hasil proyeksi penduduk membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana layanan dasar sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

### **2.6.1. Proyeksi Kependudukan**

Proyeksi penduduk Kabupaten Sragen merupakan gambaran perkiraan jumlah penduduk dari tahun 2025 hingga tahun 2045 berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dari tahun



2025–2045. Berdasarkan data jumlah penduduk pada tahun 2023 diketahui sebanyak 997.485 jiwa dan meningkat menjadi sebanyak 1.101.172 jiwa pada tahun 2045. Sementara itu rasio penduduk semakin menurun menjadi 97,92 pada tahun 2045, angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 97 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Sragen pada tahun 2045.

Berikut proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2025–2045:

Tabel 2.26.  
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Penduduk Kabupaten Sragen

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	496.948	503.895	518.999	530.987	539.609	544.798
Perempuan	500.537	507.929	524.686	538.765	549.498	556.374
Jumlah	997.485	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Rasio	99,29	99,21	98,92	98,56	98,20	97,92

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

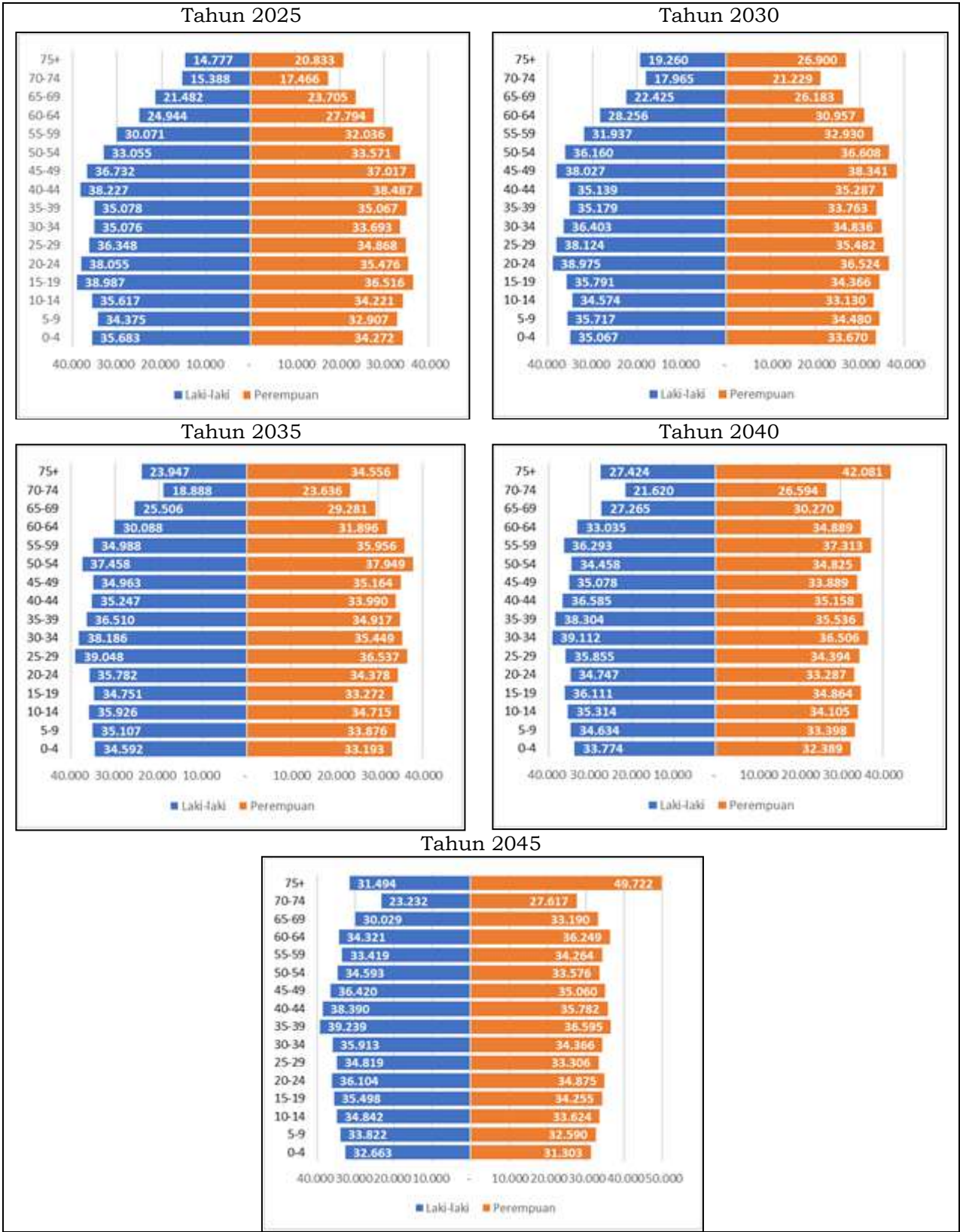
Proporsi penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) di proyeksi akan mengalami penurunan, pada tahun 2023 sebesar 20,93% menjadi 18,06% pada tahun 2045. Hal yang sama akan terjadi pada penduduk usia produktif (15-64 tahun), pada tahun 2023 sebesar 68,53% menjadi 64,21% pada tahun 2045. Sementara proporsi penduduk yang sudah tidak produktif (65 tahun keatas) menjadi semakin besar, pada tahun 2023 sebesar 10,54% menjadi 17,73% pada tahun 2045.

Tabel 2.27.  
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sragen

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-4	68.531	69.955	68.737	67.785	66.163	63.966
5-9	68.054	67.282	70.197	68.983	68.032	66.412
10-14	72.192	69.838	67.704	70.641	69.419	68.466
15-19	75.372	75.503	70.157	68.023	70.975	69.753
20-24	72.542	73.531	75.499	70.160	68.034	70.979
25-29	70.097	71.216	73.606	75.585	70.249	68.125
30-34	68.499	68.769	71.239	73.635	75.618	70.279
35-39	72.866	70.145	68.942	71.427	73.840	75.834
40-44	76.656	76.714	70.426	69.237	71.743	74.172
45-49	71.228	73.749	76.368	70.127	68.967	71.480
50-54	65.462	66.626	72.768	75.407	69.283	68.169
55-59	59.600	62.107	64.867	70.944	73.606	67.683
60-64	51.251	52.738	59.213	61.984	67.924	70.570
65-69	42.826	45.187	48.608	54.787	57.535	63.219
70-74	30.001	32.854	39.194	42.524	48.214	50.849
75+	32.308	35.610	46.160	58.503	69.505	81.216
Jumlah	997.485	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Struktur usia penduduk dapat digambarkan dalam piramida penduduk sebagai berikut



Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Gambar 2.58.

Piramida Penduduk Kabupaten Sragen Tahun Berdasarkan Proyeksi BPS

Angka ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Angka Ketergantungan pada tahun 2023 sebesar 45,92, di proyeksi akan semakin meningkat menjadi 55,74 pada tahun 2045. Hal ini

menunjukkan bahwa pada tahun 2045, 100 penduduk usia produktif menanggung 55 penduduk usia non produktif.

Tabel 2.28.

Proyeksi Proporsi Rasio Ketergantungan Kabupaten Sragen

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	683.573	691.098	703.085	706.529	710.239	707.044
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif(jiwa)	313.912	320.726	340.600	363.223	378.868	394.128
Angka Ketergantungan	45,92	46,41	48,44	51,41	53,34	55,74

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia > 65 tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Sragen telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% pada tahun 2045.

Tabel 2.29.

Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Sragen

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	683.573	691.098	703.085	706.529	710.239	707.044
Jumlah Penduduk (jiwa)	<b>997.485</b>	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Proporsi Penduduk Usia Produktif (%)	68,53	68,30	67,36	66,04	65,21	64,20

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Bonus demografi memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sragen dengan baik. Hal ini berdasarkan tantangan sebagai berikut :

- a. Masalah pengangguran : bonus demografi meningkatkan jumlah penduduk kelompok usia muda. Jika kelompok usia muda kurang berpendidikan dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup maka akan menyebabkan meningkatnya pengangguran kelompok usia muda yang dapat menimbulkan penyakit sosial dan kriminalitas. Salah satu katup pengaman adalah dengan fasilitasi dan peningkatan usaha sektor informal dan perdagangan skala kecil atau PKL.
- b. Meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik : pertumbuhan jumlah penduduk usia muda akan menjadikan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, kesehatan, transportasi dan perumahan dan permukiman serta sarana rekreasi.

- c. Tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal. Jika kurang mencukupi maka akan menyebabkan kapasitas tenaga kerja usia muda kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- d. Kesenjangan pendidikan dengan pasar kerja, hal ini terjadi apabila lulusan sekolah dan mahasiswa tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lowongan diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
- e. Tantangan kesehatan : pertumbuhan penduduk kelompok usia muda menempatkan pada kebutuhan tentang sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dan mewujudkan generasi muda yang sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

Sedangkan keuntungan dan kemanfaatan dengan meningkatnya penduduk usia muda, antara lain sebagai berikut :

- a. Dividen demografi : jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja.
- b. Inovasi dan kreativitas : penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil.
- c. Peningkatan konsumsi : penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
- d. Kekuatan tenaga kerja produktif yang besar dari kelompok usia muda. Meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.
- e. Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
- f. Besarnya kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usia muda.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang dimaksud dengan Lanjut Usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Proses penuaan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi maupun aspek kesehatan. Sebagai dampak dari pembangunan berkelanjutan, penduduk lanjut usia (lansia) terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsi. Perbaikan di bidang kesehatan, akses pendidikan, ketenagakerjaan, kualitas hidup, serta berbagai aspek sosial ekonomi lainnya, telah berpengaruh pada menurunnya angka kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup. Berdasarkan data BPS (2023) di Kabupaten Sragen dari jumlah penduduk sebanyak 997.485 jiwa terdapat sebesar 15,68% kelompok lansia dan di proyeksi akan semakin meningkat tiap tahunnya.

Meningkatnya lansia telah menjadi perhatian dari PBB sejak dasawarsa 2010 dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terkait dengan penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan hidup layak. Penduduk lansia di Kabupaten Sragen telah meningkat sejak tahun 2010, dan berdasarkan proyeksi dari BPS dapat dikemukakan sebagai berikut :



Tabel 2.30.  
Proyeksi Proporsi Penduduk Lansia Kabupaten Sragen

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia lanjut (jiwa)	156.386	166.389	193.175	217.798	243.178	265.854
Jumlah Penduduk (jiwa)	997.485	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Proporsi Penduduk Lansia (%)	15,68	16,44	18,51	20,36	22,33	24,14

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Meningkatnya jumlah lansia memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sragen dengan baik. Tantangan dalam penanganan lansia agar tetap sehat, produktif menghadapi tantangan :

- a. Masalah pengangguran : kelompok lanjut usia menghadapi masalah menganggur dan kurangnya keterampilan.
- b. Banyak lansia yang belum memiliki bantuan sosial dan dana pensiun mandiri (DPLK).
- c. Lansia mengalami sakit, dan masih kurang memadai dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, PHBS dan jaminan sosial belum merata.

Sedangkan peluang dan potensi dalam penanganan lansia dalam mewujudkan lansia sehat dan produktif, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagian besar lansia di Kabupaten Sragen pada umumnya tetap hidup bersama keluarga inti (*nuclear family*) dan juga keluarga besar (*extended family*) dan hubungan persaudaraan dan saling mendukung.
- b. Potensi lansia dapat dioptimalkan dalam kegiatan usaha produktif, sosial keagamaan dan pelatihan keterampilan dari tingkat desa/kelurahan. Potensi lanjut usia baik pendidikan dan pengalaman kerjanya dapat menjadi penggerak dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- c. Terdapat lansia yang tetap produktif melakukan pekerjaan dan usaha, baik dalam usaha pertanian, peternakan dan usaha mikro dan kecil serta perdagangan informal.

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1. Rumah/tempat tinggal

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perubahan di Perkotaan maka telah ditentukan luas minimum rata-rata kebutuhan luas bangunan untuk kebutuhan tempat tinggal dan kegiatan maka luas lantai bagi orang dewasa rata-rata sebesar 9,6 meter<sup>2</sup> dan anak-anak seluas 4,8 meter<sup>2</sup>.

Proyeksi kebutuhan mendasarkan pada satuan keluarga terkecil dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangga di Kabupaten Sragen berdasarkan data DKB Semester II Tahun 2022 rata-rata jumlah Anggota keluarga sebesar 2,90 dengan angka pembulatan (3 orang per KK), yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 1 orang anak, maka kebutuhan luas lantai minimum dihitung sebagai berikut:

- Luas lantai utama : (2x9,6) + (1x4,8) m<sup>2</sup> = 24 m<sup>2</sup>

- Luas lantai pelayanan : 50% x 24 m<sup>2</sup> = 12 m<sup>2</sup>
- Total Luas Lantai : 36 m<sup>2</sup>

Mengacu pada koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kavling minimum untuk keluarga dengan anggota 3 orang dapat dihitung sebagai berikut:

$$L \text{ kav minimum (1 kel: 3 orang)} = \frac{100 \times 36 \text{ m}^2}{50} = 72 \text{ m}^2$$

Proyeksi atas kebutuhan rumah tinggal dengan mengacu pada jumlah rata-rata anggota rumah tangga di Kabupaten Sragen, yaitu sebesar 3 orang per KK, maka proyeksi kebutuhan atas sarana dan prasarana lima tahunan berdasarkan pada proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31.

Proyeksi Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sragen

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	997.485	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Jumlah KK	332.495	337.275	347.895	356.584	363.036	367.057
Standar	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Proyeksi Kebutuhan Rumah	332.495	337.275	347.895	356.584	363.036	367.057
Kebutuhan luas kavling minimum per keluarga (m <sup>2</sup> )	72	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga	23.939.640	24.283.776	25.048.440	25.674.048	26.138.568	26.428.128

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Berdasarkan perhitungan kebutuhan kavling untuk perumahan dan pemukiman diketahui meningkat dari tahun 2025 sebesar 24.283.776 m<sup>2</sup> akan meningkat menjadi sebesar 26.428.128 m<sup>2</sup> pada tahun 2045. Sedangkan proyeksi untuk jumlah rumah menunjukkan hasil pada tahun 2025 sebanyak 337.275 unit meningkat menjadi 367.057 unit di tahun 2045.

2. Air bersih

Penggunaan rata-rata air bersih untuk rumah tangga perkotaan sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup sehat dan menunjang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), baik bagi anak-anak, perempuan dan lanjut usia. Di Indonesia setiap orang sebesar 120 liter/ per orang/ per hari. Penggunaan air bersih terbesar adalah untuk mandi dan kebutuhan lainnya lebih kecil. Berdasarkan panduan tersebut maka dapat dikemukakan proyeksi kebutuhan air bersih (perpipaan) berdasarkan jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 997.485 jiwa dan tahun 2045 meningkat menjadi sebanyak 1.101.172 jiwa. Perincian kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Sragen selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.32.

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sragen

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	997.485	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172



Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih				
		2025	2030	2035	2040	2045
Kebutuhan pemakaian air rata-rata per orang (liter per hari)	120	120	120	120	120	120
Total Kebutuhan pemakaian air seluruh penduduk (liter per hari)	119.698.200	121.418.880	125.242.200	128.370.240	130.692.840	132.140.640

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Berdasarkan proyeksi kebutuhan air bersih maka diketahui pada tahun 2025 sebesar 121.418.880 liter dan akan meningkat menjadi sebesar 132.140.640 liter pada tahun 2045. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan upaya menghemat penggunaan air bersih, mengolah air atau mendaur ulang air dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) agar masyarakat dapat memanfaatkan air bersih secara efisien. Selain itu agar pemenuhan kebutuhan air bersih merata bagi masyarakat diperlukan kebijakan mendukung pengelolaan air, memanen air hujan untuk kepentingan rumah tangga dan pertanian, menghemat air dengan biopori, irigasi tetes, sumur resapan dan pemanfaatan TTG air.

3. Energi/listrik

Kebutuhan listrik baik bagi rumah tangga, kegiatan usaha/ dunia industri (termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, perkantoran dan pelayanan umum semakin penting di masa mendatang. Penyediaan sumberdaya listrik dalam rangka perkembangan industri, pariwisata dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan daya saing daerah dan produktivitas SDM Kabupaten Sragen.

Perhitungan tentang kebutuhan listrik ditentukan dalam perhitungan ini berdasarkan konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita diketahui dari jumlah konsumsi listrik yang digunakan di suatu daerah dibagi jumlah penduduk dalam waktu satu tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik per kapita.

Tabel 2.33.

Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Sragen

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	997.485	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Kebutuhan Listrik Per Individu	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kwh)	123.787.889	125.567.358	129.521.309	132.756.223	135.158.179	136.655.445

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Berdasarkan perhitungan tersebut maka diketahui proyeksi rata-rata kebutuhan listrik di Kabupaten Sragen dari tahun 2025 sebesar 125.567.358 kwh dan meningkat menjadi sebesar 129.521.309 kwh pada tahun 2030 dan tahun 2045 menjadi sebesar 136.655.445 kwh sejalan

dengan perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sragen.

Dalam pembangunan kelistrikan dan semakin meluasnya pemanfaatan energi terbarukan dari penggunaan listrik dari tenaga surya, tenaga angin. Potensi PLTA dan panas bumi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah perkembangan industri peralatan listrik dan elektronika yang hemat energi (seperti lampu LED, TV LED dan penggunaan *power supply* untuk memasok listrik rumah tangga, perkantoran dan peralatan industri hemat energi) menjadikan penggunaan energi listrik semakin hemat.

4. Persampahan

Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri menjadi perhatian penting dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang baik dengan pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) dan perubahan dalam pemanfaatan material dan sumber daya alam menunjukkan perhatian semakin meningkatnya gaya hidup hijau dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan asumsi sampah yang dihasilkan per orang per kapita di Indonesia sebesar 0,5 kg/orang/hari. Berdasarkan jumlah produksi sampah per orang per hari tersebut maka dapat dihitung banyaknya sampah yang dihasilkan penduduk setiap hari sebagai berikut :

Tabel 2.34.  
Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Sragen

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	997.485	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Produksi sampah per orang (kg/orang/hari)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Produksi sampah seluruh penduduk per hari	498.743	505.912	521.843	534.876	544.554	550.586

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Jumlah sampah tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan sampah dengan 3R, juga melakukan penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Target Tahun 2030 tidak ada pembangunan TPA lagi, TPA yang sudah ada masih bisa operasional sampai umurnya habis.

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dibutuhkan adalah :

- a. Tempat sampah/tong sampah individual untuk pewadahan sampah yang terpilah minimal 2 jenis.
- b. Gerobak sampah/motor roda 3 kapasitas minimal 1 m<sup>3</sup> ditingkat RT
- c. TPS 3R skala desa dan sarana prasarananya (2.000 KK)/skala RW (500 KK)
- d. TPST dan sarana prasarananya skala Kecamatan /kawasan

- e. Sarana dan prasarana pengangkut sampah seperti dump truck hidrolis/arm roll truck yang melayani penduduk skala kabupaten
- f. TPAS skala kabupaten melayani penduduk sampai 1 juta jiwa.

5. Sarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan adalah untuk menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat menjadi pelayanan dasar bagi masyarakat. pelayanan kesehatan menjadi pelayanan dasar yang sangat strategis bagi peningkatan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Peran Puskesmas, poliklinik, apotek dan rumah sakit menjadi strategis dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk di masa mendatang menuju pertumbuhan penduduk secara seimbang.

Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan adalah

1. Puskesmas, berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
2. Puskesmas pembantu, berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil.
3. Rumah sakit, merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan kegawatdaruratan.

Kebutuhan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Sragen perlu ditingkatkan sesuai dengan standar dari WHO. Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) suatu wilayah/daerah secara ideal memiliki satu tempat tidur Rumah Sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Sedangkan kebutuhan terhadap sarana kesehatan dihitung berdasarkan pada SNI 03-1733-2004, tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan kota. Berdasarkan pada standar tersebut dapat dihitung sarana kesehatan di Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Tabel 2.35.  
Proyeksi Perhitungan Sarana Kesehatan Berdasarkan Standar WHO

Uraian	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	997.485	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Rumah Sakit							
Jumlah penduduk untuk 1 tempat tidur RS berdasarkan Standar WHO	jiwa	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jumlah Kebutuhan Tempat Tidur RS	TT	1.213	1.012	1.044	1.070	1.089	1.101
Posyandu							
Standar	jiwa		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Uraian	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Kebutuhan Posyandu	unit	1.607	1.610	1.613	1.616	1.619	1.619
<b>Klinik bersalin</b>							
Standar	jiwa		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Klinik bersalin	unit	25	34	35	36	36	37
<b>Puskesmas Pembantu</b>							
Standar	jiwa		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Puskesmas Pembantu	unit	52	34	35	36	36	37
<b>Puskesmas</b>							
Standar	jiwa		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah Kebutuhan Puskesmas	unit	25	8	9	9	9	9
<b>Tempat Praktik Dokter</b>							
Standar	jiwa		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jumlah Kebutuhan Praktik Dokter	unit	69	202	209	214	218	220
<b>Apotik</b>							
Standar	jiwa		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Apotik	unit	140	34	35	36	36	37

Sumber: Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah tempat tidur di rumah sakit di Kabupaten Sragen sudah mencapai standar WHO yaitu sejumlah 1.213 pada tahun 2023. Sedangkan berdasarkan pada SNI 03-1733-2004, tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan kota diketahui bahwa sarana kesehatan pelayanan dasar yaitu Puskesmas Pembantu (klinik kesehatan Pratama dan balai pengobatan) sudah mencukupi. Umlah Puskesmas juga telah mencukupi, sampai dengan tahun 2023 sebanyak 25 unit. Kebutuhan praktik dokter sampai dengan tahun 2023 sebanyak 69 unit yang merupakan klinik pratama dan klinik utama, hal ini perlu adanya penambahan karena masih ada kebutuhan sampai dengan tahun 20245 sebanyak 220 unit. Terakait apotik, jumlahnya sudah mencukupi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemenuhan sarana keehatan yaitu terkait dengan sebaran sarana kesehatan yang harus tersebar kesemua wilayah dan tidak terpusat diwilayah perkotaan saja.

6. Sarana Pendidikan

Pembangunan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas Tahun 2045, sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani penduduk di satuan administrasi

pemerintahan kabupaten/kota baik pendidikan formal dan pendidikan non formal dengan pendidikan inklusif.

Pentingnya meningkatkan sumber daya manusia di masa depan memerlukan dukungan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pendidikan formal dan non formal. Di Kabupaten Sragen banyak terdapat sarana dan prasarana pendidikan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan pondok pesantren yang semua memberikan sumbangan dalam pembangunan sumber daya manusia unggul di masa mendatang.

Sarana pendidikan yang dikemukakan dalam standar ini adalah pendidikan formal yaitu meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD atau taman kanak-kanak), pendidikan tingkat dasar (SD) yang menyelenggarakan pendidikan selama enam tahun. Sekolah menengah pertama (SLTP) yang menyelenggarakan pendidikan selama tiga tahun dan sekolah menengah atas terdiri atas SMA dan SMK yang menyelenggarakan pendidikan selama tiga tahun sejalan dengan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Diharapkan pada tahun 2045 nanti seluruh penduduk telah mencapai tingkat pendidikan sekolah menengah sebagai hasil dari Program Wajib Belajar 12 Tahun sejak tahun 2019.

Sarana pembelajaran lain dapat berupa sarana pendidikan non formal, perpustakaan dan sanggar belajar/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dapat didirikan secara swadaya masyarakat dengan fasilitasi oleh Perangkat Daerah. Perkembangan mutakhir dan pemanfaatan Iptek maka sarana belajar dapat menggunakan jaringan internet secara daring dengan memanfaatkan media sosial (facebook, youtube, tiktok dan lain-lain) serta perpustakaan virtual yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat secara langsung. Dengan pembelajaran secara daring maka pendidikan sepanjang hayat dan inklusif dapat diwujudkan di Kabupaten Sragen.

Sedangkan kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran masing-masing sekolah berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perubahan di Perkotaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.36.

Standart Luas Ruang Minimum dan Luas Lahan Minimum Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m <sup>2</sup> /Jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan Min (m <sup>2</sup> )		Radius Pencapaian	Lokasi Dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-Kanak	1250	216 termasuk rumah penjaga 36 m <sup>2</sup>	500	0,28	500 m <sup>2</sup>	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2000	1,25	1000 m <sup>2</sup>	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4.
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1000 m <sup>2</sup>		Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA, dalam satu kompleks
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3000 m <sup>2</sup>		

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m <sup>2</sup> /Jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan Min (m <sup>2</sup> )		Radius Pencapaian	Lokasi Dan Penyelesaian	
							pusat lingkungan	

Sedangkan sarana dan prasarana masing-masing sekolah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.37.

Standart Luas Ruang Minimum dan Luas Lahan Minimum Sarana Pendidikan SD, SMP dan SMU

P	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar (Rombongan)	Peserta Didik (Siswa)	Luas Ruangan Minimum (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan Minimum (m <sup>2</sup> )
<b>SD/MI</b>	Tipe A	12	480	1.000	3.000
	Tipe B	9	360	633	2.000
	Tipe C	6	240	251	1.000
<b>SLTP/MTS</b>	Tipe A	27	1.080	3.077	9.000
	Tipe B	18	720	2.282	9.000
	Tipe C	9	360	1.502	6.000
<b>SMU</b>	Tipe A	27	1.080	5.233	1 lantai : 15.000
					2 lantai : 9.500
					3 lantai : 7.000
	Tipe B	18	720	3.835	1 lantai : 12.500
					2 lantai : 8.000
					3 lantai : 5.000
	Tipe C	9	360	2.692	10.000

Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk proyeksi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 dengan ketentuan untuk rombongan belajar (rombel) TK sebanyak 40 anak/rombel, SD sebanyak 28 anak/rombel, SMP sebanyak 32 anak/rombel dan SMA sebanyak 36 anak/rombel. menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.38.

Proyeksi Kebutuhan sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 (rombel)

Uraian	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	997.485	1.011.824	1.043.685	1.069.752	1.089.107	1.101.172
Proyeksi Penduduk usia 5-6 Tahun	Jiwa		26.823	28.236	27.429	26.987	26.294
Proyeksi Penduduk usia 7-12 Tahun	Jiwa		81.690	82.616	84.096	82.461	81.007
Proyeksi Penduduk usia 13-15 Tahun	Jiwa		43.392	40.741	41.863	42.189	41.424
Proyeksi Penduduk usia 16-18 Tahun	Jiwa		45.586	41.975	40.643	42.786	41.810
Proyeksi Fasilitas Pendidikan :							
1. TK	Rombel		671	706	686	675	657
2. SD/MI			2.918	2.951	3.003	2.945	2.893



Uraian	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
			2025	2030	2035	2040	2045
3. SMP/MTs			1.356	1.273	1.308	1.318	1.295
4. SMA/MA/SMK			1.266	1.166	1.129	1.188	1.161

Sumber data : Perhitungan Tim Penyusun, 2023

Dari hasil proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat bahwa kebutuhan rombongan belajar dari tahun 2025 sebanyak 671 (TK), 2.918 (SD), 1.356 (SMP) dan 1.266 (SMA) menjadi 657 (TK), 2.893 (SD), 1.295 (SMP) dan 1.161 (SMA) yang kesemuanya menunjukkan adanya penurunan.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Pengembangan Pusat Pertumbuhan merupakan upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah tertentu. Tujuannya adalah memusatkan investasi, sumber daya, dan pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan potensi ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan.

Pusat pertumbuhan ini ditetapkan berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi strategis, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, atau potensi pasar yang besar. Upaya untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ini dapat melibatkan pembangunan jalan, pusat industri, pusat perdagangan, pendidikan, serta layanan kesehatan, yang diharapkan dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sragen tertuang dalam dokumen Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2011. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020, terlihat bahwa sistem perkotaan Kabupaten Sragen terdiri atas: Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kabupaten; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL yang berada di wilayah Kabupaten terdiri atas Kawasan Perkotaan Sragen dan Kawasan Perkotaan Gemolong. Untuk PPK terdiri atas 6 kawasan perkotaan, yaitu Kawasan Perkotaan Sambungmacan; Kawasan Perkotaan Tangen; Kawasan Perkotaan Gondang; Kawasan Perkotaan Kalijambe; Kawasan Perkotaan Masaran; dan Kawasan Perkotaan Sumberlawang. Sedangkan PPL terdiri dari 26 desa, yaitu terdiri dari:

- 1. Desa Tegaldowo berada di Kecamatan Gemolong;
- 2. Desa Purworejo berada di Kecamatan Gemolong;
- 3. Desa Taraman berada di Kecamatan Sidoharjo;
- 4. Desa Karang Jati berada di Kecamatan Kalijambe;
- 5. Desa Jeruk berada di Kecamatan Miri;
- 6. Desa Pendem berada di Kecamatan Miri;
- 7. Desa Pendem berada di Kecamatan Sumberlawang;
- 8. Desa Gawan berada di Kecamatan Tanon;
- 9. Desa Dari berada di Kecamatan Plupuh;
- 10. Desa Pagak berada di Kecamatan Sumberlawang;
- 11. Desa Jati Tengah berada di Kecamatan Sukodono;
- 12. Desa Tanggan berada di Kecamatan Gesi;

13. Desa Banyuurip berada di Kecamatan Jenar;
14. Desa Karangmalang berada di Kecamatan Masaran;
15. Desa Kliwonan berada di Kecamatan Masaran;
16. Desa Mojokerto berada di Kecamatan Kedawung;
17. Desa Saradan berada di Kecamatan Karangmalang;
18. Desa Plosokerep berada di Kecamatan Karangmalang
19. Desa Sambungmacan berada di Kecamatan Sambungmacan;
20. Desa Banaran berada di Kecamatan Sambungmacan;
21. Desa Gabus berada di Kecamatan Ngrampal;
22. Desa Blimbing berada di Kecamatan Sambirejo;
23. Desa Srimulyo berada di Kecamatan Gondang;
24. Desa Dukuh berada di Kecamatan Tangen;
25. Desa Dawung berada di Kecamatan Sambirejo; dan
26. Desa Kedungupit berada di Kecamatan Sragen.

Strategi pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan meliputi:

1. meningkatkan kegiatan pertanian berbasis hortikultura; dan
2. mengembangkan pusat pengolahan dan hasil pertanian pada pusat produksi yang berada di kawasan perdesaan.

Strategi pengembangan kawasan agropolitan meliputi:

1. meningkatkan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian unggulan Kabupaten; dan
2. mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan.

Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif meliputi:

1. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
2. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan lahan sawah irigasi dan/atau lahan kering kurang produktif.

Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi:

1. mengembangkan kawasan industri dengan mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas, terutama yang berskala regional dan nasional;
2. merencanakan pembangunan dry port dengan mempertimbangkan proyek strategis nasional berupa jalan tol dan jalur ganda kereta api;
3. merencanakan kawasan industri dengan mempertimbangkan lokasi rencana pembangunan dry port; dan
4. mengembangkan dan meningkatkan jaringan infrastruktur pada kawasan peruntukan industri;

Strategi pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian adalah mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku hasil pertanian pada kawasan pertanian hortikultura.

Strategi pengembangan pariwisata alam dan buatan meliputi:

1. mengembangkan kegiatan wisata buatan pada Kawasan permukiman;
2. mengembangkan kegiatan wisata untuk mendukung Kawasan Cagar Budaya Sangiran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; dan
3. mengembangkan kegiatan wisata alam dan buatan pada Kawasan pertanian hortikultura dan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kelestarian alam.

Strategi pengembangan prasarana wilayah Kabupaten meliputi:

1. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;

2. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang berada di kawasan perdesaan;
3. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air;
4. mengembangkan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
5. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
6. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan yang berada di Kawasan perkotaan.

Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah meliputi:

1. membagi wilayah fungsional Kabupaten berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten;
2. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL;
3. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL;
4. membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun dan permukiman perdesaan yang berbentuk Klaster;
5. mengembangkan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
6. mengembangkan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi dan desa pusat pertumbuhan; dan
7. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

Strategi pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan meliputi:

1. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK; dan
2. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi Kabupaten ke luar daerah pada PKL.

Strategi peningkatan pelestarian kawasan lindung meliputi:

1. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
2. melakukan pengolahan tanah dengan pola terasering dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi; dan
3. pengembangan budidaya tanaman tahunan pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan meliputi:

1. mendukung penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; dan
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana Pola ruang Kabupaten Sragen berdasarkan Perda No 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan lindung terdiri dari :
  - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - b. kawasan perlindungan setempat;
  - c. Kawasan konservasi;

- d. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;
  - e. Kawasan lindung geologi;
  - f. Kawasan rawan bencana; dan
  - g. Kawasan cagar budaya
2. Kawasan peruntukan budidaya terdiri dari :
- a. Kawasan hutan produksi;
  - b. Kawasan hutan rakyat;
  - c. Kawasan pertanian;
  - d. Kawasan peruntukan industri;
  - e. Kawasan pariwisata;
  - f. Kawasan permukiman; dan
  - g. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah Kawasan Cagar Budaya Sangiran yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sangiran dan sekitarnya. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- 1. Kawasan perkotaan Sragen;
- 2. Kawasan perkotaan Gemolong;
- 3. Kawasan agropolitan; dan
- 4. Kawasan industri Gondang-Sambungmacan dan sekitarnya

Indikasi program/proyek strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah/daerah Kabupaten Sragen berdasarkan pada Perda No 1 tahun 2020. Berikut program utama dalam RTRW Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan tahun 2024-2031

- 1. Perwujudan Struktur Ruang
  - a. Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan
 

Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program:

    - 1) penyusunan rencana detail tata ruang kota di seluruh perkotaan Kabupaten
    - 2) Perencanaan Pengembangan Wilayah PPK
    - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Perdesaan pada Desa pusat pelayanan lingkungan (PPL)
  - b. Perwujudan Sistem Prasarana
    - 1) Sistem Jaringan Transportasi Darat
 

Sistem jaringan transportasi darat dilakukan dengan mewujudkan sistem jaringan jalan melalui program,

      - a) Program penyelenggaraan jalan;
      - b) Pembangunan rest area;
      - c) Program penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan
      - d) Perwujudan sistem prasarana jembatan

Perwujudan sistem prasarana transportasi kereta api melalui program pengelolaan perkeretaapian, yaitu berupa:

Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan, program pengelolaan pelayaran,
    - 2) Sistem Jaringan Energi melalui program pengelolaan minyak dan gas bumi.
    - 3) Sistem Jaringan Telekomunikasi melalui
      - a) pengembangan sistem prasarana jaringan kabel fiber dan pembangunan rumah kabel fiber
      - b) pembangunan menara telekomunikasi (BTS)
      - c) Pembangunan menara bersama berada

- d) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara Bersama
- 4) Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air melalui program pengelolaan sumber daya air.
- 5) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya melalui
  - a) program pengelolaan dan pengembangan SPAM
  - b) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
  - c) Program pengendalian B3 dan Limbah B3
  - d) Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
  - e) Program penanggulangan bencana
  - f) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- 2. Perwujudan Struktur Ruang
  - a. Perwujudan Kawasan Lindung melalui
    - 1) Perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
    - 2) Perlindungan kawasan perlindungan Setempat
    - 3) Perlindungan kawasan konservasi
    - 4) RTH Perkotaan
    - 5) Arahan perlindungan kawasan lindung geologi
  - b. Perwujudan Kawasan Budidaya melalui
    - 1) Perwujudan kawasan hutan produksi
    - 2) Perwujudan kawasan hutan rakyat
    - 3) Perwujudan kawasan pertanian
    - 4) Perwujudan kawasan peruntukan industri
    - 5) Perwujudan kawasan pariwisata
    - 6) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan
    - 7) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan
    - 8) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan
- 3. Perwujudan kawasan strategis yang perlu disusun rencana rinci tata ruang
  - a. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi melalui
    - 1) RDTR Kawasan Perkotaan Sragen
    - 2) RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong
    - 3) Kawasan Agropolitan
    - 4) Kota Industri Gondang- Sambungmacan dan sekitarnya
    - 5) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan wisata situs Purbakala Sangiran

Kabupaten Sragen dilewati jalan tol Solo-Ngawi yang membentang sepanjang 90 km dan menghubungkan Kota Surakarta yang ada di Jawa Tengah dengan Kabupaten Ngawi yang ada di Jawa Timur. Keberadaan ruas tol Solo-Ngawi dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kapasitas jaringan jalan. Selain itu juga meningkatkan produktivitas masyarakat sekitar serta pasar regional dan internasional.

Kabupaten Sragen mempunyai dua gerbang exit tol, yaitu Sragen (di Kecamatan Sidoarjo) dan Sragen Timur (di Kecamatan Sambungmacan). Keberadaan exit tol yang ada di Kecamatan Sidoarjo, mendukung peningkatan industri wilayah Masaran dan Sidoarjo. Sedangkan gerbang tol Sragen Timur yang ada di Kecamatan Sambungmacan, mendukung peningkatan industri di wilayah sambungmacan, dan merupakan rencana pengembangan wilayah Kota Baru. Selain itu masih ada gerbang tol yang



menghubungkan wilayah Sragen dengan Karanganyar, dimana tol tersebut merupakan akses menuju Sangiran dan Kalijambe.

Keberadaan *rest area* di kawasan Masaran dan Sambungmacan, berdampak juga pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Sragen, salah satunya adalah penjualan produk unggulan UMKM Kabupaten Sragen. Namun demikian, dimungkinkan munculnya dampak negatif seperti menurunnya omset penjualan kuliner di sentra kuliner wilayah perkotaan.

## **2.7.2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana**

### **2.7.2.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana dalam dokumen RPJPN 2025-2045**

Dokumen RPJPN menuliskan bahwa wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Hak ini dapat terlihat dari pulau Jawa memberikan kontribusi perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2045 wilayah Jawa juga berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi Wilayah pada kisaran 48,3 persen pada tahun 2045.

Pada tahun 2045, sebagian besar Wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di Wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan market yang sangat potensial dan menjadi demand generator bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan aktivitas ekonomi penumpu utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa (*tertiary sector*).

Kawasan perkotaan juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena market strength-nya (kekuatan pasar). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan consumer goods, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan *multi-infrastructure* dan *maritime backbone* dan *global/major port* yang mumpuni guna menurunkan *logistic dan production cost* dan meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis *green energy* dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global): serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T.

Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.



Ketiga, percepatan pembangunan berbasis Pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan;

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung. Seperti pengembangan infrastruktur konektivitas multi-infrastructure backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar,

Kelima, penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

## 1. Arah Kebijakan Transformasi

### A. Transformasi Sosial

Arah kebijakan transformasi sosial meliputi:

- 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat,
- 2) Pengendalian penyakit menular TBC dan kusta, dan percepatan penurunan seperti stunting pada wilayah dengan beban Tinggi;
- 3) Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal;
- 4) Pendekatan layanan kesehatan lansia;
- 5) Pengembangan sistem rujukan berbasis Kompetensi di Wilayah Jawa;
- 6) Perbaikan kualitas lingkungan sehat di pemukiman kumuh kota;
- 7) Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan Konektivitas transportasi serta sarana Prasarana penanganan limbah medis.
- 8) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
- 9) Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi
- 10) Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- 11) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3
- 12) Pengembangan hubungan pendidikan tinggi global (global higher education hub); peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, serta penguatan kualitas pusat- pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi D berkelas dunia, difokuskan di Megapolitan Jakarta Bandung, Megapolitan Surabaya- Malang. Metropolitan Semarang dan Yogyakarta;
- 13) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan

DUDI: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja.

- 14) Pengentasan kemiskinan di seluruh Wilayah terutama Jawa bagian selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar,
- 15) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas

#### B. Transformasi Ekonomi

Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor “Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi melalui kebijakan:

- 1) Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi-lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Banten. Utara, Kawasan Rebana-Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya,
- 2) Pengembangan beberapa kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor), kawasan strategis industri Bekasi- Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster industri consumer goods dan general manufacture). dan kawasan strategis industri Madiun - Surabaya - Gresik Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia, material/metalurgi, pengolahan maritim/galangan kapal, agroindustri, industri transportasi, dan pengolahan perikanan);
- 3) Pengembangan Industri Jasa Bernilai Tambah Tinggi dan Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi seperti industri maritim, pertanian, otomotif, permesinan dan elektronika;
- 4) Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam. Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (*Cultural Hub and Creative Industry (CCI)*) juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE)* di wilayah-wilayah perkotaan;
- 5) Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan ancillary yang baik, antara lain pada Kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo (*integrasi cultural & heritage tourism, ecotourism*, dan industri/ekonomi kreatif), serta kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & health/medical Megapolitan tourism seperti Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Metropolitan Semarang;
- 6) Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan di Citarum-Cimanuk- Cisanggarung Jratunseluna, Citanduy- Serayu, Bengawan Solo-Brantas, dan Tapal Kuda Jawa Timur, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi

pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih:

- 7) Pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antar wilayah peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi Pertanian yang ramah lingkungan
- 8) Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan pesisir selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy pada perairan-perairan tersebut,
- 9) Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM terkait industri, jasa, pariwisata dan Pertanian, serta kemampuan digital
- 10) Peningkatan kapasitas tenaga kerja Terampil, perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital:
- 11) Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan *Internet of Things* (IoT), Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan *creative financing*:
- 12) Pembentukan lembaga pengelolaan lintas Wilayah (*transboundary management*) dan Lintas pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (*cross prominent stakeholders*) dimulai dengan kota metropolitan Jakarta dan Surabaya,
- 13) Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung:
- 14) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (*global city*), yaitu pada megapolitan Jakarta-Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang, serta pada pusat- pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember

Pembangunan ketenagalistrikan pada keseimbangan regional dengan:

- 1) Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan secara signifikan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik, termasuk pemanfaatan waduk besar untuk pembangunan PLTS Terapung dengan skala cukup besar serta mempertimbangkan pembangunan PLTN Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Wilayah Jawa,
- 2) Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi yang modern dan efisien (*smart grid*) untuk menghubungkan sistem energi terbarukan di Wilayah Jawa serta memastikan pasokan energi listrik yang Stabil dan berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi energi terbarukan bervariasi (*variable renewable energy/VRE*) lebih banyak,
- 4) Mengembangkan sistem penyimpanan energi (*energy storage system/ESS*) untuk mengatasi intermitensi
- 5) Mengembangkan interkoneksi antar wilayah;

- 6) Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik (*electric vehicles*) dalam rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil.

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital antara lain meliputi:

- 1) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan Broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok
- 2) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
- 3) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

#### C. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata Kelola diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat,
- 3) Peningkatan respons terhadap laporan. Pelayanan publik masyarakat,
- 4) Penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah,
- 5) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- 6) Peningkatan pemberantasan pencegahan korupsi dan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
- 7) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

## 2. Arah Kebijakan Landasan Transformasi

### A. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Arah kebijakan Penataan Keuangan Daerah Wilayah Jawa difokuskan pada:

- 1) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
- 2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Nasional
- 3) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

### B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya meliputi:

- 1) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama,
- 2) Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat Wilayah Jawa;

- 3) Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Wilayah Jawa melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan Dukungan bagi pelaku seni dan budaya Lokal untuk mendorong inklusivitas;
- 4) Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian Lokal di Wilayah Jawa;
- 5) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
- 6) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan Dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan Perdagangan manusia,
- 7) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan Keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan: serta
- 8) Penguatan pengarusutamaan gender Dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Jawa.

Arah kebijakan ekologi difokuskan pada pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan ketahanan Masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana.

- 1) Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta.
- 2) Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan;
- 3) Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien;
- 4) Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian;
- 5) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa;
- 6) Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi clean energy untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan;
- 7) Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif,
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi
- 9) Peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan teknologi clean energy dan memperluas akses ke pasar global;
- 10) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
- 11) Peningkatan upaya Pelestarian hutan lindung



- 12) Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di Diantaranya Badak dan Owa Jawa,
- 13) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya Tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona Megathrust di pesisir selatan Wilayah Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah Perkotaan.
- 14) Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat Lokal terhadap ancaman perubahan iklim Seperti rob dan abrasi termasuk Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila dari banjir 100 Tahunan;
- 15) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
- 16) Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa  
Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu:
  - 1) Menambah pasokan air baku untuk Perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa,
  - 2) Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Wilayah Jawa dengan memanfaatkan sumber pendanaan Non-Rupiah Murni,
  - 3) Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai
  - 4) Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila dari Banjir kala ulang 100 tahun;
  - 5) Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan,
  - 6) Penerapan kebijakan Zero Delta Q
  - 7) Pemanfaatan prasarana publik sebagai Bagian dari sistem pengendalian banjir,
  - 8) Pengelolaan wilayah pesisir terpadu Terintegrasi dengan rencana Pengembangan kawasan;
  - 9) Penerapan *Flood Forecasting Early Warning System* (FFEWS) berbasis teknologi digital.

### 3. Kerangka Implementasi Transformasi

#### a. Agenda Prasarana Kewilayahan dan Sarana

Agenda percepatan pembangunan wilayah dan agenda sarana prasarana meliputi:

- 1) Penguatan kerjasama antardaerah dalam Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa:
- 2) Penuntasan. RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut,
- 3) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
- 4) Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di antaranya pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan penyelesaian Pelabuhan Patimban (Jawa Barat) secara terpadu, serta Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) menjadi pelabuhan bertaraf global (global port), serta penguatan pelabuhan lainnya sebagai major port

atau pelabuhan logistik utama seperti Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah);

- 5) Pemanfaatan ALKI I di wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu:
- 6) Peningkatan konektivitas Sumatra-Jawa- Bali, termasuk sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan barang terutama antara Pulau Jawa dan Bali (Gilimanuk- Ketapang) serta antara Pulau Jawa dan Sumatra (Merak-Bakauheni) untuk Menurunkan biaya logistik
- 7) Optimalisasi dan pengembangan bandara utama dimulai dengan Soekarno-Hatta di Banten, Kertajati di Jawa Barat, Yogyakarta International Airport di DIY, Ahmad Yani di Semarang, dan Juanda di Jawa Timur, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan Bandara kargo.
- 8) Pengembangan jalan tol Wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah,
- 9) Pembangunan kereta antarkota termasuk Pengembangan kereta cepat (Jakarta Surabaya) yang terintegrasi dengan. Kereta cepat Jakarta Bandung, serta Pengembangan kereta angkutan barang Terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antarmoda.
- 10) Pengembangan transportasi perkotaan Termasuk sistem angkutan umum massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang Serta kota besar dan kota sedang lain seperti Yogyakarta, Solo, Serang, Cirebon, Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang
- 11) Penguatan kerjasama Wilayah Metropolitan Jakarta dan sekitarnya untuk mendukung fungsi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, Serta kegiatan bisnis nasional dan global Pasca pemindahan ibu kota negara,
- 12) Penurunan ketimpangan antara desa- kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.
- 13) Percepatan pembangunan, optimalisasi/ penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan access to market dan access to information pada kawasan- kawasan afirmasi di Jawa, antara lain Banten Selatan, Jawa Barat Selatan, Madura, dan Pacitan-Trenggalek-Blitar,
- 14) Pengembangan sistem smart grid Ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan seperti PLTA, PLTP, PLTS, hidrogen dan sistem penyimpanan energi serta pengembangan jaringan transmisi interkoneksi dengan Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Wilayah Jawa memiliki tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana yaitu layanan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh dan masih terbatas, khususnya pada wilayah Jawa

bagian Selatan. Untuk itu diperlukan peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar di wilayah tersebut.

Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar lainnya yaitu:

- 1) Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan;
- 2) Optimalisasi lahan, terutama di perkotaan, untuk penyediaan hunian vertikal;
- 3) Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan;
- 4) Pengembangan opsi sewa-milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian;
- 5) Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
- 6) Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;
- 7) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga;
- 8) Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.

b. Kesenambungan Pembangunan

Kebijakan Kesenambungan pembangunan meliputi:

- 1) Sinkronisasi substansi ansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
- 2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
- 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
- 4) Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
- 5) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
- 6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

**2.7.2.2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045**

Arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045 adalah :

1. Dalam rangka mewujudkan perkembangan Kabupaten/Kota yang merata dan berkeadilan, wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Perda 16/2019 dibagi Wilayah Pengembangan (WP) menjadi 8, yaitu: WP Barlingmascakeb, WP Purwomanggung, WP Subosukawonosraten, WP Wanarakuti, Banglor, WP Kedungsepur, WP Petanglong, dan WP Bregasmalang.
2. Pembagian wilayah pengembangan diatas setelah dievaluasi ternyata terdapat Kabupaten/ Kota yang sebenarnya tidak memiliki kesamaan karakteristik perkembangan dengan WP-nya seperti; Kabupaten Kebumen dalam WP Barlingmascakeb, Kabupaten Purworejo dalam WP

Purwomanggung. Kondisi ini dapat menyebabkan akselerasi perkembangan wilayah menjadi terganggu.

3. Arah pengembangan wilayah WP Subosukawonosraten adalah
  - a) menyelaraskan pengembangan Kota Surakarta dan kabupaten disekitarnya;
  - b) Mendorong kerjasama antar daerah dalam hal:
    - 1) pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
    - 2) koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan permukiman di perbatasan Kabupaten/ Kota;
    - 3) penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, pengelolaan limbah;
    - 4) penyediaan ruang terbuka hijau Kota Surakarta dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
    - 5) Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
    - 6) penanganan bencana.
  - c) menerpadukan pembangunan wilayah Perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur;



# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



New Gunung Kemukus Kec. Sumberlawang





## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan uraian pada Bab II, maka rumusan permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

##### 3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Alih fungsi lahan pertanian belum bisa terkendali secara baik yang berdampak pada penurunan produksi dan produktivitas pertanian.
2. Masih adanya kesenjangan pembangunan di wilayah utara dan selatan Sungai Bengawan Solo.
3. Kemandirian, Ketahanan dan Keamanan pangan menjadi permasalahan kedepan. Pemanfaatan lahan yang ada dalam mendorong ketahanan pangan belum optimal, keanekaragaman pangan belum menjadi prioritas dalam mendorong ketahanan pangan.
4. Masih cukup tingginya pertumbuhan penduduk (tahun 2022) sebesar 0,89% terutama disebabkan urbanisasi penduduk kelompok usia muda karena pendidikan dan bekerja di wilayah Kabupaten Sragen.
5. Belum optimalnya Angka Pemakaian Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) di kalangan Pasangan Usia Subur (PUS), yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 69,68%. Hal ini karena kurangnya kesadaran KB, kendala akses pelayanan KB, dan masih adanya perkawinan usia muda.
6. Belum optimalnya pelayanan admindukcapil sehingga masyarakat masih *ditemukan* belum memiliki e-KTP, KK, KIA, akte kelahiran, dan akte kematian.
7. Berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah penduduk, angka kelahiran dan *angka* kematian dapat ditekan, TFR dan angka kematian memiliki perhitungan kecenderungan menurun. Laju pertumbuhan yang terjadi 20 tahun disebabkan oleh migrasi yang tinggi di Kabupaten Sragen sebagai daerah penyangga Solo.
8. Meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada peningkatan jumlah sampah, sementara pengelolaan sampah belum optimal. Selain itu, meningkatnya aktivitas perekonomian akan menjadi penyebab meningkatnya pencemaran, udara, air dan berkurangnya tutupan lahan.

##### 3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi
  - a. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kontribusi sektor perindustrian, pertanian dan pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal.
    - 1) Produktivitas pertanian dalam mendorong kemandirian, ketahanan pangan belum optimal karena: belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkat produksi pertanian; serta belum optimalnya industrialisasi sebagai nilai tambah pada produktivitas pertanian.
    - 2) Produksi Perikanan yang belum optimal. Kabupaten Sragen memiliki potensi perikanan tangkap yaitu di kawasan Waduk Kedungombo dan Bengawan Solo, namun peningkatan produksi perikanan tangkap belum optimal. Perikanan budidaya juga

menjadi potensi unggulan Kabupaten Sragen, namun belum dikelola dengan optimal.

- 3) Potensi pariwisata belum optimal dikembangkan. Kolaborasi pertanian dan pariwisata belum optimal sehingga pengembangan dengan kawasan aglomerasi Solo Raya dalam pembangunan pariwisata belum dapat dioptimalkan.
  - b. Masih ditemukannya pengangguran karena belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan, kompetensi calon tenaga kerja, belum optimalnya kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan dalam konsep pendidikan vokasi dan belum optimalnya perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan.
  - c. Pemenuhan rumah tidak layak huni (tahun 2022) sebesar 87,82 % yang erat keterkaitannya dengan masalah kemiskinan dan kepemilikan sanitasi, dan air bersih yang baik sesuai standar 120 liter/kapita/hari sementara sumber air bersih tersedia (Sungai Bengawan Solo dan anak cabangnya).
  - d. Di Kabupaten Sragen, permasalahan penduduk miskin dan PPKS terkait dengan beberapa faktor antara lain: keterbatasan lapangan pekerjaan, kurangnya akses pendidikan yang berkualitas, kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar, serta rendahnya kesehatan dan sanitasi.
  - e. Masih ditemukannya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan kemiskinan. Penanganan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberian jaminan sosial, serta rehabilitasi masih belum optimal.
  - f. Belum semua desa berkategori mandiri dalam konsep Desa Membangun. Jumlah desa mandiri di Kabupaten Sragen baru 13 desa dari total 196 desa.
  - g. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes untuk mendorong peningkatan ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi yang ada.
  - h. Belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi dan sosial, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur, bisa menjadi langkah-langkah penting untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kemandirian desa di Kabupaten Sragen.
2. Kesejahteraan Sosial Budaya
- a. Kasus gizi buruk dan stunting di Kabupaten Sragen masih ditemukan, hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, kurang maksimalnya 1.000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan anak usia bawah dua tahun (baduta), dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
  - b. Masih tingginya kematian bayi di Kabupaten Sragen, dikarenakan meningkatnya kasus BBLR yang mengakibatkan kehamilan kurang bulan dan kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga mempengaruhi asupan makanan ibu hamil.
  - c. Masih ditemukannya kematian ibu melahirkan, akibat dari kurangnya pemahaman ibu hamil untuk bersalin di Rumah Sakit PONEK, yaitu rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawatdaruratan ibu dan bayi.
  - d. Belum semua masyarakat Kabupaten Sragen masuk dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
  - e. Masih belum optimalnya pengembangan budaya lokal. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya belum memadai. Penyelenggaraan

- kegiatan seni dan budaya masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
- f. Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat.
  - g. Belum optimalnya penanganan dan pengendalian pemukiman padat dan pentingnya penegakan perizinan bangunan.
  - h. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau juga dapat menjadi faktor penting. Beberapa masyarakat miskin mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan atau layanan sosial yang dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, faktor geografis dan infrastruktur yang mungkin terbatas di daerah pedesaan dapat mempersulit akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.
  - i. Masih munculnya penyakit menular dan tidak menular sebagai penyebab kematian. Itu semua disebabkan oleh masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat. Lansia pada 20 tahun ke depan akan mengalami peningkatan, dan masih didominasi penyakit tidak menular pada lansia menjadi perhatian kedepan.
  - j. Angka kematian ibu dan anak serta prevalensi stunting masih menjadi tantangan di Kabupaten Sragen.
  - k. Kesetaraan gender belum dilaksanakan secara optimal baik dalam bidang politik, ekonomi dan pendidikan, Hal ini perlu menjadi perhatian agar meningkatkan upaya *affirmative action*.
  - l. Belum optimalnya perwujudan kabupaten yang layak anak.
  - m. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - n. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya. Pemajuan kebudayaan (cagar budaya, warisan budaya tak benda dan seni) belum menjadi dasar pada pembangunan kebudayaan.
  - o. Belum optimalnya kearsipan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Digitalisasi kearsipan belum optimal.

### 3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Ekonomi Daerah
  - a. Belum memadainya pengelolaan dan SDM koperasi.
  - b. Rendahnya daya saing Usaha Kecil dan Menengah dalam kemampuan inovasi dan kreativitas produk.
  - c. Belum optimalnya sinergitas, kolaborasi dan kontinuitas dalam fasilitasi, peningkatan ketrampilan dan pendampingan terhadap UMKM.
  - d. Belum optimalnya peningkatan produksi pertanian terutama tanaman pangan utama padi, hortikultura, dan tanaman perkebunan terkait dengan belum optimalnya: pemanfaatan teknologi tepat guna bidang pertanian, dan ketergantungan pupuk yang tinggi sementara pupuk kimia semakin mahal dan langka.
  - e. Penggunaan tata ruang yang belum sesuai peruntukannya, terutama pada perwujudan produktivitas pertanian.
  - f. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap serta pembinaan kelompok perikanan tangkap dan teknologi tepat guna.
  - g. Masih rendahnya pemahaman tentang nilai gizi ikan, pangan beragam dan daya beli masyarakat.
  - h. Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan surplus pangan dan penganekaragaman bahan pangan dan pengelolaan bahan pangan agar efisien dengan teknologi sehingga sampah pangan berkurang.

- i. Belum optimalnya peningkatan indeks ketahanan pangan dan pemanfaatan umbi-umbian, ikan, buah-buahan dan sayur mayur.
  - j. Keterbatasan dalam promosi dan pemasaran destinasi pariwisata lokal menghambat peningkatan daya tarik destinasi wisata Kabupaten Sragen.
  - k. Konservasi dan Pengelolaan Destinasi: Perlindungan lingkungan dan konservasi alam di sekitar destinasi wisata adalah hal penting. Keterbatasan dalam pengelolaan dan pemeliharaan destinasi pariwisata bisa menjadi masalah serius.
  - l. Kurangnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan di mana jumlah pasar yang memenuhi persyaratan masih terbatas, yang pada gilirannya kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB mengalami penurunan. Hal ini antara lain karena modernisasi perdagangan (digitalisasi) belum dilaksanakan sehingga belum optimal dalam mendukung potensi ekspor produk unggulan.
  - m. Akses pasar yang kurang memadai sehingga masih banyak produk luar daerah yang masuk ke pasaran Kabupaten Sragen.
  - n. Kurangnya tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri tertentu bisa menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi.
  - o. Belum optimalnya fasilitasi akses modal dan dukungan keuangan. Industri mengalami kesulitan dalam mengakses modal dan dukungan keuangan untuk ekspansi atau inovasi.
  - p. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan untuk perindustrian, belum optimalnya pengembangan sentra sentra industri potensi. Industri pengolahan menjadi penyumbang dalam pertumbuhan ekonomi, namun kualitas dan daya saing pelaku industri masih belum memenuhi kebutuhan pasar.
2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
- a. Aksesibilitas pendidikan yang belum merata, terutama di daerah pedesaan. Keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti jumlah sekolah dan fasilitas pendukung juga bisa menjadi masalah. Selain itu, kualitas pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas juga menjadi perhatian
  - b. Program pengembangan keterampilan dan pelatihan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan mungkin juga perlu ditingkatkan. Selain itu, pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus dan upaya meminimalkan kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan
  - q. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan sosial, budaya dan ekonomi, terutama terkait dengan peningkatan jiwa kewirausahaan, menurunnya minat pemuda dalam bidang pertanian, serta belum optimalnya peran pemuda dalam keolahragaan.
  - c. Kurangnya Keterlibatan masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bisa menjadi kunci keberhasilan. Jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari industri pariwisata, bisa muncul ketidakdukungan yang bisa menghambat pertumbuhan pariwisata.
  - d. Masih adanya kesenjangan antara kualifikasi jabatan yang dibutuhkan (*demand*) dengan minat/bakat dan kemampuan/



kompetensi pencari kerja (*supply*) terkait belum optimalnya perencanaan pelatihan kompetensi sesuai kualifikasi kluster serta belum optimalnya kondisi hubungan industrial.

3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

- a. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur pariwisata seperti transportasi, akomodasi, serta sarana pendukung pariwisata lainnya sehingga menjadi hambatan untuk menarik wisatawan.
- b. Belum optimalnya konektivitas ke arah pusat pertumbuhan ekonomi.
- c. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah yang berdampak pada masih munculnya ketimpangan antar daerah (desa dan kecamatan).
- d. Terdapat kesenjangan antara transportasi konvensional dengan transportasi berbasis *on line*;
- e. Masih ditemukannya infrastruktur jalan dan irigasi yang rusak karena penggunaan melebihi kapasitas yang diperuntukkan serta pengaruh faktor cuaca.
- f. Kebutuhan infrastruktur dasar belum secara merata diakses oleh masyarakat yaitu air bersih dan sanitasi layak dan aman.
- g. Masih ditemukannya rumah tidak layak huni dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat apabila pemenuhan rumah tidak terselesaikan. Pada sisi lain, permasalahan kawasan kumuh juga belum terselesaikan.
- h. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana umum.

4. Daya Saing Iklim Investasi

- a. Belum optimalnya nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Sragen. Dalam rangka meningkatkan minat investasi, perlu menjaga kondusivitas wilayah, salah satunya dengan penegakan perda dan perkara, serta penanganan konflik SARA. Wilayah yang aman dan kondusif akan mampu menjamin kenyamanan berinvestasi.
- b. Belum sinerginya *stakeholder* terkait dalam mewujudkan tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

**3.1.4 Aspek Pelayanan Umum**

- a. Di Kabupaten Sragen, sistem pemerintahan berbasis elektronik masih menghadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah adopsi teknologi yang belum merata di semua lapisan masyarakat atau instansi pemerintah. Ketidakmampuan atau ketidaktahuan dalam menggunakan teknologi dapat menjadi hambatan dalam menerapkan sistem ini secara luas. Pada sisi teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil atau infrastruktur yang kurang mendukung juga bisa menghambat efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- b. Perlunya pengembangan kebijakan yang jelas, pelatihan untuk pegawai pemerintah dalam menggunakan teknologi, investasi dalam infrastruktur teknologi informasi.
- c. Kurang kuatnya keamanan data dan informasi terutama dalam sistem yang melibatkan data sensitif pemerintah dan warga. Langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan data sangat diperlukan. Ancaman dari serangan siber seperti *malware*, *phishing*, atau serangan jaringan bisa menjadi masalah serius jika tidak ditangani dengan tepat. Sistem komputer yang tidak terlindungi

- dengan baik atau kurangnya penggunaan perangkat lunak keamanan bisa membuat data rentan terhadap ancaman.
- d. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
  - e. Belum terciptanya satu data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019.
  - f. Belum optimalnya peran fungsional peneliti dan penulisan karya ilmiah dari OPD.
  - g. Kurangnya kesadaran akan keamanan informasi dan kebijakan keamanan yang jelas. Kebijakan yang kuat dan jelas terkait keamanan informasi di lembaga pemerintah sangat penting. Jika kebijakan tersebut kurang atau tidak terlalu jelas, hal ini bisa membuka celah bagi potensi kerentanan.
  - h. Belum optimalnya kinerja pembinaan kearsipan di OPD, unit kerja dan desa/ kelurahan.
  - i. Petugas yang bersertifikat kearsipan masih (sertifikasi kearsipan) relatif sedikit.
  - j. Belum optimalnya kualitas perencanaan dalam mendorong capaian SAKIP yang lebih baik, meliputi: Evaluasi dan Pengukuran Kinerja; Pelatihan Terkait Etika dan Anti-Korupsi.
  - k. Implementasi reformasi birokrasi belum maksimal.
  - l. Ketersediaan program pelatihan yang terbatas atau kurangnya akses pegawai terhadap pelatihan berkelanjutan bisa menjadi hambatan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
  - m. Kurangnya sistem penilaian kinerja yang Efektif: Sistem evaluasi kinerja yang tidak transparan atau tidak memadai akan menghambat motivasi untuk meningkatkan kompetensi.
  - n. Kurangnya penggunaan teknologi dalam pelatihan. Penggunaan teknologi dalam program pelatihan bisa menjadi terbatas, menyebabkan keterbatasan dalam akses atau kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang terkini.
  - o. Kurangnya kultur inovasi sebagai dukungan untuk ide-ide baru. Inovasi mungkin membuat pegawai enggan untuk meningkatkan kompetensi mereka secara aktif.
  - p. Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat. Belum optimalnya rasio pajak daerah terhadap PAD (tahun 2022 sebesar 0,45%) terutama disebabkan ketaatan wajib pajak dan intensifikasi pajak daerah.
  - q. Belum optimalnya capaian indeks persepsi korupsi.
  - r. Belum optimalnya kapasitas dan keterampilan aparat Desa dalam, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa.
  - s. Belum optimalnya pendamping desa dalam melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa dan pengelolaan keuangan desa
  - t. Pengelolaan sampah belum optimal karena:
    - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah khususnya sampah anorganik. Hal ini karena kebiasaan penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan.

- Belum optimalnya upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang, pemilahan sampah, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai .
- Kurangnya SDM dan sarana prasarana pengangkutan sampah
- Kurangnya sarana prasarana pengolahan sampah yang berbasis 3R
- Ketersediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) yang sesuai dengan kriteria teknis masih terbatas
- u. Selain itu, pencemaran lingkungan dari limbah industri, limbah pertanian, dan limbah domestik juga bisa menjadi masalah serius. Ketersediaan tempat pembuangan akhir yang sesuai dan aman untuk sampah juga bisa menjadi permasalahan, terutama jika tidak ada infrastruktur yang memadai.
- v. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu menurunnya kuantitas patroli siaga ketenteraman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- w. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tanggap bencana.

### 3.2. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis daerah disimpulkan dari : a) isu strategis lingkungan (Isu Global, nasional, dan regional); b) mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai tahun 2045; c) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan d) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa kondisi lingkungan strategis yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan besar (*global megatrend*), sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.1. Megatrend Global 2045

Penjelasan masing-masing kecenderungan besar dikemukakan secara ringkas sebagai berikut ini.

Tabel 3.1  
Isu Strategis Internasional

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
1	Demografi Global	Perkembangan penduduk tahun 2050 diproyeksikan menjadi sebanyak 9,45 milyar jiwa dan proporsi Lansia di Asia (menjadi 55,%); dengan kecenderungan pertumbuhan semakin menurun. Tantangan pembangunan terkait dengan pangan, energi dan air bersih.
2	Geopolitik dan Geoekonomi	Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru dari negara Asia – Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting.
3	Disrupsi Teknologi	Perkembangan Iptek yang pesat, IoT, dan pemanfaatan robotic yang cepat akan menggantikan 40% tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan dengan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK).
4	Urbanisasi Dunia	Jumlah penduduk perkotaan di negara industri baru, dimana 95% berada di perkotaan dan perkembangan Iptek yang memacu pelayanan perkotaan.
5	Perdagangan Internasional	Tantangan perkembangan peningkatan peran negara berkembang, semakin menggantikan peran negara maju. Meningkatnya kerjasama perdagangan intra-Asia terutama Tiongkok, India dan Negara-negara ASEAN.
6	Keuangan Internasional	Perkembangan bank digital, pemanfaatan finansial teknologi dalam keuangan semakin penting dan meningkatkan efisiensi dan semakin pesatnya persaingan antar Lembaga.
7	Kelas Menengah	Meningkatnya jumlah kelas menengah pada tahun 2045 menjadi 90% dari populasi dunia, Proporsi kelas menengah meningkat mendorong meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru terutama di Asia (Tiongkok dan India) serta Negara-negara ASEAN
8	Persaingan Sumberdaya Alam	Tantangan terbatasnya sumberdaya alam, migas, energi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan.

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
9	Perubahan Iklim	Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan tenaga surya dan tenaga bayu.
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	Tantangan dalam pemanfaatan angkasa luar secara bersama-sama dan menjadi ruang strategis dalam pengembangan industri antariksa. Posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan bagi perkembangan masa datang.

2. Isu Strategis Nasional

Dalam RPJPN tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka Panjang nasional yang perlu diperhatikan, meliputi sebagai berikut.

Tabel 3.2

Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3. Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata Di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
9. Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.



Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	<p>a. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi</p> <p>b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya</p> <p>c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.</p>
11. Pembangunan belum berkelanjutan	<p>a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan</p> <p>b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau</p> <p>c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.</p> <p>d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.</p>
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	<p>a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.</p> <p>b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.</p> <p>c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.</p> <p>d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.</p> <p>e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah.</p> <p>f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik.</p> <p>g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.</p> <p>h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.</p> <p>i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.</p> <p>j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta</p>

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	a. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan. f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- a. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- b. Ketahanan pangan yang berkelanjutan
- c. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- d. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.
- e. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.
- f. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat.
- g. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

4. Isu Strategis Kabupaten Sragen

Dalam rangka perumusan isu strategis dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Sragen

ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI	ISU STRATEGIS KAB. SRAGEN
Produktivitas rendah	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas SDM
Kualitas SDM yang makin rendah		
IPTEKIN dan riset lemah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata Kelola Pemerintahan
Deindustrialisasi dini	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Bencana
Pariwisata di bawah potensinya	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat	Kualitas SDM
Ekonomi laut belum optimal	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi
Kontribusi UMKM dan koperasi kecil	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi
Kemiskinan	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat	Kemiskinan
Infrastruktur dan literasi digital rendah	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka
Integrasi Domestik Terbatas		
Hyper Regulation Dan Kualitas Regulasi Rendah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan
Tata Kelola pemerintahan belum optimal		
Kesenjangan Jawa Dan Luar Jawa	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Bencana
Pembangunan belum berkelanjutan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Bencana

Penjelasan masing-masing isu strategis daerah Kabupaten Sragen diuraikan sebagai berikut:

**a. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)**

Kualitas sumberdaya manusia terlihat dari Capaian IPM Kabupaten Sragen tahun 2013 sebesar 69,95 meningkat menjadi 75,10 pada tahun 2023 diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,39 dan IPM nasional sebesar 73,39 pada tahun 2023.

Sumberdaya manusia merupakan kunci kemajuan pembangunan suatu wilayah. Peningkatan SDM dilakukan dengan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perekonomian pada masyarakat. Hal ini akan mewujudkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

**b. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebesar 5,23%. Struktur perekonomian Kabupaten Sragen didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi dan jasa pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen harus didukung oleh potensi lokal, sehingga daerah memiliki ketergantungan yang rendah dengan daerah lain. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena UMKM merupakan pondasi perekonomian baik secara lokal maupun nasional.

Infrastruktur akan mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan tahun 2023 persentase jalan mantap di Kabupaten Sragen sebesar 87,94%. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan mobilisasi masyarakat dalam beraktifitas.

Kondisi infrastruktur pelayanan dasar terlihat dari akses terhadap air bersih dan sanitasi. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan tahun sebesar 19,67%, meningkat menjadi 20,11% pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 20,55% pada tahun 2023. Rumah tangga di Kabupaten Sragen dengan akses sanitasi aman pada tahun 2021 sebesar 1,80%, meningkat menjadi 1,91% pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 2,20% pada tahun 2023.

**c. Kemiskinan**

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2013-2023 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2013 sebesar 15,93% menurun menjadi sebesar 12,79% pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 13,38% dan 13,83%, pada tahun 2022 menurun menjadi 12,94%, pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 12,87%.

Kemiskinan di Kabupaten Sragen disebabkan oleh budaya dan pola pikir masyarakat miskin yang konsumtif seperti membeli

makanan jadi, tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan rendah dan selalu bergantung terhadap pihak lain, Hal ini tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam menangani kemiskinan. Selain itu permasalahan terkait data mikro kemiskinan belum disepakati dan kolaborasi program antar perangkat daerah perlu ditingkatkan

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin. Pengurangan beban masyarakat miskin seperti transportasi, sanitasi dasar, perumahan, kesehatan dan pendidikan belum secara merata diperoleh masyarakat miskin.

Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu antar stakeholder terkait. Hal ini dilakukan agar tuntas sampai ke akar masalah dari kemiskinan. Jika ini dilakukan maka penurunan angka kemiskinan terjadi secara signifikan.

**d. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2013-2023 TPT Kabupaten Sragen cenderung mengalami penurunan dan berada dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. TPT terendah Kabupaten Sragen terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,32%. Namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,75% karena dampak Covid-19. Setelah itu kembali mengalami penurunan sampai tahun 2022 dan menjadi 4,69% dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 3,87%.

Upaya pengurangan pengangguran perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut seperti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, kolaborasi dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri sehingga kompetensi yang diajarkan disekolah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

**e. Tata Kelola Pemerintahan**

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Hasil pengukuran dan pemantauan tingkat reformasi birokrasi, berguna untuk perbaikan dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Capaian IRB Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebesar 72,00.

Reformasi birokrasi bukanlah proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi yang efisien dan dapat dipercaya dapat meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengarah pada pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Survei Penilaian Integritas adalah sebuah instrumen atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat integritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau lingkungan tertentu. Survei semacam



ini dirancang untuk menilai aspek-aspek seperti kejujuran, etika, transparansi, perilaku yang adil, dan kepatuhan terhadap standar etika atau kode etik tertentu. Survei ini biasanya melibatkan serangkaian pertanyaan atau indikator yang ditujukan kepada individu atau kelompok dalam organisasi untuk mengukur persepsi mereka tentang tingkat integritas di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi area-area di mana integritas mungkin kurang atau perlu diperbaiki, serta memperoleh masukan untuk memperbaiki kebijakan, prosedur, atau budaya organisasi yang berkaitan dengan integritas. Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten Sragen tahun 2022 sebesar 80,60 meningkat menjadi 80,79 pada tahun 2023.

Capaian inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebesar 70,82, mengalami peningkatan menjadi 84,57 pada tahun 2023.

**f. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana.**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan. IKLH di Kabupaten Sragen menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 60,46 pada tahun 2021 meningkat menjadi 64,90 pada tahun 2023. Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Pelestarian lingkungan juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

Konflik SARA dilatarbelakangi karena adanya sekelompok masyarakat yang hidup di daerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Upaya terhadap konflik SARA ada berbagai macam, diantaranya ada tindak pidana yang masuk kedalam tahap penghentian, dan program penguatan pendidikan karakter yang masuk kedalam tahap pencegahan. jumlah kejadian konflik SARA tidak ditemukan pada Tahun 2013-2023.

Indeks risiko bencana Kabupaten Sragen dari tahun 2015 sebesar 142 dan tetap 142 sampai 2020, mulai tahun 2021 IRB turun menjadi 133,75 pada tahun 2021, kembali menurun menjadi 126,18 tahun 2022 dan kembali turun menjadi 114,91 pada tahun 2023. Indeks risiko bencana mengukur tingkat risiko terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, badai, dan lainnya. Upaya mitigasi bencana yang efektif akan mengurangi dampak bencana. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas lokal, dalam upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana. Upaya pencegahan bencana, perencanaan darurat, dan reaksi cepat adalah kunci dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat dari risiko bencana yang ada.

Tabel 3.4  
Permasalahan dan Isu strategis

Akar Masalah	Permasalahan	Masalah Pokok (Isu Strategis)	Masalah Utama (Visi)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aksesibilitas pendidikan yang belum merata, terutama di daerah pedesaan. Keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti jumlah sekolah dan fasilitas pendukung juga bisa menjadi masalah. Selain itu, kualitas pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas juga menjadi perhatian.</li> <li>2. Program pengembangan keterampilan dan pelatihan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan mungkin juga perlu ditingkatkan. Selain itu, pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus dan upaya meminimalkan kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan</li> </ol>	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Belum optimalnya kualitas SDM Equity dan Inklusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM belum Unggul dan Bersaing dalam menghadapi industrialisasi 4.0 dan society 5.0</li> <li>2. Nilai nilai budaya yang belum menjadi potensi dalam pemecahan permasalahan pembangunan. Kabupaten Sragen merupakan pusat peradaban masyarakat yang mempunyai nilai nilai budaya nusantara</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasus gizi buruk dan stunting di Kabupaten Sragen masih ditemukan, hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, kurang maksimalnya 1.000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan anak usia bawah dua tahun (Baduta), dan kondisi sosial ekonomi keluarga.</li> <li>2. Masih tingginya kematian bayi di Kabupaten Sragen, dikarenakan meningkatnya kasus BBLR yang mengakibatkan kehamilan kurang bulan dan kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga mempengaruhi asupan makanan ibu hamil</li> <li>3. Masih ditemukannya kematian ibu melahirkan, akibat dari kurangnya pemahaman ibu hamil untuk bersalin di Rumah Sakit PONEK, yaitu rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawatdaruratan ibu dan bayi.</li> <li>4. Belum semua masyarakat Kabupaten Sragen masuk dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional.</li> </ol>	Masih kurangnya derajat kesehatan masyarakat		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum optimalnya pengembangan budaya lokal.</li> <li>2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya belum memadai.</li> <li>3. Penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.</li> <li>4. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya.</li> </ol>	Objek pemajuan kebudayaan yang belum optimal		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih cukup tingginya peningkatan pertumbuhan penduduk (tahun 2022) sebesar 0,89% terutama disebabkan urbanisasi penduduk kelompok usia muda karena pendidikan dan bekerja di Sragen.</li> </ol>	Menurunnya penggunaan kontrasepsi dan bertambahnya PUS < 20 tahun		

Akar Masalah	Permasalahan	Masalah Pokok (Isu Strategis)	Masalah Utama (Visi)
2. Belum optimalnya CPR di kalangan PUS (tahun 2022) sebesar 69,68% terutama kesadaran KB dan akses pelayanan KB dan perkawinan usia muda.			
1. Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat	Belum optimalnya kualitas perpustakaan		
1. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan ekonomi, terutama terkait dengan peningkatan jiwa kewirausahaan.	Masih kurangnya peran kepemudaan dalam pembangunan		
1. Belum memadainya pengelolaan dan SDM koperasi 2. Rendahnya daya saing Usaha Kecil dan Menengah dalam kemampuan inovasi dan kreativitas produk 3. Belum optimalnya sinergitas, kolaborasi dan kontinuitas dalam fasilitasi, peningkatan ketrampilan dan pendampingan terhadap UMKM	Masih terbatasnya kualitas pengelolaan koperasi dan pertumbuhan usaha mikro	1. Belum optimalnya sektor-sektor lapangan usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama pada 3 sektor utama (Industri pengolahan, pertanian dan pariwisata/akomodasi/perdagangan) 2. Masih tingginya pengangguran terbuka.	Daya Saing yang belum optimal pada perekonomian. Sebagai penghasil pertanian terbesar di Jawa Tengah belum mampu mendorong kedaulatan pangan yang optimal, perindustrian pengolahan dan pariwisata masih perlu didorong melalui pengembangan potensi yang dimiliki. Serta daya saing yang belum optimal pada tata Kelola pemerintahan
1. Rendahnya peningkatan sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan, kondisi ini dapat dilihat dari pasar yang memenuhi persyaratan 2. Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB mengalami penurunan. 3. Modernisasi perdagangan (digitalisasi) belum dilaksanakan.	Belum optimalnya sektor perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi		
1. Kurangnya Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil Kurangnya tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri tertentu bisa menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi. 2. Akses pasar yang kurang memadai: Akses pemasaran produk lokal di wilayah Kabupaten Sragen yang kurang baik, seperti produk luar daerah banyak dipasarkan di wilayah Kabupaten Sragen 3. Belum optimalnya fasilitasi Akses Modal dan Dukungan Keuangan Industri mengalami kesulitan dalam mengakses modal dan dukungan keuangan untuk ekspansi atau inovasi.	Belum optimalnya sektor industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi		
1. Menurunnya minat pemuda dalam bidang pertanian. 2. Belum optimalnya peningkatan produksi pertanian terutama tanaman pangan utama padi, hortikultura, dan tanaman perkebunan. 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkat produksi pertanian	Belum optimalnya sektor pertanian dan perikanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi		

Akar Masalah	Permasalahan	Masalah Pokok (Isu Strategis)	Masalah Utama (Visi)
4. Ketergantungan pupuk yang tinggi sementara pupuk kimia semakin mahal dan langka. 5. Belum optimalnya penggunaan pupuk organik, disisi lain harga pupuk kimia semakin mahal. 6. Alih fungsi lahan pertanian yang belum bisa terkendali secara baik. 7. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap. 8. Belum optimalnya pembinaan kelompok perikanan tangkap dan teknologi tepat guna. 9. Masih rendahnya pemahaman tentang nilai gizi ikan, pangan beragam dan daya beli masyarakat			
1. Keterbatasan Infrastruktur Pariwisata: Kurangnya fasilitas dan infrastruktur pariwisata seperti transportasi, akomodasi, serta sarana pendukung pariwisata lainnya bisa menjadi hambatan untuk menarik wisatawan. 2. Promosi dan Pemasaran yang Kurang Efektif: Keterbatasan dalam promosi dan pemasaran destinasi pariwisata lokal dapat menjadi menghambat daya tarik destinasi wisata Kabupaten Sragen. 3. Konservasi dan Pengelolaan Destinasi: Perlindungan lingkungan dan konservasi alam di sekitar destinasi wisata adalah hal penting. Keterbatasan dalam pengelolaan dan pemeliharaan destinasi pariwisata bisa menjadi masalah serius. 4. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Lokal: Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bisa menjadi kunci keberhasilan. Jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari industri pariwisata, bisa muncul ketidak dukungan yang bisa menghambat pertumbuhan pariwisata.	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif		
1. Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan surplus pangan dan penganekaragaman bahan pangan dan pengelolaan bahan pangan agar efisien dengan teknologi sehingga sampah pangan berkurang. 2. Belum optimalnya peningkatan indeks ketahanan pangan (tahun 2022) sebesar 87,53 dan pemanfaatan umbi-umbian, ikan dan buah-buahan dan sayur mayur.	Kedaulatan Pangan dan kerawanan pangan menjadi ancaman tahun 2045		
1. Belum optimalnya nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Sragen. 2. Belum sinerginya stakeholder terkait dalam mewujudkan tertib LKPM	Belum optimalnya investasi di kabupaten Sragen		
1. Belum optimalnya konektivitas ke arah pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah.	Kualitas konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi		

Akar Masalah	Permasalahan	Masalah Pokok (Isu Strategis)	Masalah Utama (Visi)
2. Terdapat kesenjangan antara transportasi konvensional dengan transportasi berbasis on line; 3. Belum terkoneksinya antar wilayah dengan transportasi massal. 4. Kesenjangan pembangunan di wilayah utara dan selatan Sungai bengawan solo	masih kurang sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan		
1. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses untuk memperoleh air bersih yang aman, hal ini karena terbatasnya jaringan air bersih yang disediakan PDAM serta Pamsimas. 2. Masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses sanitasi aman., hal ini karena terbatasnya kapasitas IPLT yang ada. 3. Masih ditemukannya infrastruktur jalan yang rusak yang disebabkan karena penggunaan melebihi kapasitas yang diperuntukkan dan faktor cuaca.	Masih kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur jalan dan air bersih		
1. Masih adanya kesenjangan antara kualifikasi jabatan yang dibutuhkan (demand) dengan minat/bakat dan kemampuan/kompetensi pencari kerja (supply). 2. Masih rendahnya persentase wirausaha baru. 3. Belum optimalnya perencanaan pelatihan kompetensi sesuai kualifikasi kluster; 4. Belum optimalnya kondisi hubungan industrial.	Masih kurangnya kualitas SDM ketenagakerjaan		
1. Masih perlu optimalisasi perekaman wajib KTP-elektronik; 2. Perlu dioptimalkan upaya pemberian Kartu Identitas Anak (KIA); 3. Perlu upaya yang lebih optimal dalam pemberian kepemilikan akta kelahiran penduduk.	Belum semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan	Daya Saing yang Belum Optimal Pada Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang belum akuntabel dan efisien
1. Di Kabupaten Sragen, sistem pemerintahan berbasis elektronik mungkin menghadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah adopsi teknologi yang belum merata di semua lapisan masyarakat atau instansi pemerintah. Ketidakmampuan atau ketidaktahuan dalam menggunakan teknologi dapat menjadi hambatan dalam menerapkan sistem ini secara luas. 2. Kemungkinan masalah teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil atau infrastruktur yang kurang mendukung, juga bisa menghambat efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, perlunya peningkatan keamanan data dan informasi menjadi perhatian utama, terutama dalam sistem yang melibatkan data sensitif pemerintah dan warga. 3. Pengembangan kebijakan yang jelas, pelatihan untuk pegawai pemerintah dalam menggunakan teknologi, investasi dalam	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi		



Akar Masalah	Permasalahan	Masalah Pokok (Isu Strategis)	Masalah Utama (Visi)
<p>infrastruktur teknologi informasi, serta langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan data mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini termasuk peningkatan aksesibilitas teknologi, seperti ketersediaan akses internet yang stabil dan harga yang terjangkau, dapat bisa menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p> <p>4. Belum optimalnya peran fungsional peneliti dan penulisan karya ilmiah dari OPD</p> <p>5. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.</p> <p>6. Belum terciptanya satu data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019.</p> <p>7. Kelemahan Infrastruktur Teknologi: Sistem komputer yang tidak terlindungi dengan baik atau kurangnya penggunaan perangkat lunak keamanan bisa membuat data rentan terhadap ancaman.</p> <p>8. Kurangnya Kesadaran akan Keamanan Informasi: Pelatihan dan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan informasi mungkin kurang di beberapa bagian, memungkinkan celah bagi serangan siber atau tindakan yang tidak aman.</p> <p>9. Kurangnya Kebijakan Keamanan yang Jelas: Kebijakan yang kuat dan jelas terkait keamanan informasi di lembaga pemerintah sangat penting. Jika kebijakan tersebut kurang atau tidak terlalu jelas, hal ini bisa membuka celah bagi potensi kerentanan.</p> <p>10. Ancaman Serangan Siber: Ancaman dari serangan siber seperti malware, phishing, atau serangan jaringan bisa menjadi masalah serius jika tidak ditangani dengan tepat.</p>			
<p>1. Belum optimalnya kinerja pembinaan kearsipan di OPD, unit kerja dan desa/ kelurahan.</p> <p>2. Petugas yang bersertifikat kearsipan masih (sertifikasi kearsipan) relatif sedikit.</p>	Belum optimalnya pengelolaan arsip		
<p>1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dalam mendorong capaian SAKIP yang lebih baik</p> <p>2. Belum optimalnya Evaluasi dan Pengukuran Kinerja:</p> <p>3. Pelatihan Terkait Etika dan Anti-Korupsi:</p> <p>4. Implementasi reformasi birokrasi belum maksimal.</p> <p>5. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan: Ketersediaan program pelatihan yang terbatas atau kurangnya akses pegawai terhadap pelatihan berkelanjutan bisa menjadi hambatan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.</p>	Reformasi birokrasi belum optimal		

Akar Masalah	Permasalahan	Masalah Pokok (Isu Strategis)	Masalah Utama (Visi)
<p>6. Kurangnya Sistem Penilaian Kinerja yang Efektif: Sistem evaluasi kinerja yang tidak transparan atau tidak memadai mungkin menghambat motivasi untuk meningkatkan kompetensi.</p> <p>7. Kurangnya Penggunaan Teknologi dalam Pelatihan: Penggunaan teknologi dalam program pelatihan bisa menjadi terbatas, menyebabkan keterbatasan dalam akses atau kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang terkini.</p> <p>1. Kurangnya Kultur Inovasi: Kurangnya dukungan untuk ide-ide baru dan inovasi mungkin membuat pegawai enggan untuk meningkatkan kompetensi mereka secara aktif.</p> <p>2. Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah (tahun 2022 menjadi sebesar 0,9).</p> <p>8. Belum optimalnya rasio pajak daerah terhadap PAD (tahun 2022 sebesar 0,45%) terutama disebabkan ketaatan wajib pajak dan intensifikasi pajak daerah</p> <p>9. Belum optimalnya capaian indeks persepsi korupsi.</p>			
<p>1. Belum optimalnya kapasitas dan keterampilan aparat Desa dalam, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa.</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan BUMDes untuk mendorong peningkatan ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi yang ada.</p> <p>2. Belum optimalnya pendamping desa dalam melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa dan pengelolaan keuangan desa.</p>	Pemanfaatan potensi lokal dalam pembangunan desa belum optimal		
<p>Pengelolaan sampah belum optimal karena:</p> <p>1. Pengurangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah khususnya sampah anorganik</li> <li>kebiasaan penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan</li> <li>Belum optimalnya upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang, pemilahan sampah, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai</li> </ul> <p>2. Penanganan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya SDM dan sarana prasarana pengangkutan sampah</li> </ul>	Kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah belum optimal	Kualitas lingkungan, Perubahan Iklim dan bencana	Pengelolaan lingkungan yang belum berkelanjutan

Akar Masalah	Permasalahan	Masalah Pokok (Isu Strategis)	Masalah Utama (Visi)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya sarana prasarana pengolahan sampah yang berbasis 3R</li> <li>Ketersediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) yang sesuai dengan kriteria teknis masih terbatas</li> </ul> <p>3. Selain itu, pencemaran lingkungan dari limbah industri, limbah pertanian, dan limbah domestik juga bisa menjadi masalah serius. Ketersediaan tempat pembuangan akhir yang sesuai dan arnan untuk sampah juga bisa menjadi permasalahan, terutama jika tidak ada infrastruktur yang memadai.</p>			
<p>1. Menurunnya patroli siaga ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,</p> <p>2. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.</p> <p>3. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tanggap bencana</p>	<p>1. Penanganan dan pencegahan kriminalitas dan gangguan keamanan ketertiban belum optimal</p> <p>2. Pencegahan dan pengelolaan bencana belum optimal</p>		
<p>1. Belum optimalnya penanganan dan pengendalian pemukiman padat dan pentingnya penegakan perizinan bangunan.</p> <p>2. Pemenuhan rumah tidak layak huni (tahun 2022) sebesar 87,82 % yang erat keterkaitannya dengan masalah kemiskinan dan kepemilikan sanitasi, dan air bersih yang baik sesuai standar 120 liter/ kapita/ hari sementara sumber air bersih tersedia (Sungai Bengawan Solo dan anak cabangnya</p>	Belum optimalnya penanganan dan pengendalian pemukiman padat		
<p>1. Di Kabupaten Sragen, masalah penduduk miskin dan PPKS terkait dengan beberapa faktor. Kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, kurangnya akses pendidikan yang berkualitas, kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar, serta rendahnya kesehatan dan sanitasi.</p> <p>2. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau juga dapat menjadi faktor penting. Beberapa masyarakat miskin mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan atau layanan sosial yang dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, faktor geografis dan infrastruktur yang</p>	Belum optimalnya program jaminan sosial dan perlindungan pada penduduk miskin	Masih tingginya kemiskinan dan ketimpangan gender	Tingkat kesejahteraan masyarakat belum optimal. Masih ditemukannya kemiskinan dan ketimpangan gender

Akar Masalah	Permasalahan	Masalah Pokok (Isu Strategis)	Masalah Utama (Visi)
<p>3. Belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi dan sosial, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur, bisa menjadi langkah-langkah penting untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kemandirian desa di Kabupaten Sragen.</p>			
<p>1. Belum optimalnya penerapan kesetaraan gender dibidang politik, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.</p> <p>2. Kesetaraan gender belum dilaksanakan secara optimal baik dalam bidang politik, ekonomi dan pendidikan, Hal ini perlu menjadi perhatian agar meningkatkan upaya <i>affirmative action</i>.</p> <p>3. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>	<p>Masih terjadinya ketidaksetaraan dan ketimpangan gender</p>		



Secara umum rekomendasi isu strategis KLHS RPJPD telah selaras RPJPD. Berikut rekomendasi isu strategis dari KLHS RPJPD Kabupaten Sragen

Tabel 3.5  
Keselarasan Rekomendasi Isu Strategis KLHS RPJPD dengan Isu Strategis RPJPD

No	Rekomendasi Isu Strategis KLHS RPJPD	Isu Strategis RPJPD
1	Kualitas SDM	Kualitas SDM
2	Kesenjangan Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka
3	Kemiskinan	Kemiskinan
4	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan
5	Alih Fungsi Lahan	Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana.
6	Penurunan Lingkungan Hidup	
7	Adaptasi Perubahan Iklim dan Resilience Kebencanaan	





# BAB IV

# VISI DAN MISI

# DAERAH

**5 Misi**



Gedung Pemda Terpadu Kab. Sragen

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**KABUPATEN SRAGEN**



BAB IV  
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menyatakan bahwa pengertian Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis di daerah. Visi merupakan rumusan yang dapat menggambarkan cita cita yang akan dicapai dan dapat terukur sampai dengan tahun 2045.

Penyusunan Visi Kabupaten didasarkan pada hasil telaah isu strategis, telaah Visi Provinsi dan Nasional. Visi Indonesia 2045 adalah Indonesia Emas 2045 : **Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Negara **Berdaulat** adalah negara yang memiliki ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Negara **Maju** dalam dokumen RPJPN diartikan sebagai negara yang berdaya, modern, inovatif, Tangguh dan adil. Sedangkan negara **Berkelanjutan** adalah Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 adalah **Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan**. Jawa Tengah **Penumpu Pangan dan Industri Nasional** adalah menjadi salah satu kontributor utama pangan serta rantai nilai industri nasional. Jawa Tengah **Maju** adalah berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, inovatif, serta mandiri (Kemampuan daerah mencukupi kebutuhan, mampu memberi kontribusi pihak lain, kerja sama dengan daerah lain serta tangguh mampu menghadapi krisis). Jawa Tengah **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan. Jawa Tengah **Berbudaya** adalah masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor. Jawa Tengah **Berkelanjutan** adalah menjaga kesejahteraan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Hasil permasalahan dan isu strategi kemudian diolah lagi menjadi masalah utama daerah. Masalah utama itulah yang akan menjadi dasar penentuan Visi Daerah. Berikut ini permasalahan pokok yang mendasari tersusunnya Visi Kabupaten Sragen;

Tabel 4.1  
Visi Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Kualitas SDM belum Unggul dan Bersaing dalam menghadapi industrialisasi 4.0 dan society 5.0	MAJU	KABUPATEN SRAGEN BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN
2	Daya Saing yang belum optimal pada perekonomian. Sebagai penghasil pertanian terbesar di Jawa Tengah belum mampu mendorong kedaulatan pangan yang optimal, perindustrian pengolahan dan pariwisata	DAYA SAING	

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
	masih perlu didorong melalui pengembangan potensi yang dimiliki. Serta daya saing yang belum optimal pada tata Kelola pemerintahan		
3	Tingkat kesejahteraan masyarakat belum optimal. Masih ditemukannya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan gender	SEJAHTERA	
4	Nilai-nilai budaya yang semakin luntur akibat perkembangan teknologi. Kabupaten Sragen merupakan pusat peradaban masyarakat yang mempunyai nilai-nilai budaya nusantara dengan tetap menjaga kelestarian benda cagar budaya	BUDAYA	
5	Pengelolaan lingkungan yang belum berkelanjutan	BERKELANJUTAN	
6	Tangguh dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian kuat, andal dan sukar dikalahkan. Kabupaten Sragen yang Tangguh adalah Kabupaten yang memiliki kekuatan pada ekonomi, budaya, sosial dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.	SRAGEN TANGGUH	

Rumusan Visi Kabupaten Sragen berdasarkan masalah utama dan telaah Visi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:  
**SRAGEN TANGGUH 2045: “KABUPATEN SRAGEN BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”**

- Penjelasan Visi Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:
1. Berdaya saing adalah Kabupaten yang kompetitif pada pembangunan Sumberdaya Manusia, tatakelola pemerintahan dan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, pertanian sebagai salah satu pendukung pangan Jawa Tengah, perdagangan dan pariwisata.
  2. Maju adalah Kabupaten yang modern, kreatif dan inovatif.
  3. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar, memiliki pendapatan tinggi serta rendahnya pengangguran dan kemiskinan.
  4. Berbudaya adalah masyarakat yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur berdasarkan falsafah dan ideologi bangsa.

5. Berkelanjutan adalah menjaga kelestarian sumber daya alam, ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, dan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Tabel 4.2

Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Sragen dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Visi RPJPN	Visi RPJPD Kabupaten Sragen
<b>NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KABUPATEN SRAGEN BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN</b>
Berdaulat: Yaitu negara yang memiliki ketahanan, mandiri dan aman	
Maju adalah negara yang berdaya, modern, inovatif, Tangguh dan adil	<b>Maju</b> adalah Kabupaten yang modern, kreatif dan inovatif.
	<b>Berdaya saing</b> adalah Kabupaten yang kompetitif pada pembangunan Sumberdaya Manusia, tatakelola pemerintahan dan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, pertanian sebagai salah satu pendukung pangan Jawa Tengah, perdagangan dan pariwisata.
	<b>Sejahtera</b> adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar, memiliki pendapatan tinggi serta rendahnya pengangguran dan kemiskinan.
	<b>Berbudaya</b> adalah masyarakat yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur berdasarkan falsafah dan ideologi bangsa.
Berkelanjutan: lestari, dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan	<b>Berkelanjutan</b> adalah menjaga kelestarian sumber daya alam, ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, dan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Tabel 4.3

Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Sragen dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Visi RPJPD Kabupaten Sragen
<b>JAWA TENGAH SEBAGAI PENUMPUPANGAN DAN INDUSTRI NASIONAL YANG MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KABUPATEN SRAGEN BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN</b>
Penumpu Pangan dan Industri Nasional : Jawa Tengah menjadi salah satu kontributor utama pangan serta rantai nilai industri nasional	<b>Berdaya saing</b> adalah Kabupaten yang kompetitif pada pembangunan Sumberdaya Manusia, tatakelola pemerintahan dan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, pertanian sebagai salah satu





Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Visi RPJPD Kabupaten Sragen
	pendukung pangan Jawa Tengah, perdagangan dan pariwisata.
<b>Maju</b> Berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, inovatif, serta mandiri (Kemampuan daerah mencukupi kebutuhan, mampu memberi kontribusi pihak lain, kerja sama dengan daerah lain serta tangguh mampu menghadapi krisis)	<b>Maju</b> adalah Kabupaten yang modern, kreatif dan inovatif.
<b>Sejahtera:</b> Suatu kondisi yang menunjukkan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan.	<b>Sejahtera</b> adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar, memiliki pendapatan tinggi serta rendahnya pengangguran dan kemiskinan.
<b>Berbudaya:</b> Masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor	<b>Berbudaya</b> adalah masyarakat yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur berdasarkan falsafah dan ideologi bangsa.
<b>Berkelanjutan:</b> Menjaga kesejahteraan sumber daya alam, ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, dan lingkungan hidup serta ketahanan terhadap risiko bencana	<b>Berkelanjutan</b> adalah menjaga kelestarian sumber daya alam, ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, dan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Pencapaian Kabupaten Sragen Tangguh 2045: Kabupaten Sragen Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi sebagai berikut.

Sasaran pertama, kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Kualitas hidup berkarakter dan berdaya saing dicerminkan dari terjaminnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan layanan dasar yang merata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dari indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat sampai dengan tahun 2045.

Sasaran kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Sasaran tersebut tercermin dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita.

Sasaran ketiga, Kesejahteraan masyarakat yang meningkat, mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 persen. Kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Sasaran keempat, terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan dinamis sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung implementasi pencapaian pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel dan dinamis diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.



Sasaran kelima, kualitas lingkungan yang berkelanjutan mendukung sasaran pembangunan berkelanjutan nasional sekaligus visi yang ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.4  
Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kualitas SDM yang berkarakter dan berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76,25	78,57	81,35	84,57	88,33
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita	Pertumbuhan ekonomi	%	5,86	6,07	6,28	6,48	6,71
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Juta Rupiah/ tahun	56,37	94,66	142,51	190,37	247,8
	Kontribusi PDRB sektor Industri pengolahan	%	42,02	42,16	42,26	42,37	49,45
	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	%	1,77	1,89	2,07	2,26	2,51
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,07	6,02	7,46	9,24	11,95
Kesejahteraan masyarakat yang meningkat	Tingkat kemiskinan	%	11,65-12,07	9,77	6,90	4,02	0,2-0,57
	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	88,67	89,60	90,76	91,93	93,32
Birokrasi yang akuntabel dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,84	67,87	71,66	75,45	80
Kualitas lingkungan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK*)	TonCO2 eq	55.585,65	555.856	4. 986.011	10. 451.076	17.916.140,75

Ket \*) : target bersama berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario ambisius yang ditetapkan oleh Bappenas (provinsi 635.868.955,71) tahun 2045 dari 12,46 juta

Berikut penyelarasan sasaran visi RPJPD Kabupaten Sragen dengan sasaran visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.5  
Penyelarasan Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Sragen dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten/Kota	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
1	2	3	4	5
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita	PDRB Perkapita (Rp Juta)
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Angka)		Pertumbuhan ekonomi (%)
		Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)		Kontribusi PDRB sektor Industri pengolahan (%)

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten/Kota	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
1	2	3	4	5
				Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian
				Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	Kesejahteraan masyarakat yang meningkat	Tingkat Kemiskinan (%)
		Rasio Gini (Angka)		Indeks Ketahanan Pangan (angka)
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)		
3	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi (Angka)	Birokrasi yang akuntabel dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (Angka)	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	Kualitas lingkungan yang berkelanjutan	Penurunan emisi GRK (TonCO2eq)

4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sampai dengan Tahun 2045. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Kriteria rumusan misi adalah:

- 1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
- 2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
- 3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan Misi Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 terhadap Visi Kabupaten Sragen 2045 adalah sebagai berikut:

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Rumusan Misi
1	Kualitas SDM belum Unggul dan Bersaing dalam menghadapi industrialisasi 4.0 dan society 5.0	<b>KABUPATEN SRAGEN BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN</b>	Belum optimalnya kualitas SDM Equity dan Inklusi	SDM YANG BERBUDAYA DAN BERKARAKTER
2	Nilai nilai budaya yang belum menjadi potensi dalam pemecahan permasalahan pembangunan. Kabupaten Sragen merupakan pusat			

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Rumusan Misi
	peradaban masyarakat yang mempunyai nilai nilai budaya nusantara			
3	Daya Saing yang belum optimal pada perekonomian. Sebagai penghasil pertanian terbesar di Jawa Tengah belum mampu mendorong kedaulatan pangan yang optimal, perindustrian pengolahan dan pariwisata masih perlu didorong melalui pengembangan potensi yang dimiliki.		Belum optimalnya sektor-sektor lapangan usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor utama (Industri pengolahan, pertanian, pariwisata/akomodasi dan perdagangan)	PEREKONOMIAN YANG TANGGUH
			Masih tingginya pengangguran	
4	Tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata. Masih ditemukannya kemiskinan		Masih tingginya kemiskinan	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5	Tata Kelola Pemerintahan yang belum akuntabel dan efisien		Daya saing yang belum optimal pada tata kelola pemerintahan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN AKUNTABEL
6	Pengelolaan lingkungan yang belum berkelanjutan		Kualitas lingkungan, Perubahan Iklim dan bencana	LINGKUNGAN KONDUSIF DAN BERKELANJUTAN

Berikut ini Misi dan Pengertian Misi RPJPD Kabupaten Sragen tahun 2025-2045:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter  
Misi ini memiliki pengertian bahwa Sumberdaya Manusia merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan. SDM yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai nilai budaya, kegotongroyongan menjadi tujuan pembangunan. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan budaya dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh  
Misi ini memiliki pengertian bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan pengembangan potensi daerah khususnya bidang pertanian, industri pengolahan dan lapangan usaha potensi dalam PDRB, penguatan infrastruktur dalam mempercepat pembangunan ekonomi, membuka aksesibilitas pada daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan perencanaan pengembangan Kawasan dalam dokumen RTRW. Pembangunan ekonomi ini harus bisa mendorong peran serta seluruh stakeholder (inklusi/kelompok rentan) dan seluruh wilayah. Desa juga memiliki peran dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas dan merata. Pengembangan riset, dan inovasi sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi yang berkualitas.
3. Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif.  
Misi ini memiliki pengertian bahwa peningkatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat meliputi perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender, jaminan sosial dan perlindungan sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan kebutuhan dasar (rumah layak huni, penanganan kumuh) pada penduduk miskin, jaminan keterampilan, kompetensi tenaga dan perlindungan tenaga kerja.



Selain itu peningkatan kemandirian desa juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

- 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel.  
Misi ini memiliki pengertian bahwa tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan dinamis meliputi pengelolaan arsip, implementasi demokrasi substansi, perwujudan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas perencanaan, pemantapan Merit Sistem dan peningkatan pengawasan pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
- 5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan.  
Misi ini memiliki pengertian perwujudan kualitas lingkungan meliputi lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dari pengaruh perubahan iklim meliputi kualitas udara, air dan tutupan lahan. Pengelolaan sampah juga menjadi fokus pada misi ini. Peningkatan jumlah penduduk dan proses produksi dalam pembangunan ekonomi memberikan dampak pada peningkatan produksi sampah. Peningkatan akses pada sanitasi, air bersih juga menjadi fokus pada misi ini. Kualitas lingkungan sosial yang nyaman tanpa kriminalitas adalah fokus pada misi ini. Kabupaten Sragen akan menjadi kabupaten yang tangguh bencana dengan fokus pada penguatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana.

Keterkaitan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJPD Kabupaten Sragen :

Tabel 4.6  
Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dengan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

NO	MISI INDONESIA	MISI JAWA TENGAH	MISI KAB. SRAGEN
1	<b>Transformasi Sosial</b> 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Perlindungan Sosial	Transformasi Sosial	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berbudaya dan Berkarakter
		Ketahanan Budaya	Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif
2	<b>Transformasi Ekonomi</b> 1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 2. Penerapan Ekonomi Hijau 3. Transformasi Digital 4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 5. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh
3	<b>Transformasi Tata Kelola</b> Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang berintegrasi, Tangkas dan Kolaboratif	Transformasi Tata Kelola	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis dan Akuntabel
4	<b>Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi</b>	<b>Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan</b>	Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Kondusif Dan Berkelanjutan

NO	MISI INDONESIA	MISI JAWA TENGAH	MISI KAB. SRAGEN
	1. Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gentar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial 2. Stabilitas Ekonomi Makro 3. Ketangguhan Diplomasi	<b>Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>	
5	<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b> 1. Agama Bermaslahat dan Berbudayaan Maju 2. Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan gender 3. Lingkungan Hidup Berkualitas 4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Kondusif Dan Berkelanjutan
6	<b>Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas</b>	<b>Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</b>	Infrastruktur Menjadi Prioritas Dalam Perwujudan Semua Misi
	<b>Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</b>	<b>Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan</b>	Keterangan: Infrastruktur akan menjadi alat untuk mencapai semua misi. Infrastruktur ada disemua misi
	<b>Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan</b>	<b>Kesinambungan Pembangunan</b>	Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh



# BAB V

## ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

**7 Sasaran Pokok**  
**11 Arah Pembangunan**



Mal Pelayanan Terpadu Kab. Sragen





BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen tahun 2025- 2045 dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan periode 5 (lima) Tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 5.1

Tahapan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sragen diarahkan pada kebijakan **“Penguatan Pondasi Sragen BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”**. Pada tahap ini Kabupaten Sragen melakukan Penguatan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter, Perekonomian yang Tangguh, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel disertai Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan.

- a. **Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berbudaya Dan Berkarakter**, diarahkan pada penguatan pelayanan pendidikan yang inklusif, penguatan pelayanan kesehatan, penguatan karakter dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- b. **Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh**, diarahkan pada penguatan produktivitas dan hilirisasi produk pertanian sebagai penumpu pangan Jawa Tengah, penguatan industri mikro, kecil dan menengah berbasis pada sektor-sektor unggulan daerah, penguatan sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif dan kemudahan

investasi, serta penguatan aksesibilitas, kualitas jalan dan keselamatan transportasi.

- c. **Meningkatkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif**, diarahkan pada penguatan penanganan kemiskinan secara menyeluruh, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.
- d. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Akuntabel**, diarahkan pada Penguatan kapasitas fiskal daerah, pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang adaptif, partisipatif, serta berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko.
- e. **Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Kondusif Dan Berkelanjutan**, diarahkan pada Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, penguatan akses air minum dan sanitasi aman serta kondusivitas wilayah.

#### 5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sragen diarahkan pada kebijakan **“Percepatan Sragen BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”**. Pada tahap ini Kabupaten Sragen melakukan Percepatan Peningkatan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter, Perekonomian yang Tangguh, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel disertai Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan.

- a. **Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berbudaya Dan Berkarakter**, diarahkan pada percepatan pelayanan pendidikan yang inklusif, penguatan pelayanan kesehatan, penguatan karakter dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- b. **Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh**, diarahkan pada percepatan produktivitas dan hilirisasi produk pertanian sebagai penumpu pangan Jawa Tengah, penguatan industri mikro, kecil dan menengah berbasis pada sektor-sektor unggulan daerah, penguatan sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif dan kemudahan investasi, serta penguatan aksesibilitas, kualitas jalan dan keselamatan transportasi.
- c. **Meningkatkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif**, diarahkan pada percepatan penanganan kemiskinan secara menyeluruh, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.
- d. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Akuntabel**, diarahkan pada percepatan kapasitas fiskal daerah, pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang adaptif, partisipatif, serta berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko.
- e. **Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Kondusif Dan Berkelanjutan**, diarahkan pada percepatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, penguatan akses air minum dan sanitasi aman serta kondusivitas wilayah.

### 5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Periode ketiga dari Pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Sragen diarahkan pada kebijakan **“Pemantapan Sragen BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”**. Pada tahap ini Kabupaten Sragen melakukan Pemantapan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter, Perekonomian yang Tangguh, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel disertai Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan.

- a. **Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berbudaya Dan Berkarakter**, diarahkan pada pemantapan pelayanan pendidikan yang inklusif, penguatan pelayanan kesehatan, penguatan karakter dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- b. **Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh**, diarahkan pada pemantapan produktivitas dan hilirisasi produk pertanian sebagai penumpu pangan Jawa Tengah, penguatan industri mikro, kecil dan menengah berbasis pada sektor-sektor unggulan daerah, penguatan sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif dan kemudahan investasi, serta penguatan aksesibilitas, kualitas jalan dan keselamatan transportasi.
- c. **Meningkatkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif**, diarahkan pada pemantapan penanganan kemiskinan secara menyeluruh, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.
- d. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Akuntabel**, diarahkan pada pemantapan kapasitas fiskal daerah, pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang adaptif, partisipatif, serta berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko.
- e. **Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Kondusif Dan Berkelanjutan**, diarahkan pada pemantapan daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, penguatan akses air minum dan sanitasi aman serta kondusivitas wilayah.

### 5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Periode keempat dari Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen diarahkan pada kebijakan **“Perwujudan Sragen BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”**. Pada tahap ini Kabupaten Sragen melakukan Perwujudan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter, Perekonomian yang Tangguh, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel disertai Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan.

- a. **Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berbudaya Dan Berkarakter**, diarahkan pada perwujudan pelayanan pendidikan yang inklusif, penguatan pelayanan kesehatan, penguatan karakter dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- b. **Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh**, diarahkan pada perwujudan produktivitas dan hilirisasi produk pertanian sebagai penumpu pangan Jawa Tengah, penguatan industri mikro, kecil dan menengah berbasis pada sektor-sektor unggulan daerah, penguatan sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif dan kemudahan

investasi, serta penguatan aksesibilitas, kualitas jalan dan keselamatan transportasi.

- c. **Meningkatkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif**, diarahkan pada perwujudan penanganan kemiskinan secara menyeluruh, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.
- d. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Akuntabel**, diarahkan pada perwujudan kapasitas fiskal daerah, pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang adaptif, partisipatif, serta berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko.
- e. **Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Kondusif Dan Berkelanjutan**, diarahkan pada perwujudan daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, penguatan akses air minum dan sanitasi aman serta kondusivitas wilayah.

Secara ringkas, arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2045 sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.1.  
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
2	3	4	5	6	7
<b>Visi SRAGEN TANGGUH 2045: KABUPATEN SRAGEN BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berbudaya Dan Berkarakter</li> <li>2. Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh</li> <li>3. Meningkatkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Inklusif</li> <li>4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Akuntabel</li> <li>5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Kondusif Dan Berkelanjutan</li> </ol>	<b>Penguatan Pondasi Sragen BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN</b> , melalui : Penguatan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter, Perekonomian yang Tangguh, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel disertai Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan	<b>Percepatan Sragen BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN</b> melalui : Percepatan Peningkatan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter, Perekonomian yang Tangguh, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel disertai Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan.	<b>Pemantapan Sragen BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN</b> melalui : Pemantapan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter, Perekonomian yang Tangguh, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel disertai Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan	<b>Perwujudan Sragen BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN</b> melalui : Perwujudan Kualitas SDM yang Berbudaya dan Berkarakter, Perekonomian yang Tangguh, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel disertai Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya Perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan.

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang bersifat progresif.

Sasaran pokok dan arah pembangunan yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 5.2.  
Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Kabupaten Sragen  
Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berbudaya Dan Berkarakter	1. Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik	AP1) Kesehatan untuk semua; AP2) Pendidikan berkualitas yang inklusif dan Pemajuan Kebudayaan
2. Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh	2. Terwujudnya daya saing perekonomian berbasis potensi lokal, industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan pariwisata	AP3) Daya saing perekonomian daerah; AP4) Aksesibilitas jalan berkualitas
3. Meningkatkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Inklusif	3. Terwujudnya perlindungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat	AP5) Perlindungan sosial yang adaptif; AP6) Keluarga berkualitas dan Kesetaraan gender; AP7) Desa mandiri Sejahtera
	4. Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman layak	AP8) Akses perumahan dan permukiman layak

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Akuntabel	5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, dinamis dan akuntabel	AP9) Tata kelola pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif
5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Kondusif Dan Berkelanjutan	6. Terwujudnya Ketahanan Bencana, Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup.	AP10) Ketahanan SDA, Lingkungan hidup, Bencana, Sanitasi dan Air minum.
	7. Terwujudnya kondusivitas wilayah	AP11) Ketenteraman dan ketertiban

Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan, dan indikator kinerjanya lebih rinci dijelaskan sebagai berikut

5.2.1. Sasaran Pokok 1. Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik  
AP1) Kesehatan untuk semua

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Sragen dalam dua puluh tahun kedepan adalah 1) pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara promotif, preventif dan kuratif; 2) penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia produktif dan lanjut usia, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan zoonosis; 3) Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; 4)Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 5) Pengendalian penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, 6) Penanggulangan gizi makro dan mikro, percepatan penanganan masalah stunting dan kelebihan gizi.

AP2) Pendidikan berkualitas yang inklusif dan pemajuan kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan merupakan hal penting dan memiliki peran dalam mewujudkan kualitas masyarakat yang lebih baik, sehingga menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan berbudaya. Kebijakan pendidikan dan kebudayaan Arah kebijakan Kabupaten Sragen untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan pemajuan kebudayaan dalam dua puluh tahun kedepan adalah 1) penguatan pelayanan pendidikan; 2) pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas; 3) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; 4) penyelenggaraan muatan lokal berbasis karakter; 5) percepatan wajib belajar 13 tahun; 6) peningkatan pendidikan non formal dan kesetaraan; 7) peningkatan budaya membaca; 8) peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan; 9) peningkatan nilai nilai budaya Sragen dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan; 10) Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, tradisi dan kearifan lokal; 11) Pemberdayaan kelompok kesenian.

Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Sragen tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.3.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Lebih Baik Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
SP1) Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik	AP1) Kesehatan untuk semua	1. Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	76,23	76,99	77,99	79,49	82,47
		2. Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	14	12	9	6	2
		3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,87	12,55	10,25	7,85	5,78
		4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	92	94,5	97	100
		5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> )	%	90	91	92,25	93,5	95
		6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,83	98,90	99,00	99,25	99,50
	AP2) Pendidikan berkualitas yang inklusif dan pemajuan kebudayaan	7. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
		a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	66, 76	68,56	70,81	73,06	75,53
		b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	82, 25	83,28	84,63	85,98	87,63
		c) Numerasi SD/Sederajat	%	52,49	54,19	62,99	71,79	84,11
		d) Numerasi SMP/Sederajat	%	66,00	68,40	71,40	74,40	80,85
		8. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,33	10,03	10,91	11,79	12,85

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		9. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	14,18	14,90	15,61	16,47
		10. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,20	8,01	9,02	10,04	11,25
		11. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	92,14	100,00	100,00	100,00	100,00
		12. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian	%	5,25	5,92	6,76	7,60	8,60
		13. Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,16	0,72	1,42	2,11	2,95
		14. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	19,38	22,43	26,24	30,06	34,63
		15. Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	91.000	91.400	91.900	92.400	93.000
		16. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	19,99	21,79	24,04	26,30	29,00

### 5.2.2. Sasaran Pokok 2. Terwujudnya daya saing perekonomian berbasis potensi lokal, industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan pariwisata AP3) Daya saing perekonomian daerah

Perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing dilakukan dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan Kabupaten Sragen. Industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan pariwisata dikembangkan berbasis potensi lokal.

#### **Industri pengolahan**

Arah kebijakan terkait industri pengolahan di Kabupaten Sragen dalam dua puluh tahun kedepan adalah 1) penguatan industri kecil dan menengah dengan pengelolaan sentra-sentra industri; 2) Pengembangan industri pengolahan dengan berbasis potensi lokal; 3) pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi dan ramah lingkungan (*Green Economy*); 4). pengembangan kawasan industri; 5) Penguatan integrasi rantai pasok antar industri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri; 6) peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan; 7) penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, 8) digitalisasi industri pengolahan 9) Pengembangan industri pengolahan pertanian dan peternakan.

#### **Perdagangan**

Arah kebijakan terkait perdagangan di Kabupaten Sragen dalam dua puluh tahun kedepan adalah 1) penguatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pergudangan, pasar; 2) efisiensi jalur distribusi perdagangan; 3) perlindungan konsumen dan produsen; 4) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 5) penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah; 6) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat; 7) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing; 8) penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah,

#### **Pertanian**

Pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Sragen. Arah kebijakan terkait pertanian di Kabupaten Sragen dalam dua puluh tahun kedepan adalah 1) Penguatan ketersediaan pangan utama, cadangan pangan, keanekaragaman pangan, dan keamanan pangan; 2) mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pertanian; 3) Peningkatan produktivitas pertanian difokuskan pada peningkatan kualitas benih; 4) peningkatan sarana dan prasarana pertanian; 5) peningkatan kualitas irigasi; 6) penguatan kelompok petani; 7) mengembangkan rekayasa genetik pertanian; 8) pengembangan pertanian organik; 9) kolaborasi hilirisasi produk pertanian; 10) peningkatan peran petani millennial; 11) memperkuat produk pertanian, peternakan dan perikanan; 12) pengembangan pertanian dan peternakan yang berbasis teknologi.

#### **Pariwisata**

Pembangunan pariwisata ke depan menjadi penting untuk peningkatan perekonomian Kabupaten Sragen. Arah kebijakan pariwisata Kabupaten Sragen dalam dua puluh tahun kedepan antara lain 1) mendorong kolaborasi wisata pertanian dan budaya daerah; 2) memperkuat wisata peradaban dunia; 3) penguatan promosi pariwisata berbasis digital; 4) peningkatan kualitas dan sarana prasarana destinasi wisata; 5) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi



daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital; 6) peningkatan infrastruktur konektivitas destinasi wisata; 7) penguatan integrasi destinasi wisata dengan wilayah sekitar; 8) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata; 9) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata; 10) pengembangan dan penguatan ekonomi kreatif dalam rangka mendorong peningkatan pariwisata dan pendapatan masyarakat.

#### **Riset dan Inovasi**

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Penguatan riset dan inovasi akan terus didorong dalam dua puluh tahun ke depan melalui arah kebijakan antara lain 1) penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi mitra pemerintah; 2) penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor; 3) penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi; 4) penguatan relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan; 5) penguatan kerjasama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah; 6) penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

#### **UMKM dan Koperasi**

UMKM dan koperasi memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi global dan nasional. Selain itu UMKM dan Koperasi menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Upaya agar sektor UMKM dan koperasi tetap berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Sragen dua puluh tahun mendatang yaitu dengan arah kebijakan antara lain 1) penguatan koperasi produksi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil; 2) perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam; 3) peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi; 4) penguatan kualitas produk UMKM (pengolahan sampai pengemasan); 5) kemudahan akses permodalan; 6) peningkatan market place (digitalisasi pemasaran); 7) branding produk UMKM; 8) kerjasama pemasaran produk UMKM.

#### **Penanaman Modal dan Tenaga Kerja**

Penanaman modal di Kabupaten Sragen diharapkan meningkatkan kesempatan kerja. Tenaga yang tersedia di Kabupaten Sragen harus memiliki kemampuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam dua puluh tahun ke depan untuk mendorong peningkatan penanaman modal dan produktivitas tenaga kerja antara lain 1) pemberian kemudahan perijinan; 2) pemberian insentif pada investor; 3) Pemberian kepastian berusaha; 4) promosi potensi investasi; 5) penguatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja; 6) sinergitas investasi dengan peningkatan kualitas kompetensi calon tenaga kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan; 7) mendorong kolaborasi antar *stakeholder* dalam peningkatan kapasitas calon tenaga kerja; 8) mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam sekolah vokasi dan perusahaan

#### **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

BUMD memiliki peran dalam perekonomian daerah, salah satunya yaitu pelayanan perbankan. Arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan untuk meningkatkan peran BUMD dalam perekonomian daerah antara lain 1) peningkatan produktivitas BUMD; 2) peningkatan promosi produk perbankan; 3) peningkatan akses layanan perbankan milik kabupaten; 4) peningkatan kebijakan BUMD; 5) menjaga integritas dan kredibilitas BUMD.

**AP4) Aksesibilitas jalan berkualitas**

Upaya dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi daerah yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas jalan yang berkualitas sehingga bisa memperlancar distribusi barang dan jasa keseluruh wilayah. Arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan untuk meningkatkan aksesibilitas jalan berkualitas antara lain 1) meningkatkan kualitas jalan dengan fokus mendorong terwujudnya jalan mantap untuk memperlancar jalur distribusi barang dan jasa, memperlancar menuju destinasi wisata; 2) meningkatkan keselamatan transportasi dengan fokus mendorong tersedianya rambu rambu lalu lintas, penyediaan angkutan pada jaringan jalan, melakukan rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi kemacetan.

Terwujudnya daya saing perekonomian berbasis potensi lokal, industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan pariwisata di Kabupaten Sragen tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.4.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Daya Saing Perekonomian Berbasis Potensi Lokal, Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan Dan Pariwisata Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
SP 2) Terwujudnya daya saing perekonomian berbasis potensi lokal, industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan pariwisata	AP3) Daya saing perekonomian daerah	17. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	42,02	42,16	42,26	42,37	49,45
		18. Disparitas Harga	%	±10	±10	±10	±10	±10
		19. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	59,16	60,75	62,75	64,72	70
		20. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	%	8,99	7,69	6,07	4,45	2,50
		21. Indeks Ketahanan Pangan	Angka	88,67	89,60	90,76	91,93	93,32
		22. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	940	1058	1226	1422	1698
		23. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,46	4,18	5,08	5,97	7,05
		24. Kapabilitas Inovasi	Angka	2,58	2,77	3,02	3,26	3,56
		25. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	4,79	4,86	5,14	7,26	12,77
		26. Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,18	4,98	5,98	6,98	8,16
		27. Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	24,27	27,38	31,27	35,16	39,82
		28. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,55-3,17	3,12	2,56	1,96	1,30-1,00
		29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	58,45	62,56	64,93	67,15	74,47

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		30. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	12,98	20,98	30,98	40,98	52,98
		31. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	7,13	7,70	8,40	9,06	9,78
		32. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB	%	2,23	1,79	1,36	1,02	0,71
		33. Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,51	2,49	3,47	4,45	5,46
	AP4) Aksesibilitas jalan berkualitas	34. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	87,94	88,11	88,97	89,44	90,03
		35. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	67,41	68,95	70,33	71,36	72,73

### 5.2.3. Sasaran Pokok 3. Terwujudnya perlindungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat

#### AP5) Perlindungan sosial yang adaptif

Perlindungan sosial diberikan pada masyarakat Kabupaten Sragen tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan perlindungan sosial Kabupaten Sragen dalam dua puluh tahun ke depan yaitu 1) peningkatan kolaborasi stakeholder dalam perlindungan sosial; 2) perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan pemanfaatan sistem pengelolaan data kemiskinan agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien 3) perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat; 4) perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat; 5) pemberdayaan ekonomi mikro, yang inklusif dan berbasis kerakyatan; 6) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau.

#### AP6) Keluarga berkualitas dan Kesetaraan gender

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender di Kabupaten Sragen antara lain 1) peningkatan ketahanan keluarga; 2) peningkatan pengarusutamaan gender; 3) pemenuhan hak dan perlindungan anak; 4) peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan.

#### AP7) Desa mandiri Sejahtera

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan desa mandiri sejahtera di Kabupaten Sragen yaitu pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian desa berbasis potensi desa.

Terwujudnya perlindungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sragen tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.5.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya perlindungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
SP3) Terwujudnya perlindungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat	AP5) Perlindungan sosial yang adaptif	36. Tingkat Kemiskinan	%	11,65-12,07	9,77	6,90	4,02	0,00-0,57
		37. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,63	22,22	23,97	25,73	27,83
		38. Produk Domestik Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah/Th	53,14	94,66	142,51	190,37	247,82
	AP6) Keluarga berkualitas dan Kesenjangan gender	39. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,45	0,41	0,36	0,31	0,25
		40. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	65,40	68,52	72,42	76,31	80,98
	AP7) Desa mandiri Sejahtera	41. Persentase Desa Mandiri	%	15,31	19,70	25,18	30,66	37,24



#### **5.2.4. Sasaran Pokok 4. Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman layak**

##### **AP8) Akses perumahan dan permukiman layak**

Rumah merupakan kebutuhan primer semua masyarakat, arah kebijakan perwujudan perumahan dan kawasan permukiman yang layak Kabupaten Sragen dalam dua puluh tahun ke depan yaitu 1) peningkatan penanganan kawasan kumuh; 2) peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman; 3) pemenuhan kebutuhan perumahan dalam mengurangi backlog perumahan.

Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman layak di Kabupaten Sragen tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.6.  
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Layak Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
SP4) Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman layak	AP8) Akses perumahan dan permukiman layak	42. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	78,53	83,89	89,25	94,61	100,00

#### **5.2.5. Sasaran Pokok 5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, dinamis dan akuntabel**

##### **AP9) Tata kelola pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif**

Kebijakan dalam rangka Perwujudan tata kelola berintegritas, adaptif, dan kolaboratif di Kabupaten Sragen dalam dua puluh tahun ke depan yaitu 1) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; 2) sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan nasional; 3) penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; 4) penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat berbasis digital dan keterbukaan informasi; 5) penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko; 6) penguatan kelembagaan yang efektif; 7) digitalisasi tata kelola pemerintahan dan perluasan akses internet di masyarakat; 8) akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien; 9) penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum; 10) penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi; 11) penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka Perwujudan cita-cita pembangunan daerah; 12) penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik; 13) mendorong satu data daerah; 14) peningkatan koordinasi dengan kementerian hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi; 15) peningkatan kompetensi ASN sebagai perancang per UU an yang berkualitas.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, dinamis dan akuntabel di Kabupaten Sragen tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.7.  
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Dinamis dan Akuntabel Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
SP5)Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, dinamis dan akuntabel	AP9) Tata kelola pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	43. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,47	0,52	0,58	0,65	0,73
		44. Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,15	4,32	4,53	4,75	5,00
		45. Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,84	67,87	71,66	75,45	80,00
		46. Indeks Reformasi Hukum	Angka	48,00	56,00	66,00	76,00	85,00
		47. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	4,26	4,30	4,35	4,43	4,57
		48. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	78,51	81,69	85,26	87,98	89,63
		49. Indeks Integritas Nasional	Angka	82,42	85,68	89,75	93,82	98,70

### 5.2.6. Sasaran Pokok 6. Terwujudnya Ketahanan Bencana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

#### AP10) Ketahanan SDA, Lingkungan hidup, Bencana, Sanitasi dan Air Minum.

Perwujudan ketahanan bencana, sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan peningkatan Sumber Daya Alam, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan layanan sanitasi dan air minum. Dalam mewujudkannya tetap memperhatikan dampak negatif lainnya, mengurangi resiko kerusakan lingkungan sesuai konsep *Green economy* atau ekonomi hijau.

#### **Ketahanan SDA dan Lingkungan Hidup**

Arah kebijakan dua puluh tahun kedepan dalam upaya memperkuat ketahanan SDA dan lingkungan hidup yaitu 1) peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2) peningkatan indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan; 3) peningkatan manajemen, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya; 4) pemenuhan sarana dan prasarana persampahan; 5) peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergitas pengelolaan sampah; 6) peningkatan penanganan limbah B3; 7) Implementasi kebijakan perencanaan wilayah dan lingkungan hidup; 8) peningkatan kampung proklam; 9) penurunan emisi gas rumah kaca dengan pembangunan yang rendah karbon.

#### **Sanitasi dan Air minum**

Arah kebijakan dua puluh tahun kedepan dalam upaya memperkuat sanitasi dan air minum yaitu 1) peningkatan akses air minum aman dengan pengujian kualitas air minum; 2) peningkatan sosialisasi sanitasi aman; 3) peningkatan sanitasi aman sarana dan prasarana (IPLT, tangki septic kedap, penyedotan secara berkala); 4) Peningkatan sanitasi aman dengan perluasan layanan .

#### **Bencana**

Arah kebijakan dua puluh tahun kedepan dalam upaya peningkatan ketahanan bencana yaitu 1) peningkatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana; 2) memperkuat ketangguhan wilayah terhadap bencana; 3) Peningkatan wilayah Manajemen Kebakaran

Terwujudnya ketahanan bencana, sumber daya alam dan lingkungan hidup. di Kabupaten Sragen tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.8.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Ketahanan Bencana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
SP6) Terwujudnya Ketahanan Bencana, Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup.	AP10) Ketahanan SDA, Lingkungan hidup, Bencana, Sanitasi dan Air minum.	50. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	72,63	72,80	73,02	73,24	73,51
		51. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	26,54	30,02	45,06	67,42	90,00
		52. Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	212.629,09	907.516,90	4.572.055,64	10.607.699,44	17.916.140,75
		53. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,04	21,04	41,04	61,04	85,04
		54. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	65,20	72,53	81,68	90,81	100,00
		55. IRB (Indeks Risiko Bencana)	Angka	121,53	113,80	104,15	94,49	82,90

Ket \*) : Target Penurunan emisi GRK Komulatif Kabupaten/ Kota berdasarkan PRKD Jawa Tengah



### **5.2.7. Sasaran Pokok 7. Terwujudnya kondusivitas wilayah**

#### **AP11) Ketenteraman dan ketertiban**

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kondusivitas wilayah yang tenteram dan tertib di Kabupaten Sragen antara lain 1) peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah; 2) Penegakan Peraturan Daerah; 3) mendorong sinergitas dengan semua *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.

Terwujudnya kondusivitas wilayah. di Kabupaten Sragen tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.



Tabel 5.9.  
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
SP7) Terwujudnya kondusivitas wilayah	AP11) Ketenteraman dan ketertiban	56. Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0

Berikut hasil penyelarasan sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Sragen dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Tabel 5.10.  
Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sragen dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Sragen	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif	CJ01. Kesehatan untuk Semua	SP1) Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik	AP1) Kesehatan untuk semua
			SP4) Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman layak	AP8) Akses perumahan dan permukiman layak
		CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif		AP2) Pendidikan berkualitas yang inklusif dan Pemajuan Kebudayaan
		CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif	SP3) Terwujudnya perlindungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat	AP5) Perlindungan sosial yang adaptif
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	SP 2) Terwujudnya daya saing perekonomian berbasis potensi lokal, industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan pariwisata	AP3) Daya saing perekonomian daerah
		CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau		AP3) Daya saing perekonomian daerah
		CJ06. Transformasi Digital		AP3) Daya saing perekonomian daerah
		CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		AP3) Daya saing perekonomian daerah
		CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi		AP4) Aksesibilitas jalan berkualitas
3	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang Berintegrasi dan Dinamis	CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrasi, adaptif, dan Kolaboratif	SP5)Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, dinamis dan akuntabel	AP9) Tata kelola pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Sragen	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	2	3	4	5
4	Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	SP7) Terwujudnya kondusivitas wilayah	AP11) Ketenteraman dan ketertiban
		CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	SP 2) Terwujudnya daya saing perekonomian berbasis potensi lokal, industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan pariwisata	AP3) Daya saing perekonomian daerah
		CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah		AP3) Daya saing perekonomian daerah
5	Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	SP1) Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik	AP2) Pendidikan berkualitas yang inklusif dan Pemajuan Kebudayaan
		CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Ketahanan Wilayah	SP3) Terwujudnya perlindungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat	AP6) Keluarga berkualitas dan Kesetaraan gender
				AP7) Desa mandiri Sejahtera
6	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	SP6) Terwujudnya Ketahanan Bencana, Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup.	AP10) Ketahanan SDA, Lingkungan hidup, Bencana, Sanitasi dan Air minum.
		CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		AP10) Ketahanan SDA, Lingkungan hidup, Bencana, Sanitasi dan Air minum.
		CJ17. Realisasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		AP10) Ketahanan SDA, Lingkungan hidup, Bencana, Sanitasi dan Air minum.

5.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen dalam rencana pembangunan jangka panjang harus memperhatikan kewilayahan serta mempertimbangkan beberapa kebijakan, diantaranya :

1. Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2024 -2044 dengan arah pengembangan wilayah khususnya untuk Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:
  - a. Sistem Jaringan Transportasi
    - 1) Sistem Jaringan Jalan diantaranya :
      - Terminal penumpang yaitu dengan pembangunan atau pengembangan terminal penumpang tipe A dan Tipe B.
      - Pengembangan jembatan timbang
    - 2) Sistem Jaringan Kereta Api meliputi :  
Pengembangan jaringan jalur kereta api regional meliputi jalur Jogja – Solo – Semarang, jalur Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), dan jalur Solo – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukowonosraten);
  - b. Sistem Jaringan Energi  
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) berada di Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Karanganyar;
  - c. Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri.
  - d. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten, meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten dengan arah pengembangan :
    - Pengembangan sektor ekonomi daerah.
    - Pengelolaan dan pengembangan pariwisata.
    - Menerpadukan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur.
    - Pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, berdasarkan arah pengembangan wilayah sesuai dengan dokumen RTRW Kabupaten Sragen berada di :
  - a. Kawasan Perkotaan Sragen;  
Rencana pengembangan perkotaan Sragen dalam rangka mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah yaitu Subosukawonosraten adalah sebagai berikut:
    - 1) Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan Terpadu;
    - 2) Rencana Pengembangan Kawasan Perkantoran Terpadu;
    - 3) Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan;
    - 4) Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan Barang Dan Jasa;
    - 5) Revitalisasi Pasar Sragen;
    - 6) Rencana Pengembangan Moda Transportasi Perkotaan Yang Memadai;
    - 7) Rencana Pengembangan Pasar Tradisional Yang Bersih, Aman, Nyaman Dan Sehat;

- 8) Rencana Pengembangan Pasar Modern Perkotaan;
  - 9) Rencana Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
  - 10) Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Khusus;
  - 11) Rencana Pengembangan Terminal Tipe B; Dan
  - 12) Rencana Pengembangan Kawasan Teknologi.
- b. Kawasan Perkotaan Gemolong;
- 1) Rencana Pengembangan perkotaan Sragen adalah sebagai berikut:
  - 2) Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan Terpadu;
  - 3) Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan;
  - 4) Rencana Pengembangan Fasilitas Kesehatan;
  - 5) Rencana Pengembangan Kegiatan Pariwisata;
  - 6) Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan Barang Dan Jasa;
  - 7) Rencana Pengembangan Moda Transportasi Perkotaan Yang Memadai;
  - 8) Rencana Pengembangan Pasar Tradisional Yang Bersih, Aman, Nyaman Dan Sehat;
  - 9) Rencana Pengembangan Pasar Modern Perkotaan; Dan
  - 10) Rencana Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- c. Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan;
- Pada Kawasan ini memiliki rencana pengembangan sebagai berikut:  
Pengembangan Kota Baru Berbasis Industri;  
Pengelolaan Kawasan Industri Oleh Perusahaan Pengelola Kawasan Industri.
- d. Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo dan sekitarnya
- Pada Kawasan ini merupakan rencana akan dikembangkan Kawasan agropolitan melalui pembentukan Kawasan komoditas dan pembangunan terminal agropolitan.
- e. Kawasan Agropolitan Kecamatan Miri dan sekitarnya
- f. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sangiran dan sekitarnya.
- g. Wilayah Sangiran ditetapkan secara nasional sebagai KSPN Sangiran dan sekitarnya berdasarkan PP No 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS. KSPN Sangiran dan sekitarnya berada di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Solo - Sangiran dan sekitarnya karena peran strategis dalam konteks memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan. Sangiran adalah situs arkeologi di Jawa, Indonesia. Deleniasi KSPN Sangiran tersebar di 27 desa di 3 kecamatan-Kabupaten Sragen yang tersebar di Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Plupuh, Kecamatan Gemolong serta 1 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Dan berdasarkan dokumen Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Sangiran dan Sekitarnya meliputi wilayah Kemukus dan Waduk KedungOmbo.
- h. Kawasan Singensumonar
- Kawasan ini merupakan kawasan pertanian yang didominasi dengan kawasan hortikultura dan kehutanan. Rencana pengembangan Kawasan ini adalah mendorong produksi pertanian terutama padi pada sawah tadah hujan dan hasil perkebunan. Lahan pertanian akan dipertahankan dalam rangka mencapai kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Selain itu dalam menjaga daya dukung dan daya tampung pada Kawasan ini juga didorong sebagai Kawasan kehutanan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara



merata dan tidak ada ketimpangan wilayah di Kabupaten Sragen antara wilayah utara dan wilayah selatan Bengawan Solo yang cenderung subur secara karakteristik fisik alam.

# BAB VI

# PENUTUP



Wisata Sendang Kun Gerit Kec. Gemolong



## BAB VI

### PENUTUP

Penyusunan RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 disusun mengacu pada Ranwal RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 sebagai wujud dari keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen dalam dua puluh tahun ke depan serta dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen untuk turut andil dalam pembangunan daerah Kabupaten Sragen selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Dalam menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

#### 1. **Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan**

Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.

Konsistensi perencanaan dan pendanaan dilaksanakan melalui prinsip:

- Keterkaitan antara RPJPD Kabupaten Sragen dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya.
- Penerapan Kerangka kerja logis dalam perencanaan pembangunan
- Skema Pendanaan dan penganggaran

#### 2. **Kerangka Pengendalian.**

Kerangka pengendalian pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sragen 2025 – 2045 bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2025–2045. Kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi:

- pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan
- pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

#### 3. **Sistem Insentif**

Sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

#### 4. **Mekanisme Perubahan**

Mekanisme perubahan diperlukan

dalam rangka menjaga kesinambungan dan kontinuitas kebijakan pembangunan daerah. Dalam upaya mencegah kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah mendatang maka Penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Sragen periode mendatang

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD Kabupaten Sragen periode berikutnya adalah sesuai dengan kurun waktu RPJPN yang akan datang.

## 5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan Dokumen RPJPD ini diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak di Kabupaten Sragen dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Sragen dua puluh tahun ke depan. Harapan ke depan dengan terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025-2045 yaitu SRAGEN TANGGUH 2045: “KABUPATEN SRAGEN BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN” akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

Sragen, 27 Agustus 2024

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI





## **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

Jl. Raya Sukowati No.255, Sragen, Jawa Tengah

Telp. 0271-891173 Fax. 0271-890981

Website [www.bappeda.sragenkab.go.id](http://www.bappeda.sragenkab.go.id)

Email [bappeda.sragenkab.go.id](mailto:bappeda.sragenkab.go.id)

